

**LAPORAN TAHUN TERAKHIR
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(PDUPT)**



**PRAKTIK PERNIKAHAN DINI ANAK PEREMPUAN
DALAM KOMUNITAS MISKIN DI PROVINSI JAWA TIMUR
(STUDI PERSPEKTIF GENDER UNTUK MODEL PERLINDUNGAN ANAK)**

TAHUN KE 2 DARI RENCANA 2 TAHUN

Prof. Dr. Dra. Emy Susanti, M.A.	0015035808
Satiti Kuntari, drg., M.S.	0018075504
Dra. Sartika Soesilowati, M.A., Ph.D.	0005087905

DIBIYAI OLEH:

**DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018**

**LAPORAN TAHUN TERAKHIR
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(PDUPT)**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**



KKB
Kk-2
07.44/19
Sus
P

**PRAKTIK PERNIKAHAN DINI ANAK PEREMPUAN
DALAM KOMUNITAS MISKIN DI PROVINSI JAWA TIMUR
(STUDI PERSPEKTIF GENDER UNTUK MODEL PERLINDUNGAN ANAK)**

TAHUN KE 2 DARI RENCANA 2 TAHUN

Prof. Dr. Dra. Emy Susanti, M.A.	0015035808
Satiti Kuntari, drg., M.S.	0018075504
Dra. Sartika Soesilowati, M.A., Ph.D.	0005087905

**DIBIYAI OLEH:
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018**

MAJLIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
RESEARCH AND TECHNOLOGY COUNCIL
(RAT)

ALIR

PERPUSTAKAAN

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SILVANA

MAJLIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
RESEARCH AND TECHNOLOGY COUNCIL
(RAT)

MAJLIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

Prof. Dr. Emy Susanti, M.P.
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Airlangga

DIREKTORAT RISET DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
RESEARCH AND TECHNOLOGY COUNCIL
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
RESEARCH AND TECHNOLOGY COUNCIL

UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOTES

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Praktek Pernikahan Dini Anak Perempuan dalam Komunitas Miskin di Provinsi Jawa Timur (Studi Perspektif Gender untuk Model Perlindungan Anak)

Peneliti/Pelaksana
 Nama Lengkap : Dr. Dra THERESIA EMY SUSANTI, M.A
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
 NIDN : 0015035808
 Jabatan Fungsional : Guru Besar
 Program Studi : Ilmu Sosial
 Nomor HP : 082245645129
 Alamat surel (e-mail) : emy.susanti@fisip.unair.ac.id

Anggota (1)
 Nama Lengkap : SATITI KUNTARI S.KG
 NIDN : 0018075504
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Anggota (2)
 Nama Lengkap : Dra SARTIKA SOESILOWATI M.A, Ph D
 NIDN : 0030076404
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Institusi Mitra (jika ada)
 Nama Institusi Mitra : -
 Alamat : -
 Penanggung Jawab : -
 Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
 Biaya Tahun Berjalan : Rp 110,000,000
 Biaya Keseluruhan : Rp 220,000,000



Mengetahui,
 Wakil Dekan 1 FISIP

(Prof. Dr. Budi Prasetyo, Drs., M.Si)
 NIP/NIK 196507191990031002

Kota Surabaya, 12 - 11 - 2018
 Ketua,

(Dr. Dra THERESIA EMY SUSANTI, M.A)
 NIP/NIK 195803151934032001

Menyetujui,
 Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi

(Prof. Drs. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D)
 NIP/NIK 196705071991021001



RINGKASAN

Studi di tahun pertama menunjukkan temuan bahwa praktek pernikahan dini pada anak perempuan sangat berkaitan dengan realitas kemiskinan dan peminggiran peran perempuan dalam kehidupan keluarga dan peran publik. Studi ini merupakan studi lanjutan (tahun kedua) yang dimaksudkan untuk mengungkap lebih jauh keterkaitan antara realitas praktek pernikahan dini anak perempuan (perkawinan dibawah usia 18 tahun) dengan ideologi gender dalam komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur. Studi ini juga ingin mengungkap bagaimana nilai-nilai dan sistem patriarki dalam praktek pernikahan dini anak perempuan pada komunitas miskin. Studi ini lebih jauh juga ingin menemukan bagaimana model dan strategi pengaurutamaan gender yang dapat diimplementasikan untuk perlindungan dan pencegahan praktek pernikahan dini bagi komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur.

Sebagai studi lanjutan, studi ini dilakukan di lokasi penelitian sesuai studi pada tahun pertama, yaitu di 3 (tiga) Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Sampang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Ponorogo. Subyek penelitian ini adalah anak perempuan pelaku-korban pernikahan dini usia sebelum 18 tahun dan anggota keluarga besarnya serta tokoh masyarakat dalam komunitas miskin dimana terjadi praktek pernikahan dini anak perempuan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang dilengkapi dengan data kuantitatif. Studi ini adalah sebuah studi kebijakan dengan pendekatan perspektif gender. Dalam studi ini Teori Relasi Gender dan Seksualitas dari Foucault digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami realitas pernikahan dini anak perempuan di Provinsi Jawa Timur. Studi ini juga menggunakan kerangka analisis teori Kemiskinan untuk memahami realitas pernikahan dini anak perempuan di kalangan komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur.

Hasil akhir dari studi ini adalah tersusunnya pendekatan dan analisis baru model perlindungan dan pencegahan praktek pernikahan dini anak perempuan dalam komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur yang berperspektif gender. Model ini adalah model pemberdayaan yang bersifat holistik yang dapat menjamin kondisi kesetaraan gender bagi perempuan dan laki-laki khususnya dalam komunitas miskin menuju kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

(Key Words: Perempuan, Pernikahan/Perkawinan Anak, Kemiskinan, Relasi Gender, Model Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberdayaan Keluarga)



PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan Penelitian yang berjudul *Praktek Pernikahan Dini Anak Perempuan dalam Komunitas Miskin di Provinsi Jawa Timur (Studi Perspektif Gender untuk Model Perlindungan Anak)*’.

Studi setidaknya memetakan profil masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mengidentifikasi praktek pernikahan dini dulu dan sekarang, serta bagaimana dinamika praktek pernikahan dini di masa sekarang. Melalui studi ini dapat diperoleh gambaran secara holistik mengenai praktek pernikahan dini yang mana menjadi salah satu pilihan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan bagi kehidupan mereka. Studi ini dapat menjadi masukan bagi kebijakan dan program Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur dalam hal kebijakan untuk mengatasi permasalahan Pernikahan Dini dan kebijakan pemberdayaan keluarga yang melakukan pernikahan dini sebagai upaya untuk mengurangi angka pernikahan di usia dini di Provinsi Jawa Timur.

Berbagai hambatan dan problema yang kami hadapi dalam pelaksanaan penelitian ini dapat teratasi berkat kerjasama dan bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemristekdikti
2. Rektor Universitas Airlangga
3. Bapak Prof. H. Hery Purnobasuki, Drs, MSi, PhD, selaku Ketua LPI Universitas Airlangga.
4. Pemda Kabupaten Sampang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Ponorogo
5. Para Narasumber dalam penelitian ini
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih pada semua pihak dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Berkah dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 11 November 2018

Ketua Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
BAB 4 METODE PENELITIAN	13
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	18
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	68
.....	
DAFTAR PUSTAKA	70

LAMPIRAN :

1. Instrumen
2. Personalia Tenaga Pelaksana beserta Kualifikasinya
3. Luaran Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

1.1. Latar Belakang

Hasil penelitian pada tahun pertama menunjukkan bahwa pernikahan dini pada anak perempuan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi, khususnya Hak Asasi perempuan dan anak. Praktek pernikahan dini pada anak perempuan di dalam komunitas miskin pada umumnya dianggap sebagai jalan keluar untuk kemiskinan. Walaupun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pernikahan dini anak perempuan justru memperburuk kondisi kemiskinan. Anak perempuan dibelenggu tugas rumah tangga dan mengasuh anak sehingga tidak mungkin terlibat dalam kegiatan produktif. Seorang perempuan yang melakukan pernikahan di usia muda sebelum menikah dapat membantu orang tuanya bekerja di sawah dan mendapatkan penghasilan. Setelah menikah, mereka tidak bisa lagi bekerja di sawah, sementara uang dari suami mereka sangat terbatas dan tidak selalu cukup membeli susu dan makanan tambahan untuk anak balita mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah dini menjadi 'korban' dan malah masuk ke dalam perangkap kemiskinan tanpa akhir.

Hasil penelitian tahun pertama memperlihatkan bahwa di dalam rumah tangga, isteri yang berusia muda hanya memiliki sedikit kekuatan tawar menawar dan kemampuan untuk membuat keputusan mengenai berbagai aspek kehidupannya. Suami dan ibu mertua sangat menentukan perannya dalam keluarga dan mengendalikan akses dan partisipasi di dunia luar. Hal ini sering terjadi selama pernikahannya dan berarti kurang bisa mengontrol sumber daya yang posisinya lebih lemah di rumah tangganya. Perempuan yang menikah dini memiliki akses yang lebih terbatas terhadap informasi dan layanan kesehatan, dan kondisi kesehatannya lebih buruk, termasuk kesehatan mental, kepercayaan diri, dan harga diri.

Praktek pernikahan dini pada anak perempuan terjadi karena alasan ekonomi namun dampaknya buruk bagi kehidupan anak perempuan yang sudah menikah di usia muda. Bagi anak perempuan yang sudah menikah, mereka akan menderita karena kehilangan hak sebagai anak-anak. Status menikah dengan multi beban dan kewajiban dalam tugas domestik, akan menutup kesempatan untuk mendapatkan kehidupan sesuai dengan cita-citanya. Perempuan yang sudah menikah di usia dini rentan dilanggar

haknya sebagai anak karena secara hukum dia tidak lagi dikategorikan sebagai anak kecil. Dengan demikian, anak perempuan potensial kondisi kehidupannya menjadi lebih buruk setelah menikah di usia muda karena mereka terikat dalam pernikahan dan melakukan tugas rumah tangga dan tidak dapat bersekolah.

Studi pada tahun pertama juga mengungkapkan bahwa relasi kuasa antara isteri berusia muda dengan suami, orang tua dan mertua sangat tidak setara. Konsekuensi perkawinan anak dirasakan paling tajam di tingkat individu perempuan, tetapi perkawinan anak juga cenderung memiliki dampak mendalam dan luas pada tingkat nasional dan global dalam bentuk pendapatan yang hilang dan pewarisan kemiskinan antar generasi. Dampak ekonomi dan biaya pernikahan anak cenderung sangat tinggi bagi anak perempuan yang menikah lebih awal, anak-anak mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka, dan masyarakat luas. Namun, hubungan kekuasaan berbasis gender yang tidak setara berkembang dalam praktek pernikahan perempuan di masyarakat miskin. Kekuasaan berbasis gender berkaitan dengan hak yang membatasi kekuatan dan dampak pengetahuan yang dihasilkan dan diwariskan melalui kekuasaan dan yang pada gilirannya mereproduksi kekuatan ini.

Penelitian tahun pertama juga menghasilkan sebuah draft Model Kebijakan dan Rekayasa Sosial Perlindungan Perempuan dan anak berbasis Kesetaraan Gender yang dapat diimplementasikan dalam bentuk uji coba pada tahun kedua. Sampai saat ini walaupun Pemerintah telah membuat Kebijakan untuk mencegah pernikahan dini anak perempuan di Indonesia, khususnya dalam komunitas miskin tetapi hingga saat ini praktek pernikahan dini anak perempuan di Provinsi Jawa Timur tetap banyak ditemui. Selain itu, dalam banyak kasus telah terbukti bahwa praktek pernikahan dini anak perempuan lebih banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan, khususnya bagi anak perempuan. Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, menjadi jelas pentingnya memahami dan membongkar realitas pernikahan dini anak perempuan di Provinsi Jawa Timur, khususnya anak perempuan dari keluarga miskin. Studi ini penting dilakukan karena sebagaimana terjadi selama ini, Kebijakan Pemerintah dan Perundangan tentang pernikahan dini anak tidak dengan mudah dapat mengurangi praktek pernikahan dini anak. Pencegahan praktek pernikahan dini anak perempuan harus dilakukan secara holistik yang langsung menyentuh perubahan nilai-nilai sosial budaya, khususnya dalam komunitas miskin. Melalui studi ini yang berupaya memahami realitas praktek pernikahan dini anak perempuan di Provinsi Jawa Timur diharapkan akan dapat

dirumuskan masukan dalam berbagai program untuk mencegah dan mengurangi terjadinya praktek pernikahan anak perempuan di kalangan komunitas miskin.

1.2. Fokus-Masalah Penelitian

Penelitian ini secara rinci ingin mengungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan antara realitas praktek pernikahan dini anak perempuan (perkawinan dibawah usia 18 tahun) dengan ideologi gender dalam komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur.
2. Bagaimana nilai-nilai dan sistem patriarki dalam praktek pernikahan dini anak perempuan pada komunitas miskin.
3. Sejauh mana Model Kebijakan dan Rekayasa Sosial perlindungan dan pencegahan praktek pernikahan dini anak perempuan berperspektif gender dapat diterima dan memberikan perubahan positif dalam kehidupan komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ideologi Gender dan Patriarkhi

Teori yang berperspektif gender setidaknya mencakup 3 (tiga) elemen pokok (Nicholson, 1990), yaitu: (1) Yang menjadi fokus perhatian adalah 'gender' sehingga penjelasan sepenuhnya ditujukan untuk memahami dimensi gender dari hubungan sosial, pranata sosial, dan proses sosial; (2) Gender dilihat sebagai 'issue' (permasalahan) sehingga berusaha memahami bagaimana gender dikaitkan dengan ketimpangan sosial, 'ketegangan' sosial dan kontradiksi-kontradiksi sosial; (3) Gender tidak dilihat sebagai hal yang bersifat alamiah dan kekal. Gender dilihat sebagai produk SOSIO kultural dan kekuatan historis yang telah diciptakan oleh manusia sehingga secara potensial dapat diubah oleh manusia.

Sehubungan dengan upaya memahami kehidupan perempuan dan relasi gender dalam komunitas miskin secara utuh maka disini digunakan penjelasan yang lebih luas daripada sekedar penjelasan stereotipi (*stereotype*) yang hanya melihat perempuan sebagai individu yang pasif. Gender dalam studi ini menjadi 'subyek analisis,' sehingga gender dilihat sebagai hal yang 'dapat diubah' dan sekaligus sebagai 'bagian dari proses perubahan.'

Berkaitan dengan pembicaraan mengenai relasi gender, khususnya relasi gender di dalam rumah tangga, Moser (1993: 27-36) mengamati bahwa dalam kehidupan rumahtangga, pada dasarnya perempuan memegang tiga tanggung jawab sekaligus yaitu: tanggung jawab bidang reproduktif, produktif, dan pengelolaan komunitas. Bidang 'reproduktif meliputi aktivitas yang ditujukan untuk pengasuhan dan pendidikan anak serta tugas-tugas domestik yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan dan reproduksi dari anggota rumahtangga yang bekerja. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab perempuan ini tidak hanya meliputi reproduksi biologis, tetapi juga meliputi pelayanan dan keberlangsungan kerja dari suami dan anak-anak yang bekerja atau anak-anak yang masih sekolah. Bidang

'produktif' meliputi aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh imbalan dalam bentuk uang atau barang. Ini meliputi produksi pasar dengan nilai tukar dan produksi rumahtangga (*subsistence*) dengan nilai guna yang nyata tetapi juga nilai tukar potensial. Bidang 'sosial - pengelolaan komunitas' meliputi aktivitas yang dilakukan pada tingkat komunitas sebagai perluasan dari tugas dan tanggung jawab reproduksi. Kegiatan ini untuk mendukung ketersediaan dan sarana dari sumber daya yang terbatas untuk konsumsi kolektif seperti air, kesehatan dan pendidikan. Ini merupakan pekerjaan sukarela yang tidak dibayar dan dilakukan pada waktu 'senggang'. Sebagai pembanding, kegiatan yang dilakukan laki-laki pada tingkat komunitas adalah pengelolaan pada tingkat politik formal, biasanya merupakan pekerjaan yang dibayar secara langsung maupun tidak, melalui gaji atau peningkatan dalam status dan kekuasaan.

Tugas dan tanggung jawab perempuan ini sebenarnya tampak lebih melekat pada perempuan-perempuan lapisan bawah atau miskin, daripada mereka yang berada di kelompok menengah maupun kelompok kelas atas. Karena itu, konsep tersebut menjadi penting dan sangat relevan untuk memahami kehidupan perempuan miskin. Dengan melihat bagaimana perempuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka memungkinkan mengungkap relasi gender dan dinamika kehidupan perempuan miskin secara lebih mendalam.

Selanjutnya menggunakan cara penjelasan dan analisis tentang patriarki untuk memahami relasi gender, Walby melihat cara baru menteorisasikan patriarki dengan membedakan tingkat abstraksi patriarki. Pada tingkat abstrak, 'Patriarki' menunjuk pada system relasi social, sedangkan pada tingkat lebih konkrit 'Patriarki' menunjuk pada struktur-struktur social (Walby, 1990:20). Selanjutnya patriarki dapat dibedakan dalam dua tipe patriarki, yaitu: 'patriarki publik' dan 'patriarki privat'. Patriarki privat berpijak pada produksi rumah tangga sebagai lingkungan tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam kekuasaan tersebut. Dengan perkataan lain, pemikiran ini memandang bahwa satu golongan dianggap mempunyai kekuasaan, sedangkan golongan-golongan yang lain semua disubordinasikan oleh golongan penguasa (Farganis, 1993).

Berbeda dengan Marx yang melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang

terpusat melalui konsep ideologinya, Foucault (1990) melalui konsep diskursusnya menggambarkan bahwa kekuasaan itu sebenarnya tidak terpusat. Ia mengatakan bahwa: —Kekuasaan ada di mana-mana, bukan karena kekuasaan mencakup segala hal, tetapi karena kekuasaan datang dari mana-mana (Foucault, 1990:93). Kekuasaan bukanlah suatu institusi dan bukan pula suatu struktur, tetapi merupakan sebutan yang diberikan untuk menyebut situasi strategi yang rumit dalam masyarakat. Kekuasaan tercermin dalam ‘diskursus’ (wacana) yang diartikan sebagai;

“serangkaian ide dan argument mengenai suatu obyek atau fenomena yang secara langsung berkaitan dengan teknik pengontrolan dan struktur kekuasaan” (Foucault, 1990:93).

Relasi sosial laki-laki dan perempuan (relasi gender) yang dibagi dalam peran domestik bagi perempuan dan peran publik bagi laki-laki yang telah berlangsung secara turun temurun menimbulkan ketimpangan gender. Institusi sosial yang menata bagaimana relasi gender berlangsung dalam masyarakat yang menimbulkan ketimpangan gender tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Institusi Sosial ini masih bertahan dengan kokohnya karena pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa relasi gender yang timpang ini tidak perlu dipermasalahkan lagi karena ‘bersifat alamiah dan luhur’. Padahal realitas sosial menunjukkan bagaimana ketimpangan gender telah menimbulkan diskriminasi gender dan bahkan kekerasan berbasis gender yang berlangsung sejak lahir.

Berbagai studi menunjukkan bahwa diskriminasi gender berlangsung dalam siklus kehidupan perempuan sejak kelahiran sampai dengan masa tua. Kelahiran anak perempuan tidak/jarang dirayakan secara khusus bahkan seringkali mendapat perlakuan yang tidak proporsional karena kelahirannya tidak/kurang dikehendaki. Anak perempuan mengalami kondisi buruk dalam hal gizi, imunisasi, tingkatpenderita sakit dan tingkat kematian serta tingkat kesehatan pada umumnya. Rendahnya dorongan dan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan,rendahnya perhatian dalam pengasuhan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Besarnya tanggung jawab tugas domestik bagi anak perempuan, menjadipekerja keluarga, rendahnya prioritas pendidikan sehingga angka ‘drop out’ tinggi dan tingkat pendidikan anak perempuan rendah. Pada tahap ini anak perempuan disiapkan untuk memasuki jenjangpernikahan dini, sebaliknya anak laki-laki mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dan disiapkan melaksanakan peran- peran publik.

Selanjutnya, berbagai studi juga menunjukkan bahwa diskriminasi gender telah

menimbulkan tindak kekerasan pada perempuan dalam berbagai bentuk. Tindak kekerasan itu sendiri tidak selalu disadari oleh para perempuan, apalagi anak-anak perempuan karena tindak kekerasan tersebut terbalut dalam nilai-nilai sosial budaya dan diatur oleh norma-norma sosial yang dipatuhi seluruh masyarakat. Tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dialami dalam setiap masa kehidupan perempuan. Diantara yang termasuk kategori tindak kekerasan terhadap perempuan adalah pernikahan dini anak-anak perempuan karena pernikahan dini ini adalah sebuah *'kawin paksa'*. Pernikahan dini anak ini seringkali sudah menjadi tradisi dan tidak dirasakan sebagai keterpaksaan yang terlihat kasat mata. Tidakkah mudah membongkar apa yang terjadi dibalik realitas pernikahan dini pada anak-anak perempuan ini, padahal realitas ini sangat problematik dan pemahaman tentang realitas pernikahan dini pada anak-anak perempuan dapat memberi solusi dan menyelamatkan kehidupan generasi yang akan datang.

Relasi gender yang timpang adalah hasil dari sebuah konstruksi sosial, sehingga berbeda menurut tempat dan waktu. Konstruksi sosial dibentuk melalui proses yang panjang, melalui wacana sosial yang kemudian menjadi sebuah *'ideologi gender'*. Lewat pernyataan, dialog dan tindakan sosial komunitas tersebut dapat diungkap problematika yang dihadapi anak perempuan dalam praktek pernikahan dini. Pernyataan, dialog dan tindakan sosial di sekitar realitas pernikahan dini adalah sebuah diskursus sosial yang dapat membongkar apa yang sebenarnya terjadi sehingga pernikahan dini tetap eksis di tengah keberadaan Undang-undang pembatasan dan larangan pernikahan dini.

2.2. Kemiskinan dan Relasi Gender

Realitas kemiskinan dapat digambarkan sebagai situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan Supriatna (1997:90). Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Masyarakat miskin sesuai karakteristiknya pada umumnya ditandai lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin

tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Kemiskinan juga dapat dideskripsikan dari cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda, dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan, sebagai berikut:

Pertama, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan; *Kedua*, kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.

Lima karakteristik Kemiskinan dapat dilihat dari ketidak beruntungan (*disadvantages*) yang melingkupi orang miskin atau keluarga miskin antara lain: (a) *poverty*, (b) *physical weakness*, (c) *isolation*, (d) *powerlessness* (Chamber, 1987:109). Moeljarto (1995:98) mengemukakan tentang *Poverty Profile* sebagaimana berikut: Masalah kemiskinan bukan saja masalah *welfare* akan tetapi mengandung enam buah alasan antara lain : (a) Masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan. (b) Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi. (c) Masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, emosional dan sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga membuatnya tidak berdaya. (d) Kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas. (e) Tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar. (f) Adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus.

Mengungkap fenomena kemiskinan dan kehidupan perempuan miskin juga memerlukan pemahaman secara mendalam tentang pola kehidupan keluarga sehingga menjadi penting untuk dibedakan antara unit keluarga dan unit rumahtangga. Selama ini seringkali dianggap bahwa unit rumahtangga adalah sama dengan unit keluarga karena struktur rumahtangga pada umumnya terdiri dari keluarga batih atau keluarga inti dan mereka yang memiliki hubungan darah. Tetapi pada kenyataannya konsep ini lebih merupakan suatu tipe ideal dan dianggap gagal mengenali kehidupan komunitas miskin. Selain itu, juga timbul persoalan dengan

konsep kepala keluarga karena selama ini diasumsikan bahwa yang menjadi kepala keluarga adalah pria. Padahal konsep kepala keluarga yang diartikan sebagai pencan nafkah utama yang merupakan penopang utama keluarga di mana anggota lainnya bergantung padanya, bisa saja dilakukan oleh perempuan. Karena itu, unit keluarga dilihat sebagai suatu unit sosial berdasarkan pada hubungan kekerabatan, perkawinan dan hubungan orangtua anak. Sementara itu, rumahtangga adalah unit tempat tinggal bersama untuk tujuan produktif, reproduktif, konsumsi dan sosialisasi.

Lebih lanjut dikenal lima karakteristik penduduk yang dapat dikategorikan miskin, yaitu: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai (Emil Salim dalam Supriatna, 1997: 82). Kemiskinan juga ditandai dengan keadaan kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah.

Kriteria lain yang digunakan untuk mengukur kemiskinan penduduk adalah dengan menggunakan Rasio Kebutuhan Fisik Minimum (RKFM). Apabila nilai kebutuhan fisik minimum per kapita per tahun dijadikan sebagai pembagi, maka akan diperoleh Rasio Kebutuhan Fisik Minimum (R-KFM). Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dikategorikan apakah penduduk tersebut miskin atau tidak. Apabila nilai R-KFM yang diperoleh sama dengan satu, berarti penduduk tersebut dikategorikan sebagai miskin, karena tingkat pendapatannya setingkat dengan tingkat subsisten (*subsistence level*). Artinya, pendapatan yang diperoleh orang tersebut hanya cukup untuk mempertahankan hidup (Zulkifli Husin dalam Supriatna, 1997:83).

Penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) (Nurkse dalam Mudrajat, K, 2006:132): adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya

pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya lingkaran kemiskinan berlanjut.

Munculnya kemiskinan juga dipahami berkaitan dengan budaya yang hidup dalam masyarakat, ketidakadilan dalam kepemilikan faktor produksi dan penggunaan model pendekatan pembangunan yang dianut oleh suatu Negara. Sementara itu Robert Chambers (1987:149) menegaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah. Lilitan kemiskinan hilangnya hak atau kekayaan yang sukar untuk kembali, mungkin disebabkan desakan kebutuhan yang melampaui ambang batas kekuatannya, misalnya pengeluaran yang sudah diperhitungkan sebelumnya, namun jumlahnya sangat besar, atau tiba-tiba dihadapkan pada krisis yang hebat. Lazimnya kebutuhan yang mendorong seseorang yang terlilit kemiskinan, berkaitan dengan lima hal; kewajiban adat; musibah; ketidak mampuan fisik, pengeluaran tidak produktif dan pemerasan.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi keterkaitan antara realitas praktek pernikahan dini anak perempuan (perkawinan dibawah usia 18 tahun) dengan ideologi gender dalam komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur.
2. Menemukenali bagaimana nilai-nilai dan sistem patriarki dalam praktek pernikahan dini anak perempuan pada komunitas miskin.
3. Menemukan strategi implementasi Model Kebijakan dan Rekayasa Sosial perlindungan pencegahan praktek pernikahan dini anak perempuan berperspektif gender berperspektif gender dapat diterima dan memberikan perubahan positif dalam kehidupan komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur.

3.2. Urgensi dan Manfaat Penelitian

Penelitian sebagaimana diusulkan ini penting untuk dilakukan, setidaknya karena alasan berikut:

Pertama, berkaitan dengan kebutuhan tersusunnya Model Kebijakan dan Rekayasa Sosial Perlindungan dan Pencegahan Praktek Pernikahan dini Anak Perempuan dengan pendekatan perspektif gender yang dapat diimplementasikan dalam Komunitas dimana terjadi praktek pernikahan dini anak perempuan, khususnya komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan dan program untuk mengurangi praktek pernikahan dini anak perempuan di Indonesia selama ini masih bersifat segmental tetapi belum menyentuh akar persoalan, yaitu nilai sosial budaya serta nilai-nilai ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terus berlangsung. Praktek pernikahan dini anak perempuan merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan bukan hanya menyangkut masalah hukum dan perundang-undangan. Praktek pernikahan dini anak hendaknya diatasi dengan menggunakan pendekatan yang bersifat holistik. Model Perlindungan dan Pencegahan Pernikahan dini Anak Perempuan yang berperspektif gender adalah pendekatan yang bersifat holistik yang menjamin terwujudnya kondisi kesetaraan dan keadilan gender. Model yang mengungkap akar persoalan praktek pernikahan dini anak perempuan ini secara berkesinambungan akan

berakibat pada berkurangnya praktek pernikahan dini anak perempuan, khususnya pada komunitas miskin. Model ini berupa Modul dan pedoman sosialisasi kebijakan dan perlindungan pencegahan pernikahan dini anak perempuan.

Kedua, berkaitan dengan kebutuhan akan ketersediaan data dasar yang valid dan rinci tentang profil aktor yang berperan, mekanisme reproduksi sosial dan wacana sosial dalam praktek pernikahan dini anak perempuan, khususnya dalam komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur. Selain itu berkaitan dengan kebutuhan data tentang relasi gender yang dapat mengungkap realitas ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam praktek pernikahan dini anak perempuan dalam komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur. Data tersebut sangat penting sebagai dasar masukan dalam perumusan kebijakan dan program serta peraturan yang membatasi praktek pernikahan dini anak perempuan di Indonesia.

3.3. Indikator Capaian Penelitian:

- 1) Model kebijakan dan perlindungan serta pencegahan praktek pernikahan dini anak perempuan, khususnya untuk komunitas miskin dengan pendekatan perspektif gender yang bersifat holistik.
- 2) Artikel/Makalah ilmiah berdasarkan hasil penelitian ini yang akan dipresentasikan dalam Seminar tingkat Internasional dan ditulis dalam Jurnal Internasional.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Secara rinci, prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk penelitian ini meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

a. *Persiapan Penelitian:*

Pemeriksaan terakhir terhadap proposal penelitian dan penyempurnaan dikaitkan dengan Road Map Penelitian Universitas Airlangga dan Implementasi Kebijakan ‘3Ends’ dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I., khususnya upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak .

Penentuan Lokasi Penelitian melanjutkan penelitian pada tahun pertama, yaitu di Kabupaten Sampang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Ponorogo, dimana di wilayah ini sampai dengan saat ini masih banyak ditemui praktek pernikahan dini anak perempuan yang dari kalangan komunitas miskin.

Pengurusan Ijin Penelitian, yaitu mempersiapkan dan menyampaikan surat yang dilampiri proposal penelitian kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini di tingkat Universitas sampai dengan Lokasi Penelitian.

b. *Persiapan Lapangan:*

Penyusunan Instrumen Penelitian, yaitu membuat kuesioner yang berisi pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban dan *Interview Guide* (Pedoman Wawancara) untuk Wawancara mendalam (*Indepth Interview*).

Melakukan pre-test instrumen penelitian (kuesioner) dan melakukan observasi pendahuluan di lokasi penelitian.

Revisi dan penyempurnaan instrumen penelitian dari hasil pre-test dan observasi pendahuluan. Menetapkan dan informan di masing-masing lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Sampang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Ponorogo.

Untuk keperluan penelitian ini, maka ditentukan;

- a) adalah para orang tua yang memiliki anak perempuan. Masing-masing ditentukan 100 orang di setiap lokasi penelitian, sehingga total 200 orang.
- b) Informan ditentukan masing-masing sejumlah 10 orang di setiap lokasi penelitian, terdiri dari para anak perempuan pelaku-korban pernikahan dini (menikah sebelum usia

18 tahun), para orang tua dari anak perempuan pelaku-korban pernikahan dini, dan para tokoh masyarakat dalam komunitas miskin di wilayah Kabupaten Sampang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Ponorogo sehingga total informan 30 orang.

c. Pengumpulan Data di Lapangan:

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diteliti (Sampang, Blitar dan Ponorogo), dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya dari Bapeprov dan Dinas Sosial, Kantor Wilayah Agama dan BPPKB.

Pengumpulan data primer tahap pertama dilakukan dengan mengadakan wawancara menggunakan kuesioner terhadap 300 orang tua yang memiliki anak perempuan (100 di masing-masing Kabupaten yang diteliti).

Pengumpulan data primer tahap kedua dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam (*indepth interview*) menggunakan pedoman wawancara terhadap 30 orang anak perempuan pelaku pernikahan dini, orang tua mereka serta tokoh masyarakat yang ditetapkan sebagai informan (10 orang informan di masing-masing Kabupaten yang diteliti).

d. Editing dan Pengolahan Data:

Data yang telah dikumpulkan dari kuesioner (300 kuesioner) diedit untuk memeriksa agar tidak ada jawaban yang tidak lengkap kemudian diolah dengan teknik kuantitatif, yaitu memberi kode pada pilihan jawaban, melakukan coding dan tabulasi.

Data yang telah dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan 30 informan diedit terlebih dahulu untuk memeriksa agar tidak ada data yang tercecer atau kurang, kemudian diolah dengan terlebih dahulu membuat transkrip dari seluruh hasil wawancara mendalam.

e. Analisis Data:

Data kuantitatif akan dianalisis dengan cara membuat tabel frekuensi dan tabel silang dengan perhitungan prosentase. Selanjutnya dilakukan analisis dan melihat pola-pola, kecenderungan, serta analisis teoretik.

Data kualitatif yang telah dibuatkan transkrip akan dianalisis dengan cara membuat kategorisasi data menggunakan teknik *'Analisis File'*, yaitu tipologi data berdasarkan

isu-isu yang diteliti. Selanjutnya dilakukan *'generalisasi empirik'* sehingga terumuskan poin-poin dan konsep-konsep teoretik sebagai hasil *logical induction* dari data empirik.

f. Penulisan Draft Laporan Penelitian:

Draft Laporan disusun dari hasil analisis teoretik data kuantitatif dan data kualitatif.

Draft laporan penelitian ditulis dengan mengikuti format laporan yang telah disusun pada tahap pengolahan data.

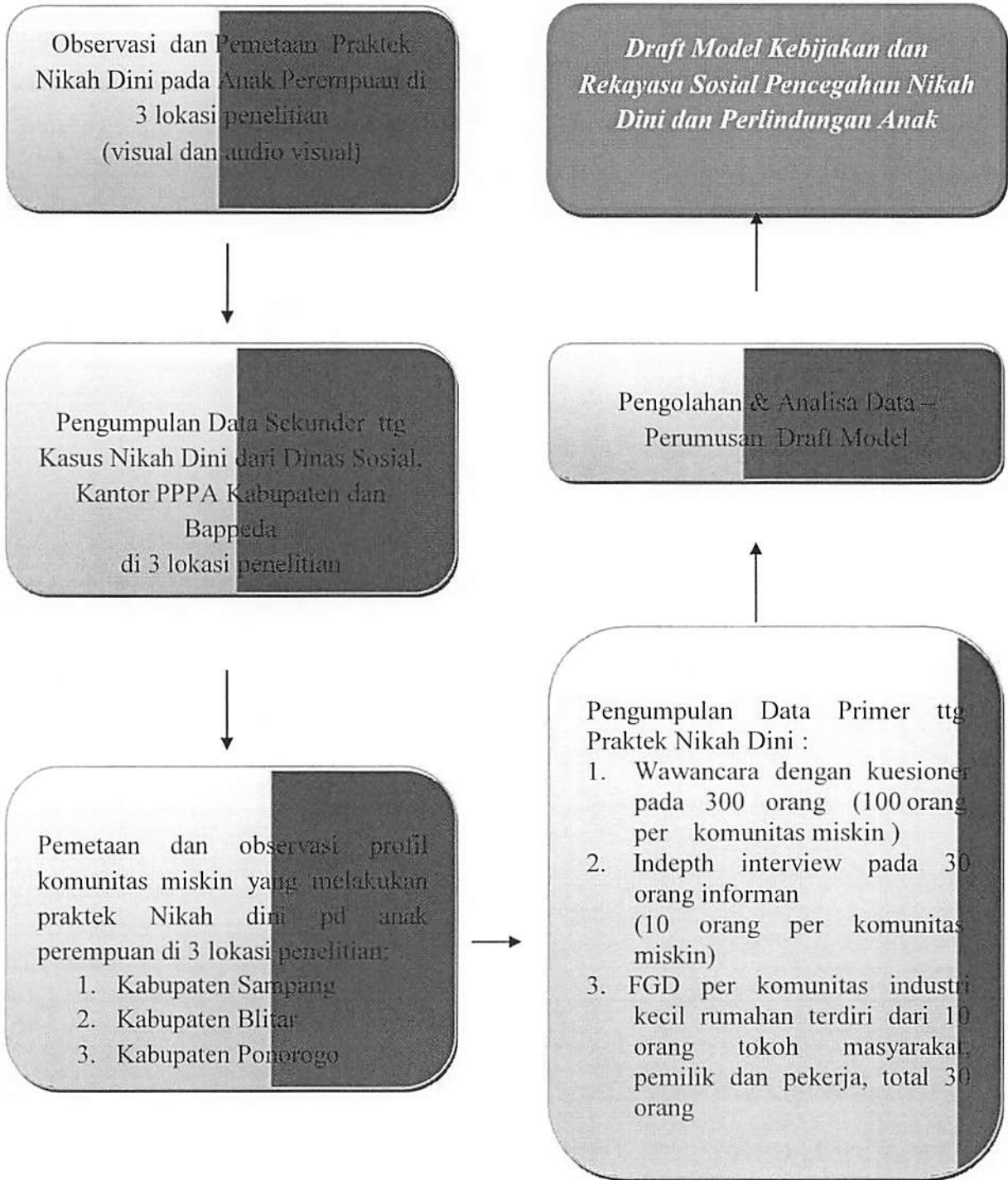
Analisis teoretik kemudian digunakan sebagai dasar untuk penyusunan luaran penelitian ini, yaitu: a) data profil anak perempuan yang menikah pada usia dibawah 18 tahun dan keluarganya; b) data peran para aktor dan relasi gender dalam praktek pernikahan dini anak perempuan; c) data mekanisme reproduksi sosial dan wacana sosial dalam praktek pernikahan dini anak perempuan; d) Model perlindungan dan pencegahan praktek pernikahan dini anak perempuan dengan pendekatan berperspektif gender.

g. Seminar dan Penulisan Laporan Penelitian Final:

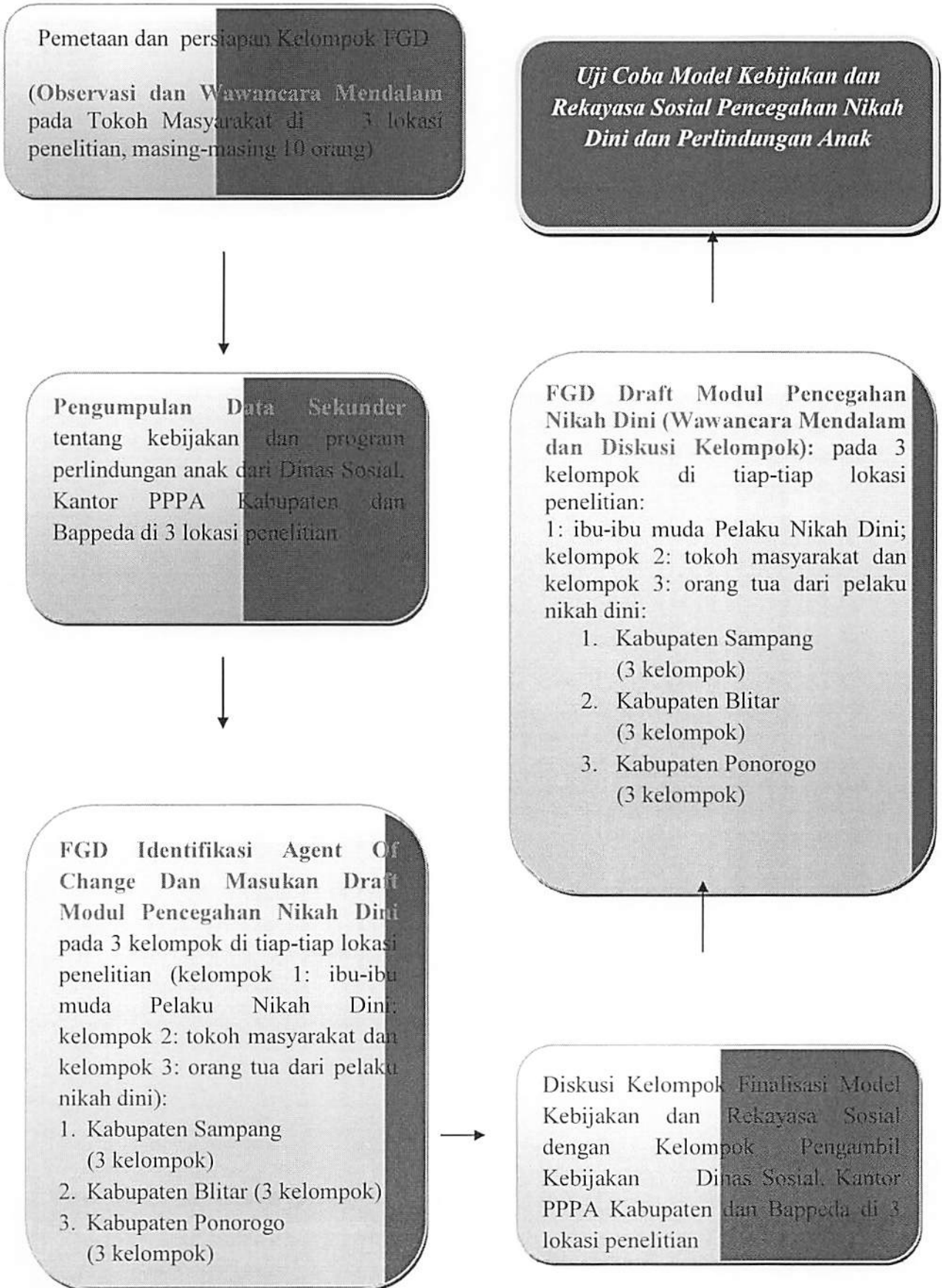
Draft laporan penelitian yang telah disusun dan ditulis kemudian di seminarkan di tingkat Universitas beserta Pemerintah Daerah serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Revisi Draft Laporan Penelitian berdasarkan masukan dalam seminar, kemudian menyusun Model Perlindungan dan Pencegahan Pernikahan Dini bagi Anak Perempuan dan menulis *'Policy Brief'* (naskah akademik) dan karya ilmiah yang akan dipresentasikan dalam Seminar Nasional.

Skema 4.1.
Alir Metode Penelitian Tahun Pertama



Skema 4.2.
Alir Penelitian Tahun Kedua



BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

5.1.1. Kabupaten Sampang (Desa Temoran, Kecamatan Omben)

Letak Geografi Kabupaten Sampang – Pulau Madura

Pulau Madura terletak pada ujung timur Provinsi Jawa Timur. Pulau Madura ini dipisahkan lautan dengan pulau jawa. Maka dari itu pulau Madura memiliki kebudayaan dan ciri karakter yang berbeda dengan pulau jawa. Ketinggian rata-rata tanah di Pulau Madura bervariasi. Tinggi rata-rata ibukota Kabupaten Bangkalan adalah 47 m di atas permukaan laut, sedangkan Kabupaten Sampang 15 m, Kabupaten Pamekasan 8 m, dan Kabupaten Sumenep 13 m (BPS Jawa Timur, 2014). Kecamatan Sepulu di Kabupaten Bangkalan merupakan daerah terendah dengan ketinggian ± 2 m di atas permukaan air laut, sedangkan daerah tertinggi adalah Kecamatan Pakong di Kabupaten Pamekasan dengan ketinggian ± 350 m di atas permukaan air laut. Batas Pulau Madura di sebelah utara dan timur adalah Laut Jawa, sedangkan di sebelah selatan dan barat adalah Selat Madura.

Penduduk Pulau Madura

Berdasarkan data BPS (2010), jumlah penduduk di wilayah Madura mencapai 3.620.063 orang. Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan dengan jumlah penduduk 905.151 orang. Kabupaten Sampang terdiri atas 14 kecamatan dengan jumlah penduduk 877.772 orang. Kabupaten Pamekasan terdiri atas 13 kecamatan dengan jumlah penduduk 794.864 orang. Kabupaten Sumenep terdiri atas 27 kecamatan dengan jumlah penduduk 1.042.276 orang. Sebagian besar penduduk Madura berasal dari etnik Madura, sedangkan sebagian kecilnya berasal dari etnik Jawa, Cina, dan lain-lain.

Gambaran Keadaan Sosial-Budaya di Pulau Madura

1. Penduduk

Keadaan pendidikan di Pulau Madura sudah cukup merata. Fasilitas pendidikan mulai tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, hingga perguruan tinggi sudah tersedia. Hampir semua anak usia sekolah sudah

mengenyam pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan untuk jenjang SMA/MA belum merata. Berikut disajikan tabel Angka Partisipasi Sekolah (APS). di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep pada tahun 2012 (BPS Jawa Timur, 2012). APS adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

2. Agama

Mayoritas penduduk Madura beragama Islam, meskipun tidak 100%. Sebanyak 99% masyarakat Madura memeluk agama Islam, sedangkan sisanya memeluk agama Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Meskipun tidak semua penduduk Madura beragama Islam, Islam sudah menjadi identitas dari kesukuan Madura. Hal ini dipicu oleh citra *‘masyarakat santri’* yang begitu kuat melekat pada suku Madura. Ikatan erat antara Madura dan Islam digambarkan Adib sebagai berikut.

Letak Geografi Kabupaten Sampang

Kabupaten Sampang terletak pada 113008' – 113039' Bujur Timur dan 06005'–07013' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.233,33 Km². Batas wilayah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan

Sebelah Selatan : Selat Madura

Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan

Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 1233,30 Km². Sebelum otonomi daerah, Kabupaten Sampang terdiri atas 12 Kecamatan. Namun sejak dikeluarkan Perda No. 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Pangarengan dan Perda No. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang terdiri dari 14 Kecamatan dengan 6 kelurahan (di Kecamatan Sampang) dan 180 desa. Terdapat satu pulau berpenghuni (14.004 orang dalam 3.638 KK) cukup padat (8.487 orang/Km² pada tahun 2002) di wilayah selatan, yakni Pulau Mandangin atau Pulau Kambing. Dari Pelabuhan Tanglok, jarak menuju pulau seluas 1,650 Km² adalah ± 1,5 jam menggunakan perahu.

Penduduk Kabupaten Sampang

Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Sampang secara keseluruhan umumnya tidak merata. Persebaran penduduk umumnya mengikuti dan cenderung berorientasi ke wilayah/ daerah yang memiliki aktivitas lebih ramai atau terdapat potensi sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, perdagangan dan jasa. Demikian juga dengan kepadatan penduduk, kepadatan penduduk cenderung terkonsentrasi atau lebih tinggi pada daerah perkotaan karena daerah tersebut merupakan pusat aktivitas menarik penduduk untuk beraktivitas dan bertempat tinggal. Jumlah penduduk Kabupaten Sampang pada tahun 2011 sebanyak 871.534 orang dengan angka kepadatan penduduk sebesar 706,67 Orang/Km².

Ketenaga Kerjaan Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sampang pada tahun 2011 sebanyak 493.324 orang, sedangkan yang mendaftarkan diri sebagai Pencari Kerja (AK I) di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 2.707 orang. Jumlah tenaga kerja Kabupaten Sampang berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2011 didominasi oleh angkatan kerja tamat SLTA, yakni sebanyak 440 orang, kemudiandiikuti oleh angkatan kerja tamat D-III dengan 454 orang. Jumlah angkatan kerja tamat S-II mempunyai jumlah tenaga kerja terendah yakni hanya sebanyak 8 orang. Jumlah lowongan kerja di Kabupaten Sampang yang ada tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, tercatat pada tahun 2011 tidak ada lowongan kerja, sedangkan jumlah pencari kerja yang ada adalah sebanyak 4.268 orang.

Dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS-08), untuk mengetahui intensitas kemiskinan dari Rumah Tangga Sasaran (RTS), rumah tangga miskin dibedakan dalam 3 kategori, yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM), dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM).. Data kemiskinan di setiap kecamatan di Kabupaten Sampang dapat dilihat pada lampiran tabel 2.9 Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kecamatan Tahun 2010

Tabel 5.1. Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan Tahun 2010

NO	KECAMATAN	RUMAH TANGGA			JUMLAH
		SANGAT MISKIN	MISKIN	HAMPIR MISKIN	
1	SRESEH	367	1.307	2.936	4.610
2	TORJUN	418	1.602	1.982	4.002
3	PANGARENGAN	1.391	2.658	2.000	6.049
4	SAMPANG	1.662	3.389	1.822	6.873
5	CAMPLONG	909	2.693	2.280	5.882
6	OMBEN	1.435	3.662	3.245	8.342
7	KEDUNDUNG	766	2.480	2.905	6.151
8	JRENGIK	832	2.403	3.118	6.353
9	TAMBELANGAN	792	2.293	1.665	4.750
10	BANYUATES	540	1.437	1.928	3.905
11	ROBATAL	656	1.962	1.993	4.611
12	KARANG PENANG	540	1.819	2.065	4.424
13	KETAPANG	704	2.064	1.559	4.327
14	SAKOBANAH	1.469	2.429	708	4.606
JUMLAH		14.416	39.924	40.221	94.561

Sumber : Data Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2008 Keadaan 30 Oktober 2010

5.1.2. Kabupaten Blitar (Desa Purworejo, Kecamatan Wates)

Secara geografis Desa Purworejo terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 274 m di atas permukaan air laut. Jarak tempuh Desa Purworejo ke ibukota kecamatan adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 15 menit sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten adalah 24 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit.

Berdasarkan data Administrasi Desa tahun 2015, jumlah penduduk Desa Purworejo adalah terdiri adalah 1836 Kartu Keluarga (KK), dengan jumlah total 5.335 orang dengan rincian 2.738 laki-laki dan 2.797 perempuan. Tingkat kemiskinan di Desa Purworejo termasuk tinggi. Dari jumlah keseluruhan KK yaitu 1.836 KK, sejumlah 447 tercatat sebagai Pra Sejahtera, 315 KK tercatat sebagai KK Sejahtera I, 384 tercatat sebagai KK Sejahtera II, 98 KK tercatat sebagai KK Sejahtera III, dan 12 KK tercatat sebagai KK Sejahtera plus. Jika golongan KK Sejahtera dan KK golongan I digolongkan golongan miskin maka sekitar 60,66 % KK Desa Purworejo adalah Keluarga Miskin. Tingkat pendapatan

rata-rata penduduk Desa Purworejo adalah Rp750.000,- /bulan. Mata pencaharian penduduk Desa Purworejo didominasi oleh petani yaitu sejumlah 1.1916 orang.

Untuk mengetahui jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Blitar, maka berikut ini terdapat data jumlah rumah tangga miskin menurut kecamatan pada tahun 2010 dan jumlah rumah tangga miskin yang terbagi atas Pra S dan KS I.

Tabel 5.2. Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah KK (jiwa)	Jumlah Jiwa	Jumlah Keluarga Miskin (jiwa)		
				Pra S	KS I	Total
1	Bakung	6,446	16,643	5,126	1,320	6,446
2	Sutojayan	6,056	18,267	4,551	1,505	6,056
3	Panggungrejo	3,692	11,759	1,241	2,451	3,692
4	Wates	10,415	32,425	3,224	7,191	10,415
5	Binangun	7,129	22,278	3,161	3,968	7,129
6	Kesamben	11,010	33,044	5,738	5,272	11,010
7	Doko	7,474	24,593	2,565	4,909	7,474
8	Wlingi	6,927	23,650	3,694	3,233	6,927
9	Talun	9,771	31,264	2,665	7,106	9,771
10	Kanigoro	7,711	22,937	4,424	3,287	7,711
11	Kademangan	12,504	39,673	3,487	9,017	12,504
12	Sanankulon	6,136	19,350	2,671	3,465	6,136
13	Srengat	6,061	18,961	1,250	4,811	6,061
14	Udanawu	6,459	21,833	2,156	4,303	6,459
15	Ponggok	6,311	19,449	2,741	3,570	6,311
16	Nglegok	6,034	14,276	2,323	3,711	6,034
17	Garum	8,957	28,276	3,013	5,944	8,957
18	Gandusari	4,467	14,552	2,500	1,967	4,467
19	Wonodadi	4,109	12,800	2,155	1,954	4,109
20	Wonotirto	6,270	19,422	2,735	3,535	6,270
21	Selorejo	3,884	12,184	1,171	2,713	3,884
22	Selopuro	7,056	20,407	4,034	3,022	7,056
	Jumlah	154,879	478,043	66,625	88,254	154,879

Keterangan :

Pra S : Kategori Keluarga Sangat Miskin

KS I : Kategori Keluarga Miskin

Sumber : Kumpulan SLHD Kabupaten Blitar Tahun 2010 Berdasarkan Data Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar

Dari tabel diatas menyebutkan bahwa Kecamatan Wates merupakan salah satu dari tiga (3) Kecamatan yang paling miskin di Kabupaten Blitar setelah Kecamatan Kademangan (12.504 penduduk miskin) dan Kecamatan Kesamben (11.010 penduduk miskin).

5.1.3. Kabupaten Ponorogo (Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon)

KONDISI GEOGRAFIS

Secara geografis Desa Sidoharjo terletak pada ketinggian 325 Meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 28⁰C. Luas wilayah Desa Sidoharjo adalah 12,19 km². Desa Sidoharjo memiliki 3 Dukuh yang terbagi dalam 31 Rukun Tetangga (RT), yaitu :

1) Dukuh Karang Sengon; 10 RT

2) Dukuh Klitik; 8 RT

3) Dukuh Sidowayah; 13 RT

Batas-batas Desa Sidoharjo:

Sebelah Utara : Desa Krebet Kecamatan Jambon dan Desa Tanjung Rejo Kecamatan Badegan;

Sebelah Selatan : Desa Karang Patihan Kecamatan Balong;

Sebelah Barat : Desa Tanjung Rejo Kecamatan Badegan dan Desa Watu Patok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;

Sebelah Timur : Desa Krebet dan Desa Jonggol Kecamatan Jambon.

GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	3,168 Orang
2.	Perempuan	3.189Orang
3.	Kepala Keluarga	1.568 Orang

b) Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia :

No.	Usia	Jumlah
1.	0-12 Bulan	43 Orang
2.	1-5 Tahun	251 Orang
3.	6-15 Tahun	654Orang
4.	16-25 Tahun	869 Orang
5.	26-45 Tahun	1.636 Orang
6.	46-59 Tahun	1457 Orang
7.	60 Tahun ke atas	1442 Orang
JUMLAH		5.257 Orang

c) Pertumbuhan Penduduk

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah Penduduk Tahun Ini	6.357 Orang
2.	Jumlah Penduduk Tahun Lalu	6.557Orang

d) Struktur Mata Pencarian Penduduk :

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Petani	2.811 Orang
2.	Pekerja Buruh	710 Orang
3.	Pedagang	43 Orang
4.	PNS / ABRI / POLRI	7 orang
5.	Karyawan swasta	208 orang
6.	Wiraswasta	570 orang
7.	IRT	278 orang
8	Pelajar	752
9.	Tidak bekerja	917
10.	Pengangguran	61

e) Tingkat Pendidikan Formal

No.	Keterangan	Uraian
1.	Jumlah angkatan kerja tidak tamat SD/Sederajat	2.757 Orang
2.	Jumlah angkatan kerja tamat SD/Sederajat	1.962Orang
3.	Jumlah angkatan kerja tamat SLTP/Sederajat	1.252Orang
4.	Jumlah angkatan kerja tamat SLTA/Sederajat	366 Orang
5.	Jumlah angkatan kerja tamat Perguruan Tinggi	20 Orang

KONDISI EKONOMI

a. *Potensi unggulan desa*

Lahan pertanian yang cukup luas dan besarnya jumlah Petani dan Buruh Tani dengan semangat kebersamaan dan gotong-royong yang tinggi merupakan potensi terbaik untuk meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat. Komoditas unggulan yang dihasilkan antara lain kayu jati, jeruk, pepaya, padi, jagung, singkong, kedelai, jeruk, aneka sayur- sayuran, kambing dan sapi. Potensi pertanian tersebut ditunjang pula dengan adanya kelompok-kelompok tani dan koperasi gabungan kelompok tani.

b. *Pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu 1 tahun*

No.	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Jumlah penduduk usia 15 – 59 tahun yang belum bekerja	187 Orang	61 Orang
2.	Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 – 59 tahun	3.575 Orang	3.962Orang
3.	Rumah Tangga Miskin	664 KK	664 KK

Kawin anak juga terjadi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Bukan hanya kawin anak yang dilakukan oleh masyarakat setempat, melainkan juga kawin dengan saudara sendiri. Perkawinan dengan saudara ini paling banyak dilakukan jaman dulu, sekarang sudah jarang dilakukan. Perkawinan sedarah ini dilakukan supaya tidak memutus tali persaudaraan. Usia menikah anak perempuannya rentang 11-15 tahun.

Kondisi daerah di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo yakni tanahnya tandus dan kering. Hal ini menjadi salah satu penyebab hasil pertanian mereka

sering gagal. Tapi itu tetap menjadi mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tanah dan mata pencaharian yang masih dipertahankan berdasarkan kondisi sekitarnya menyebabkan hal ini menjadi pendukung faktor kemiskinan yang ada di wilayah tersebut.

Kondisi kemiskinan yang diterima oleh masyarakat mempengaruhi keseharian mereka yang berkaitan dengan pendidikan dan budaya kawin anak. Masyarakat memiliki ketidakmampuan untuk menyekolahkan karena kebutuhan keluarga lebih banyak. Sebagian besar masyarakat hanya tamatan SD bahkan juga banyak yang tidak sekolah. Kondisi kemiskinan seperti ini membuat masyarakat ini disebut sebagai wilayah yang miskin dan juga terbelakang. Miskin karena asyarakat cenderung memiliki sifat pesimis dan sulit untuk diajak berubah. Terbelakang karena Desa Sidoharjo ini merupakan kampung idiot yang sudah dikenal di Kabupaten Ponorogo bahkan Indonesia.

Aparat desa setempat pun mengatakan rasa pesimisnya terhadap warga yang ada di lokasi tersebut. Dimana masyarakat susah untuk diajak keluar dari jurang kemiskinan yang ada. Mereka lebih percaya dengan hasil tanaman yang mereka tanam daripada harus bekerja ke luar daerah tersebut. Petani dan pedagang menjadi mata pencaharian utama yang dapat dilakukan mereka. mereka makan dari hasil tanamnya sendiri, dan menjual hasil panen yang ada. Kemiskinan dan idiot yang mereka tanggung menjadikan mereka juga merasa kurang mampu untuk bersaing dengan dunia luar. Rasa pesimis ini dikarenakan label -Kampung Idiotll yang sudah terkenal di masyarakat luas.

Menikah menjadi pilihan terakhir dan dianggap satu-satunya ketika mereka tidak mampu lagi bersekolah. Hal ini terjadi baik pada laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan, ketika mereka sudah tidak bersekolah maka mereka akan dinikahkan oleh orang tuanya. Masyarakat yang menikah pun dari warga desa setempat sendiri. Jadi kondisi kesehatan mereka pun tidak mendapat imun dari warga luar yang gen-nya tidak idiot.

Di balik fenomena kawin anak, ada banyak fakta terungkap yang menyebabkan kawin anak terus berlanjut. Utamanya mereka (perempuan) yang mengalami keterbelakangan, mereka juga menjadi korban perkosaan. Mereka yang tiba-tiba diketahui hamil, karena tidak dapat menceritakan kejadian secara jelas maka mereka dinikahkan begitu saja. Seiring berjalannya waktu, untuk di jaman sekarang, fenomena kawin anak sudah tidak banyak dilakukan seperti jaman dulu. Beban ekonomi menjadi salah satu alasan.

Hubungan masyarakat yang pernikahannya masih satu desa membuat mereka tinggal tidak jauh dari orang tuanya. Sebagian besar mereka tinggal dengan orang tuanya, karena

dengan hidup dengan orang tuanya beban bisa dipukul rata. Kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan untuk rumah dapat ditanggung bersama.

5.2. Karakteristik Sosial Ekonomi Keluarga dalam Praktik Pernikahan Dini pada Komunitas Miskin di Provinsi Jawa Timur

5.2.1. Karakteristik Sosial Ekonomi Isteri dan Suami dalam Praktik Pernikahan Dini di Kabupaten Sampang

Usia Responden

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kurang dari sama dengan 20	8	8,0
2.	21-25	26	26,0
3.	26-30	16	16,0
4.	31-35	5	5,0
5.	36-40	17	17,0
6.	41-45	9	9,0
7.	46-50	11	11,0
	Total	100	100

Pekerjaan Pokok Isteri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ibu Rumah Tangga	51	51,0
2.	Petani	18	18,0
3.	Pedagang	11	11,0
4.	Buruh (Tani, Masak, Panggul)	9	9,0
5.	Guru/Dosen	1	1,0
6.	Pegawai Swasta	4	4,0
7.	Lainnya	6	6,0
	Total	100	100,0

Pendapatan Isteri Per Bulan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kurang dari sama dengan Rp 500.000,-	26	53,1
2.	Rp 500.001,- sampai Rp 1.000.000,-	11	22,4
3.	Rp 1.000.001,- sampai Rp 1.500.000,-	7	14,3
4.	Rp 1.500.001 sampai Rp 2.000.000,-	3	6,1
5.	Lebih dari sama dengan Rp 2.000.001,-	2	4,1
	Total	100	100,0

Kepemilikan dan jenis Pekerjaan Sampingan Isteri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Memiliki	98	98,0
2.	Memiliki (usaha sendiri)	2	2,0
	Total	100	100,0

Pendapatan Pekerjaan Sampingan Isteri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kurang dari sama dengan Rp 500.000,-	2	100,0
	Total	2	100,0

Alasan Isteri Memiliki Pekerjaan Sampingan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kebutuhan Anak Meningkatkan	1	50,0
2.	Kebutuhan Ekonomi Meningkatkan	1	50,0
	Total	2	100,0

Pendidikan Terakhir Perempuan / Isteri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah Bersekolah	4	4,0
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	7	7,0
3.	Tamat SD/Sederajat	34	34,0
4.	Tidak Tamat SMP/Sederajat	6	6,0
5.	Tamat SMP/Sederajat	32	32,0
6.	Tidak Tamat SMA/SMK/Sederajat	7	7,0
7.	Tamat SMA/SMK/Sederajat	10	10,0
	Total	100	100,0

Usia Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	21-25	17	17,0
2.	26-30	22	22,0
3.	31-35	15	15,0
4.	36-40	6	6,0
5.	41-45	15	15,0
6.	46-50	7	7,0
7.	Lebih dari sama dengan 51	18	18,0
	Total	100	100,0

Pekerjaan Pokok Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Petani	40	40,0
2.	Pedagang	32	32,0
3.	Buruh (Tani, Panggul)	5	5,0
4.	Guru/Dosen	1	1,0
5.	Pegawai Swasta	15	15,0
6.	Lainnya	7	7,0
	Total	100	100,0

Pendapatan Suami Per Bulan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kurang dari sama dengan Rp 500.000,-	32	32,0
2.	Rp 500.001,- sampai Rp 1.000.000,-	17	17,0
3.	Rp 1.000.001,- sampai Rp 1.500.000,-	34	34,0
4.	Rp 1.500.001 sampai Rp 2.000.000,-	14	14,0
5.	Lebih dari sama dengan Rp 2.000.000,-	3	3,0
	Total	100	100,0

Kepemilikan Pekerjaan Sampingan Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Memiliki	84	84,0
2.	Memiliki	16	16,0
	Total	100	100,0

Jenis Pekerjaan Sampingan Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Petani	1	6,3
2.	Pedagang	1	6,3
3.	Buruh	4	25,0
4.	Usaha Sendiri	4	25,0
5.	Lainnya	6	37,6
	Total	16	100,0

Pendapatan Pekerjaan Sampingan Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kurang dari sama dengan Rp 500.000,-	13	81,3
2.	Rp 500.001,- sampai Rp 1.000.000,-	3	18,8
	Total	16	100,0

Pendidikan Terakhir Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah Bersekolah	9	9,0
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	4	4,0
3.	Tamat SD/Sederajat	21	21,0
4.	Tidak Tamat SMP/Sederajat	5	5,0
5.	Tamat SMP/Sederajat	29	29,0
6.	Tidak Tamat SMA/SMK/Sederajat	5	5,0
7.	Tamat SMA/SMK/Sederajat	26	26,0
8.	D1/D2/D3/D4	1	1,0
	Total	100	100,0

Jumlah Anak

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Belum Memiliki Anak	31	31,0
2.	1 orang	29	29,0
3.	2 orang	15	15,0
4.	3 orang	25	25,0
	Total	100	100,0

5.2.2. Karakteristik Sosial Ekonomi Isteri dan Suami dalam Praktik Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar**Usia Responden**

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kurang dari sama dengan 20 tahun	2	2.0
2.	21-25 tahun	22	22.0
3.	26-30 tahun	18	18.0
4.	31-35 tahun	23	23.0
5.	36-40 tahun	6	6.0
6.	41-45 tahun	3	3.0
7.	46-50 tahun	12	12.0
8.	Lebih dari sama dengan 51 tahun	14	14.0
	Total	100	100.0

Pekerjaan Pokok Isteri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ibu Rumah Tangga	61	61.0
2.	Petani	24	24.0
3.	Pedagang	4	4.0
4.	Buruh (Tani, Masak, Panggul, Pabrik)	2	2.0
5.	Guru/Dosen	1	1.0
6.	Pegawai Swasta	3	3.0
7.	Lainnya	5	5.0
	Total	100	100.0

Pendapatan Pokok Isteri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kurang dari sama dengan Rp 500.000,-	6	15.4
2.	Rp 500.001,- sampai Rp 1.000.000,-	21	53.8
3.	Rp 1.000.001,- sampai Rp 1.500.000,-	7	17.9
4.	Rp 1.500.001,- sampai Rp 2.000.000,-	5	12.8
	Total	39	100.0

Kepemilikan Pekerjaan Sampingan Isteri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Memiliki	92	92.0
2.	Iya, Memiliki	8	8.0
	Total	100	100.0

Jenis Pekerjaan Sampingan Isteri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Buruh (Tani, Masak, Panggul)	2	33.3
2.	Usaha Sendiri	1	16.7
3.	Lainnya	3	50.0
	Total	6	100.0

Pendapatan dari Pekerjaan Sampingan Isteri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kurang dari sama dengan Rp 500.000,-	3	50.0
2.	Rp 500.001,- sampai Rp 1.000.000,-	2	33.3
3.	Rp 1.000.001,- sampai Rp 1.500.000,-	1	16.7
	Total	6	100.0

Alasan Isteri Memiliki Pekerjaan Sampingan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Membantu Menambah Penghasilan Suami/Keluarga	6	100.0
	Total	6	100.0

Pendidikan Terakhir Isteri / Perempuan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah Bersekolah	4	4.0
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	8	8.0
3.	Tamat SD/Sederajat	19	19.0
4.	Tidak Tamat SMP/Sederajat	8	8.0
5.	Tamat SMP/Sederajat	42	42.0
6.	Tidak Tamat SMA/SMK//Sederajat	2	2.0
7.	Tamat SMA/SMK/Sederajat	16	16.0
8.	S1/S2/S3	1	1.0
	Total	100	100.0

Usia Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kurang dari sama dengan 20 tahun	3	3.0
2.	21-25 tahun	6	6.0
3.	26-30 tahun	20	20.0
4.	31-35 tahun	14	14.0
5.	36-40 tahun	16	16.0
6.	41-45 tahun	14	14.0
7.	46-50 tahun	7	7.0
8.	Lebih dari sama dengan 51 tahun	20	20.0
	Total	100	100.0

Pekerjaan Pokok Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Petani	65	65.0
2.	Pedagang	12	12.0
3.	Buruh (Tani, Panggul, Pabrik)	2	2.0
4.	Pegawai Negeri Sipil	7	7.0
5.	Pegawai Swasta	13	13.0
6.	Lainnya	1	1.0
	Total	100	100.0

Pendapatan Pokok Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kurang dari sama dengan Rp 500.000,-	14	14.0
2.	Rp 500.001,- sampai Rp 1.000.000,-	35	35.0
3.	Rp 1.000.001,- sampai Rp 1.500.000,-	34	34.0
4.	Rp 1.500.001,- sampai Rp 2.000.000,-	16	16.0
5.	Lebih dari sama dengan Rp 2.000.001,-	1	1.0
	Total	100	100.0

Kepemilikan Pekerjaan Sampingan Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Memiliki	95	95.0
2.	Iya, Memiliki	5	5.0
	Total	100	100.0

Jenis Pekerjaan Sampingan Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Pedagang	1	20.0
2.	Buruh (Tani, Panggul, Pabrik)	3	60.0
3.	Lainnya	1	20.0
	Total	5	100.0

Pendapatan Pekerjaan Sampingan Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kurang dari sama dengan Rp 500.000,-	1	20.0
2.	Rp 500.001,- sampai Rp 1.000.000,-	3	60.0
3.	Rp 1.000.001,- sampai Rp 1.500.000,-	1	20.0
	Total	5	100.0

Pendidikan Terakhir Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah Bersekolah	8	8.0
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	6	6.0
3.	Tamat SD/Sederajat	20	20.0
4.	Tidak Tamat SMP/Sederajat	10	10.0
5.	Tamat SMP/Sederajat	40	40.0
6.	Tidak Tamat SMA/SMK/Sederajat	11	11.0
7.	Tamat SMA/SMK/Sederajat	4	4.0
8.	D1/D2/D3/D4	1	1.0
	Total	100	100.0

Jumlah Anak yang Dimiliki

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	1 orang	28	28.0
2.	2 orang	32	32.0
3.	3 orang	12	12.0
4.	Lebih dari sama dengan 4 orang	28	28.0
	Total	100	100.0

5.2.3. Karakteristik Sosial Ekonomi Isteri dan Suami dalam Praktik Pernikahan Dini Anak Perempuan di Kabupaten Ponorogo

Pekerjaan Pokok Isteri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ibu Rumah Tangga	37	37.0
2.	Petani	41	41.0
3.	Pedagang	15	15.0
4.	Buruh (Tani, Masak, Panggul, Pabrik)	4	4.0
5.	Guru/Dosen	3	3.0
	Total	100	100.0

Pendapatan Pokok Isteri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Rp 500.000,-	13	13.0
2.	Rp 500.001,- sampai Rp 1.000.000,-	49	49.0
3.	Rp 1.000.001,- sampai Rp 1.500.000,-	1	1.0
	Total	63	63.0

Kepemilikan Pekerjaan Sampingan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Memiliki	91	91.0
2.	Iya, Memiliki	9	9.0
	Total	100	100.0

Jenis Pekerjaan Sampingan Isteri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Pedagang	4	44.4
2.	Buruh (Tani, Masak, Panggul)	2	22.2
3.	Usaha Sendiri	3	33.3
	Total	9	100.0

Pendapatan dari Pekerjaan Sampingan Istri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Rp 500.000,-	8	88.9
2.	Rp 500.001,- sampai Rp 1.000.000,-	1	11.1
	Total	9	100.0

Alasan Istri Memiliki Pekerjaan Sampingan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Terlilit Hutang	2	22.2
2.	Kebutuhan Anak Meningkat	2	22.2
3.	Kebutuhan Ekonomi Meningkat	5	55.6
	Total	9	100.0

Pendidikan Terakhir Perempuan / Istri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah Bersekolah	6	6.0
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	22	22.0
3.	Tamat SD/Sederajat	26	26.0
4.	Tidak Tamat SMP/Sederajat	15	15.0
5.	Tamat SMP/Sederajat	26	26.0
6.	Tidak Tamat SMA/SMK//Sederajat	3	3.0
7.	Tamat SMA/SMK/Sederajat	2	2.0
	Total	100	100.0

Usia Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	26-30 tahun	6	6.0
2.	31-35 tahun	13	13.0
3.	36-40 tahun	13	13.0
4.	41-45 tahun	12	12.0
5.	46-50 tahun	26	26.0
6.	51 tahun	30	30.0
	Total	100	100.0

Pekerjaan Pokok Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Petani	55	55.0
2.	Pedagang	7	7.0
3.	Buruh (Tani, Punggul, Pabrik)	17	17.0
4.	Guru/Dosen	4	4.0
5.	Lainnya	17	17.0
	Total	100	100.0

Pendapatan Pokok Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Rp 500.000,-	13	13.0
2.	Rp 500.001,- sampai Rp 1.000.000,-	68	68.0
3.	Rp 1.000.001,- sampai Rp 1.500.000,-	16	16.0
4.	Rp 1.500.001,- sampai Rp 2.000.000,-	3	3.0
	Total	100	100.0

Kepemilikan Pekerjaan Sampingan Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Memiliki	93	93.0
2.	Iya, Memiliki	7	7.0
	Total	100	100.0

Jenis Pekerjaan Sampingan Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Petani	4	57.1
2.	Usaha Sendiri	2	28.6
3.	Lainnya	1	14.3
	Total	7	100.0

Pendapatan Pekerjaan Sampingan Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Rp 500.000,-	6	85.7
2.	Rp 500.001,- sampai Rp 1.000.000,-	1	14.3
	Total	7	100.0

Pendidikan Terakhir Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah Bersekolah	6	6.0
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	11	11.0
3.	Tamat SD/Sederajat	24	24.0
4.	Tidak Tamat SMP/Sederajat	11	11.0
5.	Tamat SMP/Sederajat	28	28.0
6.	Tidak Tamat SMA/SMK/Sederajat	13	13.0
7.	Tamat SMA/SMK/Sederajat	5	5.0
8.	D1/D2/D3/D4	2	2.0
	Total	100	100.0

Jumlah Anak yang Dimili

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	1 orang	5	5.0
2.	2 orang	30	30.0
3.	3 orang	40	40.0
4.	4 orang	25	25.0
	Total	100	100.0

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi sosial bagi perempuan yang menikah pada usia dini sangat kompleks. Anak perempuan-anak perempuan di bawah umur sebagai istri muda tidak memiliki posisi tawar untuk membuat keputusan tentang berbagai aspek kehidupan mereka. Relasi kuasa dalam rumah tangga tidak sama karena kuasa ada di tangan suami. Selain itu, mertua orang tua juga penting dalam menentukan kehidupan keluarga karena mereka mengontrol akses ke dunia luar. Dibandingkan wanita yang menikah pada usia dewasa, anak perempuan di bawah umur memiliki kontrol yang lebih lemah pada sumber daya rumah tangga, pembatasan waktu dan akses ke informasi dan layanan kesehatan, termasuk kesehatan mental, kepercayaan diri, dan harga diri. Praktek pernikahan dini untuk anak perempuan di bawah umur di kalangan keluarga miskin dianggap mengurangi beban ekonomi keluarga. Beberapa wanita yang menikah di bawah 18 tahun mengungkapkan bahwa keluarga mereka tidak mampu mengirim mereka ke sekolah. Data berikut menunjukkan bahwa anak perempuan menikah pada usia yang sangat muda. Baik di Ponorogo dan Blitar, anak perempuan menikah pada usia anak-anak atau remaja muda (di bawah 16 tahun). Sebagian besar dari mereka bahkan menikah pada usia 14 tahun ke bawah.

Hal ini dapat dilihat dari data bahwa anak perempuan yang menikah di bawah usia 16 tahun sangat umum dan sering dianggap sebagai tradisi. Orang tua akan menikahkan anak perempuan mereka tepat setelah menstruasi pertama atau lulus dari sekolah dasar. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa pernikahan usia dini cenderung tidak harmonis. Terbukti bahwa semakin muda anak perempuan-anak perempuan menikah, semakin besar risiko perceraian (Gemignani, R. dan Q. Wodon 2015). Penelitian ini menunjukkan bahwa sejak anak perempuan-anak perempuan menikah, mereka keluar dari sekolah sehingga mereka benar-benar menderita kehilangan hak sebagai anak-anak. Tabel berikut menunjukkan bahwa pendidikan tertinggi dari kebanyakan anak perempuan yang menikah pada usia dini hanya sekolah dasar, beberapa bahkan tidak menyelesaikan sekolah dasar (66%). Setelah menikah, mereka tidak memiliki otonomi dalam memutuskan apakah mereka harus melanjutkan atau kembali ke sekolah. Akibatnya, kemampuan mereka dalam membaca dan menghitung sangat terbatas.

Pernikahan dini membuat anak perempuan di bawah umur dibebani dengan kewajiban domestik dan ini membuat mereka ragu-ragu untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap pelanggaran hak anak-anak perempuan sebagai anak-anak karena mereka tidak lagi dikategorikan sebagai anak-anak. Dengan demikian, anak perempuan-anak perempuan yang menikah di bawah umur berpotensi menjadi lebih buruk setelah menikah karena mereka terikat di dalamnya dan tugas-tugas domestik dan tidak dapat bersekolah.

Dari data penelitian, diperoleh bahwa mayoritas anak perempuan setelah menikah terus bekerja dan gaji mereka relatif kecil. Sebagian besar pendapatan mereka di bawah 900 ribu rupiah. Sementara

itu, pengeluaran rata-rata kebutuhan pokok yang dikelola oleh istri di bawah 1 juta rupiah / bulan. Singkatnya, uang yang dikelola oleh para istri per bulan kurang lebih sama dengan pendapatannya. Ini berarti bahwa mayoritas perempuan, yang menikah pada usia dini, hanya memiliki otonomi atas penghasilan mereka sendiri. Dengan demikian, pernikahan dini anak perempuan di bawah umur tidak dapat berkontribusi pada ekonomi keluarga besar mereka.

Kenyataannya, orang tua masih berkontribusi secara ekonomi kepada keluarga anak perempuan-anak perempuan di bawah umur mereka dalam bentuk komoditas makanan pokok dan uang tunai. Sayangnya, orang-orang di komunitas miskin melabeli anak perempuan-anak perempuan muda yang belum menikah sebagai perawan tua dan sejenisnya. Selain itu, banyak orang tua berharap bahwa dengan menikahi anak perempuan-anak perempuan mereka pada usia dini akan membantu pendapatan rumah tangga. Padahal, pernikahan dini sesungguhnya membebani ekonomi keluarga.

Data menunjukkan bahwa penghasilan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak. Bahkan ada suami yang tidak bekerja, terutama di Ponorogo. Para suami biasanya bekerja di pekerjaan berpenghasilan rendah seperti petani, pekerja konstruksi, pedagang, pengemudi, tukang ojek, dan pekerja migran.

Dari pendekatan kemiskinan internal, penelitian ini menemukan bahwa orang-orang di komunitas miskin tidak memiliki sumber daya yang cukup (kurang keterampilan dan pendidikan). Dalam hal pendekatan kemiskinan eksternal, diperoleh bahwa masyarakat mengalami kemiskinan selama beberapa generasi. Studi ini juga menunjukkan tidak adanya kebijakan khusus yang memberikan peluang bagi masyarakat miskin. Seperti yang ditunjukkan dalam studi sebelumnya yang terkait dengan kehidupan budaya di masyarakat miskin (Chambers, Robert: 1987), menikahi anak perempuan-anak perempuan di usia muda, di bawah usia 18 tahun, dianggap mengurangi beban ekonomi bagi keluarga besar.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa anak perempuan di bawah umur secara psikologis dan belum siap untuk menjadi ibu. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk merawat anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka tidak diurus dengan benar. Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah pernikahan dini di Indonesia, terutama di masyarakat miskin, tetapi pernikahan anak di provinsi Jawa Timur tetap umum. Dalam banyak kasus, terbukti bahwa pernikahan dini menyebabkan lebih banyak bahaya dan penderitaan, terutama bagi anak perempuan.

Data menunjukkan bahwa pasangan pengantin dini masih berhutang budi kepada orang tua dan saudara laki-lakinya setelah menikah. Utang tersebut berupa kebutuhan pokok dan makanan olahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, alasan untuk menikahi anak

perempuan-anak perempuan pada usia dini dengan tujuan membantu ekonomi keluarga tidak terjadi. Data yang diperoleh menunjukkan sebaliknya, bahwa anak perempuan-anak perempuan setelah menikah masih bergantung secara ekonomi pada orang tua dan saudara kandung mereka.

Bagi anak perempuan di bawah umur, pernikahan dini menghentikan pendidikan formal mereka yang berarti mereka tidak dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan dan keterampilan yang berguna yang memungkinkan mereka untuk menjadi produktif. Mereka juga kehilangan jaringan sosial dan dukungan sosial. Para remaja memiliki hak pilihan ketika mereka dapat memutuskan kehidupan mereka sendiri dan bertindak tanpa rasa takut akan kekerasan dan balas dendam. Pasangan usia di bawah umur sering rentan dalam beberapa aspek: mereka muda, miskin, dan kurang berpendidikan. Itu mempengaruhi cara mereka mengelola aset dan sumber daya mereka sehingga mengurangi kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan. Pernikahan anak biasanya menempatkan anak perempuan-anak perempuan di bawah kendali suami mereka dan sering mertua orangtua sehingga para anak perempuan tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat, eksistensi, dan rencananya sendiri.

Pernikahan anak perempuan di bawah umur sebenarnya membuat hidup para anak perempuan menjadi lebih buruk. Anak perempuan-anak perempuan terkunci dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan produktif. Seorang wanita yang akan menikah pada usia muda mengatakan bahwa dia digunakan untuk membantu orang tua bekerja di ladang ketika dia masih lajang dan bisa mendapatkan penghasilan. Setelah menikah, ia tidak bisa lagi bekerja di ladang, sementara pengeluaran uang suaminya sangat terbatas dan bahkan tidak cukup untuk membeli susu dan makanan tambahan untuk anak-anak. Faktanya, para anak perempuan menjadi "korban" dari pernikahan dini.

Data menunjukkan bahwa penyelenggara semua hal yang berkaitan dengan anak perempuan bawah umur bukanlah pengantin, tetapi orang tua dan keluarga dari pria. Ini membuktikan bahwa pernikahan adalah untuk memenuhi keinginan keluarga dan itu bukan keputusan sukarela para anak perempuan untuk menikah. Anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki otoritas yang kurang untuk pengambilan keputusan dalam rumah tangga mereka. Seorang ibu muda mengatakan bahwa seluruh hidupnya hanya untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Di darumah tangga, seorang istri muda biasanya memiliki sedikit kuasa tawar dan wewenang untuk membuat keputusan tentang berbagai aspek kehidupan. Suami dan lam orang tuanya dalam hukum mengontrol akses dan partisipasinya di ruang publik. Ini sering terjadi selama pernikahan dan dimaksudkan pembatasan pada sumber daya, informasi dan layanan kesehatan

termasuk kesehatan mental, dan kepercayaan diri. Relasi kuasa berbasis gender tidak setara dan kemiskinan tidak meningkat setelah pernikahan dini para anak perempuan.

5.3. Praktik Pernikahan Dini Anak Perempuan dan Realitas Ideologi Gender dalam Komunitas Miskin di Provinsi Jawa Timur

5.3.1. Praktik Pernikahan Dini Anak Perempuan dan Realitas Ideologi Gender di Kabupaten Sampang

Pendidikan Terakhir Istri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah Bersekolah	4	4,0
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	7	7,0
3.	Tamat SD/Sederajat	34	34,0
4.	Tidak Tamat SMP/Sederajat	6	6,0
5.	Tamat SMP/Sederajat	32	32,0
6.	Tidak Tamat SMA/SMK/Sederajat	7	7,0
7.	Tamat SMA/SMK/Sederajat	10	10,0
	Total	100	100,0

Usia Menikah Istri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	12 tahun	5	5,0
2.	13 tahun	1	1,0
3.	14 tahun	8	8,0
4.	15 tahun	17	17,0
5.	16 tahun	31	31,0
6.	17 tahun	26	26,0
7.	18 tahun	12	12,0
	Total	100	100,0

Pendidikan Terakhir Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah Bersekolah	9	9,0
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	4	4,0
3.	Tamat SD/Sederajat	21	21,0
4.	Tidak Tamat SMP/Sederajat	5	5,0
5.	Tamat SMP/Sederajat	29	29,0
6.	Tidak Tamat SMA/SMK/Sederajat	5	5,0

7.	Tamat SMA/SMK/Sederajat	26	26,0
8.	D1/D2/D3/D4	1	1,0
	Total	100	100,0

Usia Menikah Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kurang dari sama dengan 20	71	71,0
2.	21-25	22	22,0
3.	26-30	7	7,0
	Total	100	100,0

Pendidikan Tertinggi Anak

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Belum Sekolah	28	28,0
2.	Belum/Tidak Tamat SD/Sederajat	5	5,0
3.	Tamat SD/Sederajat	11	11,0
4.	Belum/Tidak Tamat SMP/Sederajat	1	1,0
5.	Tamat SMP/Sederajat	19	19,0
6.	Belum/Tidak Tamat SMA/SMK/Sederajat	10	10,0
7.	Tamat SMA/SMK/Sederajat	21	21,0
8.	S1/S2/S3	5	5,0
	Total	100	100,0

Usia Menikah Ibu

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	11 tahun	8	8,0
2.	12 tahun	16	16,0
3.	13 tahun	11	11,0
4.	14 tahun	9	9,0
5.	15 tahun	22	22,0
6.	16 tahun	21	21,0
7.	17 tahun	8	8,0
8.	18 tahun	5	5,0
	Total	100	100,0

Usia Menikah Saudara Perempuan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	11 tahun	2	2,4
2.	12 tahun	4	4,9
3.	13 tahun	4	4,9
4.	14 tahun	4	4,9
5.	15 tahun	21	25,6
6.	16 tahun	31	37,8
7.	17 tahun	13	15,9
8.	18 tahun	3	3,7
	Total	82	100,0

Rencana Usia Menikahkan Saudara Perempuan (bagi yang saudara perempuannya belum menikah)

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Belum Tahu	2	20,0
2.	Kurang dari 20 tahun	6	60,0
3.	Lebih dari 20 tahun	2	20,0
	Total	10	100,0

5.3.2. Praktek Pernikahan Dini Anak Perempuan dan Realitas Ideologi Gender di Kabupaten Blitar

Pendidikan Terakhir Istri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah Bersekolah	4	4.0
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	8	8.0
3.	Tamat SD/Sederajat	19	19.0
4.	Tidak Tamat SMP/Sederajat	8	8.0
5.	Tamat SMP/Sederajat	42	42.0
6.	Tidak Tamat SMA/SMK//Sederajat	2	2.0
7.	Tamat SMA/SMK/Sederajat	16	16.0
8.	S1/S2/S3	1	1.0
	Total	100	100.0

Usia Menikah Istri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	11 tahun	6	6.0
2.	12 tahun	8	8.0
3.	13 tahun	3	3.0
4.	14 tahun	8	8.0
5.	15 tahun	12	12.0
6.	16 tahun	14	14.0
7.	17 tahun	22	22.0
8.	18 tahun	27	27.0
	Total	100	100.0

Pendidikan Terakhir Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah Bersekolah	8	8.0
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	6	6.0
3.	Tamat SD/Sederajat	20	20.0
4.	Tidak Tamat SMP/Sederajat	10	10.0
5.	Tamat SMP/Sederajat	40	40.0
6.	Tidak Tamat SMA/SMK/Sederajat	11	11.0
7.	Tamat SMA/SMK/Sederajat	4	4.0
8.	D1/D2/D3/D4	1	1.0
	Total	100	100.0

Usia Menikah Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kurang dari sama dengan 20 tahun	45	45.0
2.	21-25 tahun	39	39.0
3.	26-30 tahun	12	12.0
4.	31-35 tahun	1	1.0
5.	41-45 tahun	1	1.0
6.	46-50 tahun	1	1.0
7.	Lebih dari sama dengan 51 tahun	1	1.0
	Total	100	100.0

Pendidikan Tertinggi Anak

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Belum Bersekolah	20	20.0
2.	Belum/Tidak Tamat SD/Sederajat	21	21.0
3.	Tamat SD/Sederajat	17	17.0
4.	Belum/Tidak Tamat SMP/Sederajat	4	4.0
5.	Tamat SMP/Sederajat	18	18.0
6.	Belum/Tidak Tamat SMA/SMK/Sederajat	14	14.0
7.	Tamat SMA/SMK/Sederajat	6	6.0
	Total	100	100.0

Usia Menikah Ibu

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	12 tahun	1	1.0
2.	13 tahun	8	8.0
3.	14 tahun	20	20.0
4.	15 tahun	39	39.0
5.	16 tahun	8	8.0
6.	17 tahun	18	18.0
7.	18 tahun	6	6.0
	Total	100	100.0

Usia Menikah Saudara Perempuan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	14 tahun	2	2.2
2.	15 tahun	25	27.8
3.	16 tahun	10	11.1
4.	17 tahun	24	26.7
5.	18 tahun	16	17.8
6.	Lebih dari sama dengan 19 tahun	13	14.4
	Total	90	100.0

Usia Akan Menikahkan Anak Perempuan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Belum Tahu	2	25.0
2.	Lebih dari sama dengan 19 tahun	6	75.0
	Total	8	100.0

5.3.3. Praktik Pernikahan Dini Anak Perempuan dan Realitas Ideologi Gender di Kabupaten Ponorogo

Pendidikan Terakhir Istri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah Bersekolah	6	6.0
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	22	22.0
3.	Tamat SD/Sederajat	26	26.0
4.	Tidak Tamat SMP/Sederajat	15	15.0
5.	Tamat SMP/Sederajat	26	26.0
6.	Tidak Tamat SMA/SMK//Sederajat	3	3.0
7.	Tamat SMA/SMK/Sederajat	2	2.0
	Total	100	100.0

Usia Menikah Istri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	11 tahun	10	10.0
2.	12 tahun	11	11.0
3.	13 tahun	12	12.0
4.	14 tahun	19	19.0
5.	15 tahun	25	25.0
6.	16 tahun	14	14.0
7.	17 tahun	6	6.0
8.	18 tahun	3	3.0
	Total	100	100.0

Pendidikan Terakhir Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah Bersekolah	6	6.0
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	11	11.0
3.	Tamat SD/Sederajat	24	24.0
4.	Tidak Tamat SMP/Sederajat	11	11.0
5.	Tamat SMP/Sederajat	28	28.0
6.	Tidak Tamat SMA/SMK/Sederajat	13	13.0
7.	Tamat SMA/SMK/Sederajat	5	5.0
8.	D1/D2/D3/D4	2	2.0
	Total	100	100.0

Usia Menikah Suami

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	20 tahun	64	64.0
2.	21-25 tahun	20	20.0
3.	26-30 tahun	10	10.0
4.	31-35 tahun	1	1.0
5.	36-40 tahun	2	2.0
6.	41-45 tahun	2	2.0
7.	46-50 tahun	1	1.0
	Total	100	100.0

Pendidikan Tertinggi Anak

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Belum Bersekolah	1	1.0
2.	Belum/Tidak Tamat SD/Sederajat	3	3.0
3.	Tamat SD/Sederajat	12	12.0
4.	Belum/Tidak Tamat SMP/Sederajat	6	6.0
5.	Tamat SMP/Sederajat	37	37.0
6.	Belum/Tidak Tamat SMA/SMK/Sederajat	12	12.0
7.	Tamat SMA/SMK/Sederajat	20	20.0
8.	D1/D2/D3/D4	4	4.0
9.	S1/S2/S3	5	5.0
	Total	100	100.0

Usia Menikah Saudara Perempuan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	11 tahun	4	5.6
2.	12 tahun	6	8.3
3.	13 tahun	11	15.3
4.	14 tahun	12	16.7
5.	15 tahun	31	43.1
6.	16 tahun	2	2.8
7.	17 tahun	2	2.8
8.	18 tahun	4	5.6
	Total	72	100.0

Usia Akan Menikahkan Saudara Perempuan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	12 tahun	2	18.2
2.	13 tahun	1	9.1
3.	14 tahun	1	9.1
4.	15 tahun	5	45.5
5.	17 tahun	2	18.2
	Total	11	100.0

5.4. Nilai-Nilai dan Sistem Patriarki dalam Praktek Pernikahan Dini Anak Perempuan pada Komunitas Miskin

5.4.1. Nilai-Nilai dan Sistem Patriarki dalam Praktek Pernikahan Dini Anak Perempuan di Kabupaten Sampang

Proses Pernikahan Dini

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Keinginan Sendiri	25	25,0
2.	Dijodohkan oleh Orang Tua	66	66,0
3.	Dijodohkan oleh Saudara Kandung	2	2,0
4.	Dijodohkan oleh Kakek/Nenek	6	6,0
5.	Lainnya	1	1,0
	Total	100	100,0

Alasan Dijodohkan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Dijodohkan dengan saudara, supaya tidak putus persaudaraan	4	5,3
2.	Karena akan dijodohkan dengan duda	1	1,3
3.	Mengurangi beban orang tua	5	6,7
4.	Orang tua sudah tua dan ingin punya cucu	16	21,3
5.	Sebagai pembayaran hutang orang tua supaya dilunaskan	2	2,7
6.	Semua saudara menikah muda	2	2,7
7.	Sudah dikatakan perawan tua	1	1,3
8.	Sudah dilamar, jadi tidak boleh ditolak	3	4
9.	Sudah tradisi	6	8
10.	Sudah waktunya menikah	13	17,3
11.	Supaya ada yang menanggung biaya hidup	1	1,3
12.	Supaya mandiri	2	2,7
13.	Supaya tidak dikatakan perawan tua	4	5,3
14.	Supaya tidak zina	2	2,7
15.	Takut mitos	12	16
16.	Tidak diperbolehkan lama berpacaran	1	1,3
	Total	75	100,0

Alasan Keinginan Sendiri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Hamil dulu saat pacaran	1	4
2.	Hamil duluan saat pacaran	3	12
3.	Sudah mengenal lama	10	40
4.	Supaya tidak dilamar orang lain	1	4
5.	Supaya tidak menumpang di rumah saudara lagi	1	4
6.	Takut dijadikan istri kedua	1	4
7.	Tidak mau dijodohkan oleh pilihan orang tua	8	32
	Total	25	100,0

Rencana Menikahkan Anak Usia Dini

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Menikahkan Dini	51	68,0
2.	Iya Menikahkan Dini	24	32,0
	Total	75	100,0

Rencana Menjodohkan Anak

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Menjodohkan Anak	18	23,7
2.	Memberi Kesempatan Memilih	57	76,3
	Total	75	100,0

Usia Anak Perempuan Disebut Perawan Tua

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	18 tahun	47	47,0
2.	19 tahun	2	2,0
3.	20 tahun	17	17,0
4.	Lebih dari 20 tahun	34	34,0
	Total	100	100,0

5.4.2. Nilai-Nilai dan Sistem Patriarki dalam Praktek Pernikahan Dini Anak Perempuan di Kabupaten Blitar

Proses Pernikahan Dini

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Keinginan Sendiri	51	51.0
2.	Dijodohkan Orang Tua	47	47.0
3.	Dijodohkan Saudara Kandung	2	2.0
	Total	100	100.0

Alasan Menikah Dini karena Dijodohkan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Dipaksa orang tua	22	
2.	Hanya patuh pada orang tua takut durhaka	5	
3.	Keluarga sudah saling mengenal	4	
4.	Mengurangi beban orang tua	3	
5.	Menikah perintah agama	2	
6.	Saudara mengenal keluarga suami	2	
7.	Tidak ada biaya melanjutkan sekolah	11	
	Total	49	

Alasan Menikah Dini karena Keinginan Sendiri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Merasa sudah waktunya menikah	17	
2.	Sudah ingin berkeluarga	4	
3.	Sudah mengenal suami lama	17	
4.	Tidak lanjut sekolah lagi	11	
	Total	100	

Menikahkan Anak Perempuannya di Usia Dini

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Menikahkan di Usia Dini	67	82.7
2.	Iya, Menikahkan di Usia Dini	14	17.3
	Total	81	100.0

Proses Menikahkan Anak Perempuan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Menjodohkan Anak Perempuannya	14	17.3
2.	Memberi Kesempatan Memilih Jodoh	67	82.7
	Total	81	100.0

Usia Dikatakan Perawan Tua

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	18 tahun	7	7.0
2.	19 tahun	17	17.0
3.	20 tahun	17	17.0
4.	Lebih dari sama dengan 21 tahun	59	59.0
	Total	100	100.0

5.4.3. Nilai-Nilai dan Sistem Patriarki dalam Praktek Pernikahan Dini Anak Perempuan di Kabupaten Ponorogo

Proses Pernikahan Dini

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Keinginan Sendiri	19	19.0
2.	Dijodohkan Orang Tua	78	78.0
3.	Dijodohkan Saudara Kandung	3	3.0
	Total	100	100.0

Alasan Menikah Dini karena Dijodohkan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Dipaksa orang tua	8	
2.	Mengurangi beban orang tua	16	
3.	Orang tua beranggapan perempuan tidak perlu sekolah tinggi	4	
4.	Orang tua melihat kondisi suami mampu dan mapan	1	
5.	Orang tua mengatakan sudah waktunya menikah	11	
6.	Orang tua sudah mengenal keluarga suami	7	
7.	Orang tua takut responden terpengaruh pergaulan bebas	2	
8.	Saudara sudah mengenal keluarga suami	3	
9.	Tidak ada biaya untuk lanjut sekolah	26	
10.	Tidak segera mendapat pekerjaan	3	
	Total	81	100.0

Alasan Menikah Dini karena Keinginan Sendiri

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Agar pikiran orang tua tenang	6	
2.	Saling menyukai	8	
3.	Sudah lulus sekolah	1	
4.	Usia suami dulu sudah waktunya menikah	4	
	Total	19	100.0

Menikahkan Anak Perempuannya di Usia Dini

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Menikahkan di Usia Dini	50	58.8
2.	Iya, Menikahkan di Usia Dini	35	41.2
	Total	85	100.0

Proses Menikahkan Anak Perempuan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Menjodohkan Anak Perempuannya	31	36.5
2.	Memberi Kesempatan Memilih Jodoh	54	63.5
	Total	85	100.0

Usia Dikatakan Perawan Tua

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	18 tahun	35	35.0
2.	19 tahun	1	1.0
3.	20 tahun	3	3.0
4.	21 tahun	61	61.0
	Total	100	100.0

Praktek pernikahan anak perempuan di bawah umur adalah hasil dari reproduksi nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Pernikahan itu memiliki mekanisme sendiri sehingga terus berjalan. Mekanisme tersebut terus berjalan karena para aktor yang berperan dalam praktik pernikahan di bawah umur seperti yang dijelaskan sebelumnya. Praktik ini juga terkait dengan pengetahuan mereka tentang usia ideal bagi perempuan untuk menikah berdasarkan hukum dan tradisi di setiap daerah di mana pernikahan dini terjadi. Para pemimpin informal dan orang tua adalah aktor yang berkontribusi pada pernikahan dini. Mereka memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, mengatur dan mengelola pernikahan. Namun, mereka juga korban konstruksi sosial dan label sosial. Data berikut adalah mekanisme reproduksi nilai-nilai sosial dan budaya dan peran aktor praktik pernikahan anak perempuan di bawah umur di Ponorogo dan Blitar.

Data dari penelitian ini menunjukkan bahwa ibu-ibu dari anak perempuan di bawah umur memiliki pengalaman yang sama untuk menikah pada usia yang sangat muda. Sebagian besar dari mereka menikah pada usia 11 tahun hingga 13 tahun yang berarti usia mereka pada saat menikah lebih muda dibandingkan dengan anak perempuan mereka yang menikah pada usia 11 hingga 14 tahun. Namun demikian, usia pernikahan anak perempuan-anak perempuan di komunitas miskin masih relatif lebih awal, yaitu 3-4 tahun di bawah usia pernikahan yang ideal, 18 tahun. Nilai-nilai gender yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki dalam praktik pernikahan perempuan di bawah umur secara terus-menerus direproduksi seolah-olah tidak mempertimbangkan 'kerusakan' bagi para anak perempuan. Selain itu, tujuan pernikahan dini adalah untuk memenuhi nilai-nilai gender di masyarakat di mana seorang janda terlihat jauh lebih terhormat daripada status tidak menikah yang sering berarti label sebagai perawan tua. Nilai-nilai gender memperlakukan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Beberapa anak perempuan, yang menikah pada usia dini, mengatakan bahwa mereka tidak ditanya tentang pendapat mereka tentang calon suami pada perjodohan, waktu pernikahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan ritual pernikahan. Anak perempuan-anak perempuan hanya mengikuti dan mematuhi nilai-nilai gender bias, yang melihat mereka sebagai objek bukan subjek dari pernikahan dini.

Nilai-nilai gender yang menopang relasi gender yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan secara terus-menerus direproduksi dari generasi ke generasi. Di rumah tangga, seorang istri muda memiliki kuasa tawar yang lebih kecil untuk membuat keputusan tentang berbagai aspek kehidupan. Relasi kuasa dalam rumah tangga tidak sama di mana kuasa ada pada suami dan mertua yang mengendalikan akses ke kehidupan di luar rumah. Anak perempuan-anak perempuan harus menikah sesegera mungkin setelah menstruasi jika mereka tidak ingin diberi label sebagai 'perawan tua'. Seorang ibu mengatakan bahwa praktik pernikahan dini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Label perawan tua begitu menghantui dan diturunkan dari satu generasi ke generasi

berikutnya. Selain itu, para tetua dan orang tua di masyarakat miskin tidak mengerti tentang pengaturan usia pernikahan di bawah UU Pernikahan. Hal ini diperoleh dari data yang sebagian besar orang tua tidak tahu tentang batas usia dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Mereka hanya tahu bahwa waktu bagi perempuan untuk menikah adalah datangnya menstruasi.

Karena rendahnya tingkat pendidikan, anak perempuan-anak perempuan pernikahan seringkali tidak dipertimbangkan oleh suaminya dan mertua untuk membuat dan mengelola uang dan membuat keputusan tentang keuangan rumah tangga. Mereka memiliki kontrol lebih sedikit atas penghasilan mereka. Isolasi dari sekolah, teman dan tempat kerja membuat mereka sulit mendapatkan akses ke dukungan sosial yang sangat penting bagi kesehatan emosional mereka. Pernikahan dini membatasi anak perempuan yang sudah menikah untuk mendapatkan akses ke modal sosial dan jaringan sosial sebagai sarana untuk meningkatkan potensi pendapatan. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa anak perempuan-anak perempuan muda yang menikah tidak dapat melawan pelecehan fisik dan emosional oleh suami atau mertua mereka di rumah mereka sendiri (Anand, S., NC Desmond Marques, dan H. Fuje. 2012). Setelah menikah, para istri muda mengalami penderitaan yang parah dan terjebak dalam kemiskinan secara ekonomi dan sosial.

Kurangnya otonomi di antara para istri muda secara signifikan mempengaruhi ekonomi mereka sehingga mereka tidak dapat mengalokasikan lebih banyak uang untuk pendidikan dan kesehatan, misalnya. Hanya melalui partisipasi dan pengambilan keputusan, aspirasi seorang anak perempuan untuk anak-anaknya dapat terwujud. Kurangnya otonomi anak perempuan dalam masalah yang berkaitan dengan pengasuhan anak dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebelum kelahiran, karena ada kurangnya agen dalam keputusan reproduksi, termasuk jarak antara kelahiran dan jumlah anak.

Selanjutnya, pernikahan dini untuk anak perempuan di bawah umur memperkuat nilai-nilai yang tidak setara dan norma-norma gender ke generasi berikutnya. Mereka dapat kehilangan kesempatan untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka di masa depan karena kurangnya investasi publik dalam layanan dan program sosial. Studi ini mengungkapkan bahwa peran wanita sebagai pengasuh utama menghalangi para istri muda untuk bekerja di luar rumah dan membatasi kesempatannya untuk bekerja. Karena keterbatasan ini ditemui pada tahap awal pernikahan, pernikahan anak mempengaruhi potensi perempuan untuk memasuki dunia kerja. Salah satu penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pernikahan dini berkontribusi terhadap tingginya angka kelahiran bayi prematur, jarak kelahiran pendek, dan jumlah anak yang lebih tinggi (Nour, NW 2009).

5.5. Upaya Perlindungan dan Pencegahan Praktek Pernikahan Dini Anak Perempuan dan Kebijakan Pemerintah

5.5.1. Upaya Perlindungan dan Pencegahan Praktek Pernikahan Dini Anak Perempuan di Kabupaten Sampang

Pengetahuan tentang Pelaksanaan Terakhir Pernikahan Dini

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Satu Bulan yang Lalu	3	3,0
2.	Dua Bulan yang Lalu	5	5,0
3.	Tiga Bulan yang Lalu	7	7,0
4.	Empat Bulan yang Lalu	21	21,0
5.	Lima Bulan yang Lalu	7	7,0
6.	Enam Bulan yang Lalu	6	6,0
7.	Tujuh Bulan sampai Satu Tahun yang Lalu	22	22,0
8.	Lebih dari Setahun yang Lalu	29	29,0
	Total	100	100,0

Pengetahuan tentang Usia Laki-laki yang Menikah Dini Terakhir

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kurang dari sama dengan 20 tahun	66	66,0
2.	21-25	21	21,0
3.	26-30	6	6,0
4.	36-40	5	5,0
5.	41-45	2	2,0
	Total	100	100,0

Status Laki-laki yang Menikah Dini Terakhir

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Perjaka	87	87,0
2.	Duda	13	13,0
	Total	100	100,0

Intensitas Pernikahan Dini di Desa

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Menurun	63	63,0
2.	Meningkat	37	37,0
	Total	100	100,0

Waktu Menurunnya Pernikahan Dini

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sejak Setahun Terakhir	37	58,7
2.	Sejak Dua Tahun Terakhir	9	14,3
3.	Sejak Tiga Tahun Terakhir	17	27
	Total	63	100,0

Penyebab Angka Pernikahan Dini Menurun

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Anak Perempuan Ingin Melanjutkan Sekolah	30	47,6
2.	Anak Laki-laki Ingin Melanjutkan Sekolah	2	3,2
3.	Anak Perempuan Bekerja di Luar Desa	5	7,9
4.	Anak Laki-laki Bekerja di Luar Desa	6	9,5
5.	Mengurus Administrasi Pernikahan yang Semakin Sulit	20	31,7
	Total	63	100,0

Intensitas Penyuluhan Mengenai Pernikahan Dini

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah	64	64,0
2.	Pernah	36	36,0
	Total	100	100,0

Program Penyuluhan yang Disampaikan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Cara mengurus administrasi Pernikahan	8	22,2
2.	Dampak pernikahan dini	9	25
3.	Kesehatan Ibu dan Anak	8	22,2
4.	Larangan menikah muda	8	22,2
5.	Pendidikan Anak	1	2,7
6.	Pengurangan Angka Perceraian	2	5,6
	Total	36	100,0

Pemberi Penyuluhan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Petugas Kesehatan Desa	11	30,6
2.	Perangkat Desa	19	52,8
3.	Lainnya	6	16,7
4.	Total	36	100,0

Usia Ideal Menikah untuk Perempuan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	18 tahun	47	47,0
2.	19 tahun	11	11,0
3.	20 tahun	26	26,0
4.	21 tahun	3	3,0
5.	22 tahun	7	7,0
6.	23 tahun	1	1,0
7.	25 tahun	5	5,0
	Total	100	100,0

Usia Ideal Menikah untuk Laki-laki

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	18 tahun	5	5,0
2.	19 tahun	26	26,0
3.	20 tahun	33	33,0
4.	21 tahun	4	4,0
5.	22 tahun	3	3,0
6.	23 tahun	6	6,0
7.	25 tahun	23	23,0
	Total	100	100,0

Jumlah Anak Ideal

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	2 orang	68	68,0
2.	3 orang	31	31,0
3.	Lebih dari 3 orang	1	1,0
	Total	100	100,0

Sikap Menanggapi Usia Ideal Menikah

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Biasa saja/Tidak tahu	21	21,0
2.	Kalau dilamar akan tetap diterima karena sudah tradisi	1	1,0
3.	Lebih baik disegerakan menikah	1	1,0
4.	Menikah harus sesuai aturan pemerintah	27	27,0
5.	Pendidikan anak tidak terganggu	1	1,0
6.	Pendidikan anak tidak terganggu pernikahan	1	1,0
7.	Pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat supaya lebih baik dengan tidak menikah dini	1	1,0
8.	Pernikahan dini melanggar Undang-undang	12	12,0
9.	Sudah cukup usia menikah dan bekerja	4	4,0
10.	Supaya bisa sekolah dan bekerja dulu	1	1,0
11.	Supaya tidak disebut perawan tua	1	1,0
12.	Tidak sesuai tradisi	4	4,0
13.	Usia pas untuk menikah	22	22,0
14.	Usia siap berkeluarga	2	2,0
15.	Usia sudah siap mental dan fisik	1	1,0
	Total	100	100,0

Bantuan yang Paling Dibutuhkan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kebutuhan Pendidikan Anak	51	51,0
2.	Kebutuhan Pendidikan Ibu	7	7,0
3.	Kebutuhan Kesehatan Anak	8	8,0
4.	Kebutuhan Kesehatan Ibu	11	11,0
5.	Lainnya	23	23,0
	Total	100	100,0

Jenis Kebutuhan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Asuransi dan pemeriksaan gratis	20	20,0
2.	Asuransi dan pemeriksaan kesehatan Gratis	1	1,0
3.	Bantuan sembako gratis	20	20,0
4.	Modal usaha	1	1,0
5.	Pekerjaan sampingan untuk ibu	1	1,0
6.	Penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi	7	7,0
7.	Perlengkapan dan biaya sekolah gratis	50	50,0
	Total	100	100,0

5.5.2. Upaya Perlindungan dan Pencegahan Praktek Pernikahan Dini Anak Perempuan di Kabupaten Blitar**Pengetahuan tentang Waktu Pernikahan Dini Terakhir di Desa**

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Satu Bulan yang Lalu	1	1.0
2.	Dua Bulan yang Lalu	1	1.0
3.	Tiga Bulan yang Lalu	3	3.0
4.	Empat Bulan yang Lalu	6	6.0
5.	Lima Bulan yang Lalu	10	10.0
6.	Enam Bulan yang Lalu	5	5.0
7.	Tujuh Bulan sampai Setahun yang Lalu	18	18.0
8.	Lebih dari Setahun lalu	56	56.0
	Total	100	100.0

Pengetahuan tentang Usia Laki-laki yang Menikah Dini

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kurang dari sama dengan 20 tahun	53	53.0
2.	21-25 tahun	37	37.0
3.	26-30 tahun	5	5.0
4.	31-35 tahun	1	1.0
5.	36-40 tahun	3	3.0
6.	Lebih dari sama dengan 51 tahun	1	1.0
	Total	100	100.0

Status Laki-laki yang Menikah Dini

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Perjaka	97	97.0
2.	Duda	3	3.0
	Total	100	100.0

Intensitas Menikah Dini di Desa

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Menurun	88	88.0
2.	Meningkat	12	12.0
	Total	100	100.0

Waktu Pernikahan Dini Dikatakan Menurun

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sejak Setahun Terakhir	29	33.3
2.	Sejak Dua Tahun Terakhir	12	12.6
3.	Sejak Tiga Tahun Terakhir	14	16.1
4.	Lebih dari Tiga Tahun Terakhir	33	37.9
	Total	88	100.0

Penyebab Pernikahan Dini Menurun

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Anak Perempuan Ingin Melanjutkan Sekolah	27	29.1
2.	Anak Laki-laki Ingin Melanjutkan Sekolah	13	15.1
3.	Anak Perempuan Bekerja Di Luar Desa	16	18.6
4.	Anak Laki-laki Bekerja Di Luar Desa	18	20.9
5.	Mengurus Administrasi Pernikahan yang Semakin Sulit	14	16.3
	Total	88	100.0

Intensitas Penyuluhan tentang Pernikahan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah	95	95.0
2.	Pernah	5	5.0
	Total	100	100.0

Program yang Disampaikan dalam Penyuluhan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kesehatan ibu dan anak	5	100.0
	Total	5	100.0

Pemberi Penyuluhan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Petugas Kesehatan Desa	1	20.0
2.	Perangkat Desa	4	80.0
	Total	5	4.0

Pengetahuan tentang Usia Ideal Menikah bagi Perempuan Menurut Undang-undang

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	18 tahun	32	32.0
2.	19 tahun	24	24.0
3.	20 tahun	24	24.0
4.	22 tahun	6	6.0
5.	23 tahun	3	3.0
6.	25 tahun	11	11.0
	Total	100	100.0

Pengetahuan tentang Usia Ideal Menikah bagi Laki-laki Menurut Undang-undang

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	18 tahun	2	2.0
2.	19 tahun	4	4.0
3.	20 tahun	20	20.0
4.	21 tahun	18	18.0
5.	22 tahun	6	6.0
6.	23 tahun	8	8.0
7.	24 tahun	8	8.0
8.	25 tahun	34	34.0
	Total	100	100.0

Pengetahuan tentang Jumlah Ideal Anak dalam Keluarga Menurut**Undang-undang**

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	2 orang	49	49.0
2.	3 orang	33	33.0
3.	Lebih dari sama dengan 4 orang	18	18.0
	Total	100	100.0

Sikap tentang Usia Menikah yang Ideal Menurut Undang-undang

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Administrasi pernikahan semakin sulit, Undang-undang juga melarang, jadi setuju saja	16	16.0
2.	Belum bisa mandiri	6	6.0
3.	Mengikuti/setuju saja	5	5.0
4.	Menjadi beban orang tua karena belum siap	1	1.0
5.	Merasa menyesal dan masih waktunya sekolah	14	14.0
6.	Merasa menyesal dan menjadi beban	2	2.0
7.	Tidak akan menikah dini kalau tahu Undang-undangnya seperti itu	7	7.0
8.	Tidak masalah asalkan sudah siap	30	30.0
9.	Tidak tahu	19	19.0
	Total	100	100.0

Kebutuhan Sehari-hari yang Paling Dibutuhkan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kebutuhan Pendidikan Anak	48	48.0
2.	Kebutuhan Pendidikan Ibu	5	5.0
3.	Kebutuhan Kesehatan Anak	8	8.0
4.	Kebutuhan Kesehatan Ibu	4	4.0
5.	Lainnya	35	35.0
	Total	100	100.0

Bentuk Kebutuhan Sehari-hari yang Paling Dibutuhkan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Asuransi, pemeriksaan dan berobat gratis	12	12.0
2.	Bantuan sembako gratis	35	35.0
3.	Biaya dan perlengkapan sekolah gratis	48	48.0
4.	Ikut kejar paket	5	5.0
	Total	100	100.0

5.5.3. Upaya Perlindungan dan Pencegahan Praktek Pernikahan Dini Anak Perempuan di Kabupaten Ponorogo**Pengetahuan tentang Waktu Pernikahan Dini Terakhir di Desa**

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Empat Bulan yang Lalu	1	1.0
2.	Lima Bulan yang Lalu	1	1.0
3.	Enam Bulan yang Lalu	19	19.0
4.	Tujuh Bulan sampai Setahun yang Lalu	49	49.0
5.	Lebih dari Setahun lalu	30	30.0
	Total	100	100.0

Pengetahuan tentang Usia Laki-laki yang Menikah Dini

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kurang dari sama dengan 20 tahun	40	40.0
2.	21-25 tahun	36	36.0
3.	26-30 tahun	17	17.0
4.	31-35 tahun	3	3.0
5.	36-40 tahun	4	4.0
	Total	100	100.0

Status Laki-laki yang Menikah Dini

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Perjaka	86	86.0
2.	Duda	14	14.0
	Total	100	100.0

Intensitas Menikah Dini di Desa

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Menurun	92	92.0
2.	Meningkat	8	8.0
	Total	100	100.0

Waktu Pernikahan Dini Dikatakan Menurun

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sejak Setahun Terakhir	53	57.6
2.	Sejak Dua Tahun Terakhir	16	17.4
3.	Sejak Tiga Tahun Terakhir	14	15.2
4.	Lebih dari Tiga Tahun Terakhir	9	9.8
	Total	92	100.0

Penyebab Pernikahan Dini Menurun

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Anak Perempuan Ingin Melanjutkan Sekolah	25	27.2
2.	Anak Laki-laki Ingin Melanjutkan Sekolah	15	16.3
3.	Anak Perempuan Bekerja Di Luar Desa	17	18.5
4.	Anak Laki-laki Bekerja Di Luar Desa	13	14.1
5.	Mengurus Administrasi Pernikahan yang Semakin Sulit	20	21.7
6.	Lainnya	2	2.2
	Total	92	100.0

Intensitas Penyuluhan tentang Pernikahan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah	93	93.0
2.	Pernah	7	7.0
	Total	100	100.0

Program yang Disampaikan dalam Penyuluhan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Dampak pernikahan dini	4	
2.	Kesehatan reproduksi	1	
3.	Pengurangan angka nikah dini	2	
	Total	7	100.0

Pemberi Penyuluhan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Perangkat Desa	6	85.7
2.	Lainnya	1	14.3
	Total	7	100.0

Pengetahuan tentang Usia Ideal Menikah bagi Perempuan Menurut Undang-undang

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	18 tahun	47	47.0
2.	19 tahun	3	3.0
3.	20 tahun	25	25.0
4.	22 tahun	14	14.0
5.	23 tahun	2	2.0
6.	25 tahun	9	9.0
	Total	100	100.0

Pengetahuan tentang Usia Ideal Menikah bagi Laki-laki Menurut Undang-undang

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	18 tahun	3	3.0
2.	19 tahun	9	9.0
3.	20 tahun	36	36.0
4.	21 tahun	3	3.0
5.	22 tahun	8	8.0
6.	25 tahun	41	41.0
	Total	100	100.0

Pengetahuan tentang Jumlah Ideal Anak dalam Keluarga Menurut**Undang-undang**

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	2 orang	62	62.0
2.	3 orang	36	36.0
3.	Lebih dari sama dengan 4 orang	2	2.0
	Total	100	100.0

Sikap tentang Usia Menikah yang Ideal Menurut Undang-undang

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Mengikuti aturan pemerintah	49	49.0
2.	Menikah dini tidak baik	6	6.0
3.	Tidak setuju	17	17.0
4.	Tidak tahu	28	28.0
	Total	100	100.0

Kebutuhan Sehari-hari yang Paling Dibutuhkan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kebutuhan Pendidikan Anak	48	48.0
2.	Kebutuhan Pendidikan Ibu	4	4.0
3.	Kebutuhan Kesehatan Anak	15	15.0
4.	Kebutuhan Kesehatan Ibu	3	3.0
5.	Lainnya	30	30.0
	Total	100	100.0

Bentuk Kebutuhan Sehari-hari yang Paling Dibutuhkan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Bantuan keterampilan untuk usaha	4	48.0
2.	Bantuan pemeriksaan berkala dan bantuan obat/vitamin secara gratis	18	4.0
3.	Bantuan perlengkapan dan biaya sekolah	48	15.0
4.	Bantuan sembako sehari-hari	30	30.0
	Total	100	100.0

Nilai-nilai tradisional dan norma-norma yang tertanam dalam pernikahan anak berdampak pada penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja. Partisipasi yang rendah dalam pekerjaan berbayar dapat meningkatkan kemiskinan rumah tangga, kerentanan terhadap guncangan ekonomi, keragaman pendapatan rendah, dan memberikan insentif dalam keputusan alokasi jangka pendek dengan mengorbankan investasi jangka panjang dalam modal manusia dan fisik. Ini juga menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan fisik, berkurangnya investasi, dan rendahnya produktivitas, yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor ini, pada gilirannya, mungkin memiliki dampak yang signifikan, yang menyebabkan kesehatan yang lebih buruk di kalangan anak-anak dan investasi yang lebih rendah dalam pendidikan dan akumulasi sumber daya manusia lainnya, serta kemampuan untuk mengatasi rintangan, seperti penyakit dan kemungkinan pernikahan dini di generasi selanjutnya. Rendahnya nilai anak perempuan dan label sosial yang melekat pada mereka akan memperparah praktik pernikahan dini pada anak perempuan di bawah umur.

Anak perempuan-anak perempuan pernikahan dini memiliki sedikit kuasa untuk membuat keputusan, kemungkinan lebih tinggi untuk keluar dari sekolah, buta huruf, memiliki penghasilan yang lebih rendah dan kontrol yang tidak terlalu besar atas aset-aset rumah tangga. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa menjadi seorang ibu pada usia yang sangat muda akan membuat anak-anak mereka rentan terhadap kesehatan yang buruk dan kekurangan gizi. Para istri muda yang melahirkan pada usia dini akan mengalami kelahiran yang lebih berbahaya, sulit, dan rumit, dan cenderung memiliki anak dengan kondisi kesehatan dan pendidikan yang lebih buruk daripada rekan-rekan mereka (Field, E., Dan A. Ambrus. 2008).

Studi ini menemukan bahwa relasi kuasa antara istri muda dan suami, orang tua dan mertua mereka sangat tidak setara. Konsekuensi pernikahan anak ditemukan lebih parah pada anak perempuan. Pernikahan anak juga memberikan dampak yang dalam dan luas di tingkat nasional dan global dalam bentuk potensi kehilangan pendapatan dan warisan kemiskinan antar generasi. Relasi kuasa berbasis gender yang tidak sama terjadi dalam bentuk praktik pernikahan anak di komunitas miskin. Kuasa berbasis gender terkait dengan hak-hak yang membatasi kuasa dan pengetahuan ini dihasilkan dan diwariskan melalui kuasa, yang pada gilirannya menghasilkan kuasa.

Akhirnya, dapat dilihat bahwa korban yang paling menderita dalam pernikahan dini adalah para anak perempuan. Norma-norma sosial yang mendukung pernikahan dini pada anak perempuan direproduksi melalui berbagai mekanisme. Dampak ekonomi dan biaya pernikahan cenderung lebih tinggi pada anak perempuan yang menikah lebih awal, pada anak-anak mereka, keluarga mereka, komunitas mereka, dan dalam masyarakat secara keseluruhan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Hasil penelitian mengungkapkan beberapa poin sebagai berikut:

- 1) praktik pernikahan dini di kalangan perempuan masih dilakukan karena alasan ekonomi dengan label sosial negatif yang dikenakan pada anak perempuan;
- 2) anak perempuan di bawah umur menjadi korban pernikahan dini di mana relasi kuasa dengan suami dan mertuanya tidak setara;
- 3) relasi jender antara anak perempuan di bawah umur dan suami mereka serta para penatua berdasarkan relasi jender yang tidak setara direproduksi dan dilewati dari generasi ke generasi. Kondisi ekonomi para anak perempuan yang menjalani pernikahan dini diperburuk oleh masalah multidimensional. Anak perempuan-anak perempuan itu bahkan memiliki kondisi yang lebih baik sebelum menikah. Setelah menikah, para anak perempuan putus sekolah, memiliki anak-anak yang kekurangan gizi, dan tidak memperbaiki kondisi ekonomi orang tua mereka.

Masyarakat miskin berasumsi bahwa pernikahan muda adalah jalan keluar dari kemiskinan. Faktanya, penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini membuat kemiskinan semakin buruk. Para anak perempuan terjebak dalam pekerjaan rumah tangga sehingga mereka tidak dapat melakukan kegiatan yang produktif. Sebelum menikah, para anak perempuan bisa membantu orang tua mereka untuk mendapatkan uang dengan bekerja di ladang tetapi mereka tidak bisa lagi melakukannya setelah menikah. Di sisi lain, suami mereka tidak dapat memberi mereka cukup uang untuk membeli susu dan makanan tambahan untuk anak-anak mereka. Itu berarti anak perempuan-anak perempuan itu menjadi korban pernikahan dini. Selain itu, relasi kuasa berbasis gender menempatkan mereka sebagai bawahan bagi suami dan mertua mereka.

Anak perempuan di bawah umur menderita karena mereka kehilangan hak mereka sebagai anak-anak. Mereka dibebani dengan banyak tanggung jawab dalam tugas-tugas domestik sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengejar impian mereka sendiri. Wanita di bawah umur yang menikah rentan terhadap pelanggaran hak-hak mereka sebagai anak-anak karena mereka tidak dapat dianggap sebagai anak-anak lagi setelah menikah. Dengan demikian, kehidupan anak perempuan-anak perempuan itu berpotensi memburuk karena mereka terjebak

dalam tugas-tugas domestik dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Studi ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah dan hukum pernikahan tidak dapat dengan mudah mengurangi praktik pernikahan anak perempuan di bawah umur. Pencegahan pernikahan anak membutuhkan pendekatan yang komprehensif dengan mengatasi nilai-nilai sosial dan budaya, terutama mempromosikan relasi gender yang setara. Salah satu solusinya adalah pemberdayaan berdasarkan perspektif gender yang setara.

6.2. Rekomendasi

- ❖ Hasil Studi ini dijadikan masukan dan bukti data yang mendukung peninjauan kembali Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 2 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dan (2).
- ❖ Hasil Studi ini dijadikan masukan untuk merancang program Pencegahan praktek Pernikahan Dini yang berperspektif gender yang berbasis ‘local spesifik’ dan ‘bottom up’.
- ❖ Perlu diimplementasikan pendekatan model pencegahan pernikahan dini pada anak perempuan dan perlindungan bagi anak perempuan khususnya pada komunitas miskin



DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik (Indonesia Statistical Institution). Buku Survey Kependudukan Indonesia. 1997.
- Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Chambers, Robert. 2006. -Poverty Unperceived: Traps, Biases and Agende. Working Paper Unniversity of Sussex.
- Field, E., and A. Ambrus. 2008. -Early Marriage, Age of Menarche, and Female Schooling Attainment in Bangladesh. *Journal of Political Economy* 116 (5): 881–930. doi: 10.1086/593333
- Foucault, Michel. 2002. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan* (diterjemahkan dari *Power/Knowledge*. Sussex: The Harvester Press). Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Gemignani, R. and Q. Wodon 2015. -Child Marriage and Faith Affiliation in Sub-Saharan Africa: Stylized Facts and Heterogeneity. *The Review of Faith & International Affairs*, 13 (3): 14–47.
- Ihromi, T.O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jain, S., and K. Kurz. 2007. *New Insights on Preventing Child Marriage: A Global Analysis of Factors and Programs*. Washington, DC: ICRW.
- Jones, Pip (ed). 2009. *Pengantar Teori-teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Karam, A.2015. -Faith-inspired Initiatives to Tackle the Social Determinants of Child Marriage. *The Review of Faith & International Affairs*, 13 (3): 59–68.
- Khanna, T., R. Verma, and E. Weiss. 2013. *Child Marriage in South Asia: Realities, Responses and the Way Forward*. Bangkok: UNFPA Asia Pacific Regional Office.

Klugman, J., L. Hanmer, S. Twigg, T. Hasan, and J. McCleary-Sills. 2014. *Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity*. Washington, DC: The World Bank.

Koblinsky, M., M. E. Chowdhury, A. Moran, and C. Ronsmans. 2012. –Maternal Morbidity and Disability and their Consequences: Neglected Agenda in Maternal Health. I *Journal of Health, Population, and Nutrition* 30 (2): 124–0. doi: 10.3329/jhpn.v30i2.11294

- Lamb, S., and Z. D. Peterson. 2012. –Adolescent Girls' Sexual Empowerment: Two Feminists Explore the Concept. *Sex Roles* 66 (11–12): 703–712. doi: 10.1007/s11199-011-9995-3
- Le Strat, Y., C. Dubertret, and B. Le Foll. 2011. –Child Marriage in the United States and Its Association With Mental Health in Women. *Pediatrics* 128 (3): 524–530. doi: 10.1542/peds.2011-0961
- Malhotra, A., A. Warner, A. McGonagle, and S. Lee-Rife. 2011. *Solutions to End Child Marriage What the Evidence Shows*. Washington, DC: International Center for Research on Women.
- Mudrajat, Kuncoro. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nguyen, M. C., and Q. Wodon. 2015b (forthcoming). –Early Marriage, Pregnancies, and the Gender Gap in Education Attainment: An Analysis Based on the Reasons for Dropping out of School. *In Child Marriage and Education in Sub-Saharan Africa*, edited by Q. Wodon. Washington, DC: World Bank.
- Nour, N. W. 2009. –Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue. *Review of Obstetric Gynecology* 2 (1): 51–56.
- Plan UK. 2011. *Breaking Vows: Early and Forced Marriage and Girls' Education*. London: Plan UK.
- Raj, A. 2010. –When the Mother is a Child: The Impact of Child Marriage on the Health and Human Rights of Girls. *Archives of Disease in Childhood* 95 (11): 931–935. doi: 10.1136/adc.2009.178707
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi Kedelapan 2012)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saptari, Ratna & Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Grafiti Press.
- Susanti H., Emy. 2007. *Ketimpangan Gender dan Ketidakberdayaan Perempuan Miskin Perkotaan*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Susanti H., Emy. 2009. *Perempuan Miskin dan Makna Sosial Kemiskinan*. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. Tahun XXII, Nomor 4, Oktober-Desember 2009.
- Susanti H., Emy. 2012. *Mekanisme Survival dan Pemberdayaan Perempuan Miskin (Kajian Isu-isu Gender di Daerah Eksplorasi Migas di Jawa Timur)*. Aditya Medika.
- Susanti H., Emy. 2013. *Kajian Keluarga Miskin dan Perangkap Kemiskinan di Perkotaan*. Surabaya: Insan Cendekia.

Supriatna, T. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Pres.

Suyanto, Bagong dan Hendrarso, Emy Susanti. 1996. *Wanita dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*. Surabaya: Airlangga University Press.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1999. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Utami, Santi Wijaya Hesti dkk., 2001. *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi, Dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan*. Bantul: IP4-Lappera dan The Asia Foundation.

_____, 2004. *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 8/No. 2 Oktober 2003. -Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan. Bandung: Yayasan Akatiga.

LAMPIRAN LUARAN PENELITIAN TAHUN KEDUA DARI RENCANA DUA TAHUN

LAMPIRAN : BUKTI UNDER REVIEWED PUBLIKASI JURNAL INTERNASIONAL

The screenshot shows the ScholarOne Manuscripts Author Dashboard for the International Social Science Journal. The user is logged in as Emy Susanti. The dashboard displays a list of submitted manuscripts, with one manuscript currently under review.

STATUS	ID	TITLE	CREATED	SUBMITTED
Under Review	ISSJ-CP-2018-048	Gender based power relations and the practices of girl marriage in poor families in East Java	30-Apr-2018	02-May-2018

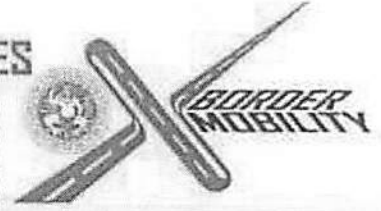
Additional details for the manuscript include the author EIC: Ibe, Sebastian and ADM: Mckleru, Mubteayn, and a link to view the submission. A cover letter is also mentioned.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

LAMPIRAN : LETTER OF ACCEPTANCE PUBLIKASI SCOPUS

THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN STUDIES

Faculty of Humanities, Universitas Airlangga
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Indonesia
Email: urbanmobility@fib.unair.ac.id
Website: fib.unair.ac.id/icus



LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Emy Susanti,

We are pleased to inform you that your paper entitled:

Girl Marriage and Marginalisation of Women in the Cities of East Java

has been accepted for presentation and further submission to the Scopus indexed publisher of the CRC Press (Taylor and Francis Publishing). The paper is expected to be published by mid-December 2018.

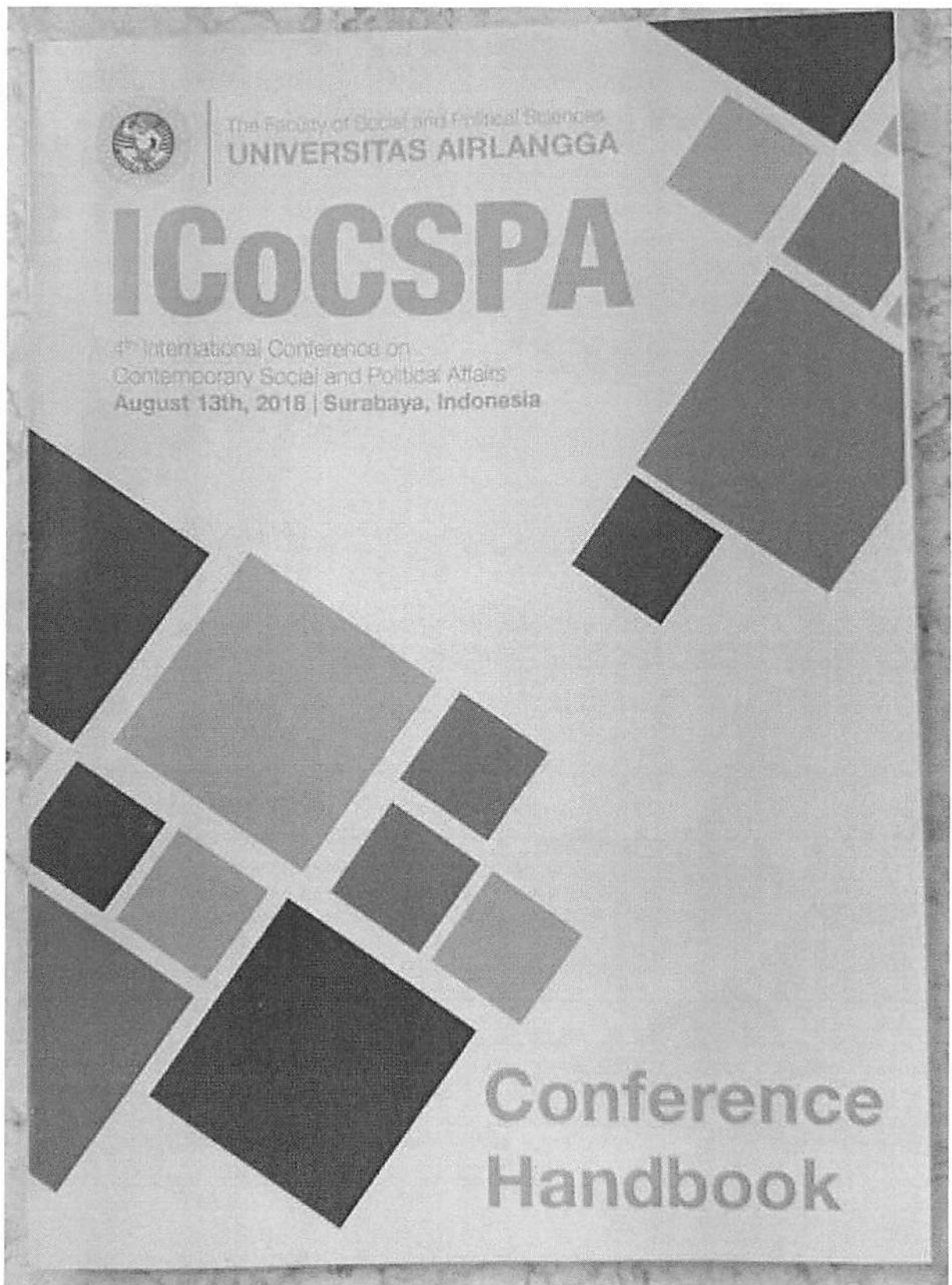
We thank you for your participation at the 4th International Conference on Urban Studies, held 8-9 December 2017 in Surabaya, Indonesia.

Sincerely,
Committee Chair

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yuni Sari Amalia'.

Yuni Sari Amalia, Ph.D.

LAMPIRAN : INTERNATIONAL CONFERENCE



Conference Schedule

Registration	07.00-08.00
Opening Ceremony	08.00-08.30
Keynote Speaker 1	08.30-09.15
Keynote Speaker 2	09.15-10.00
Coffee Break	10.00-10.30
Press Conference	
Session A	10.30-12.00
Lunch & Prayer Time	12.00-13.00
Keynote Speaker 3	13.00-13.45
Keynote Speaker 4	13.45-14.30
Keynote Speaker 5	14.30-15.15
Coffee Break & Prayer Time	15.15-15.45
Session B	15.45-17.00
Session C	17.00-18.00
Dinner & Prayer Time	18.00-19.00
Announcement & Closing	19.00-20.00

International Conference on Contemporary Social and Political Issues
The Second Triennial Airlangga University - Surabaya, Indonesia

Keynote Speakers ICoCSPA 2018

Prof. Ronald A. Lukens-Bull
Assoc. Prof. Cheryll Ruth Soriano
Prof. Ariel Heryanto, FAH,LI
Prof. Dr. (H.C.) Dahlan Iskan
Prof. Henry Subiakto

Table of Contents

President's Welcome.....	1
Where is the venue?.....	3
Inside the venue.....	4
Conference Schedule.....	5
Keynote Speakers.....	6
Abstract of Papers	
Local Development in Global Digital Era.....	16
Digital Democracy, Election and Campaign.....	23
Digital Technologies and e-Government.....	36
Digital Technologies for Global & Local Activism.....	43
Public Policy Challenges in the Digital Age.....	50
Digital Technologies & the Global Creative Economy.....	56
Digital Media and the Millennial Generation.....	66
Digital Technologies, Gender & Sexuality.....	72
Digital Technologies for Education.....	78
Digital Technologies and the Vulnerable Communities.....	88
Religion in the Global Digital Age.....	95
Politics in the Post-Truth Societies.....	100
Media in the Post-Truth Societies.....	105
Digital Media and Global Political Affairs.....	111

Gender Mainstreaming Strategy to Eliminate The Practice of Girl Marriage

Emy Susanti

Department of Sociology, Airlangga University - Surabaya, Indonesia

Abstract:

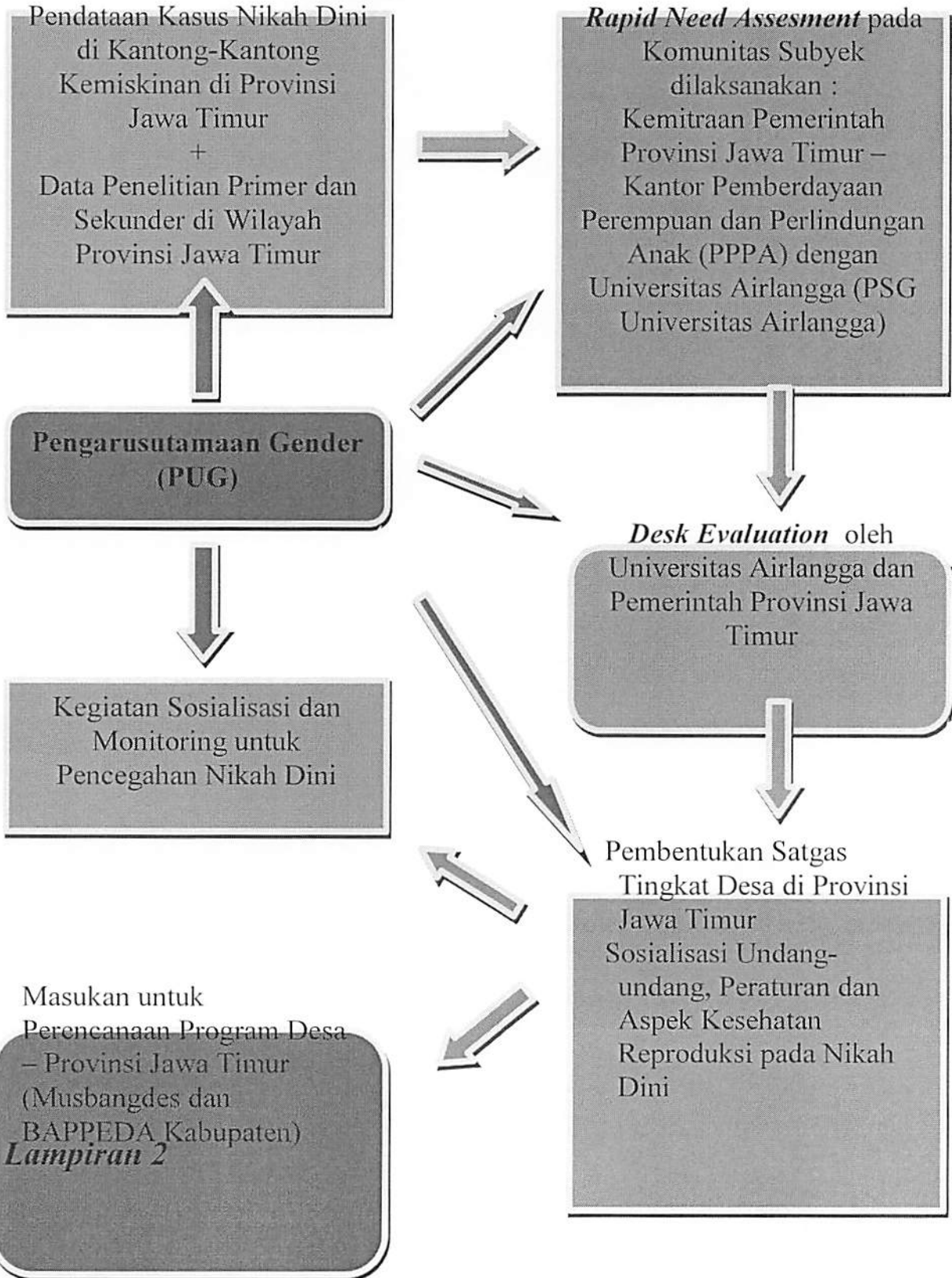
The practice of girl marriage has remained to this day, mainly in poor villages. This paper is intended to reveal how the practice of girl marriage could be eliminated by using a gender mainstreaming strategy. This paper will also dismantle the actors that support the ongoing practice of girl marriage. This paper is based on research conducted in poor villages in the province of East Java, namely in Sampang Regency and Ponorogo Regency. This study is a feminist perspective research with research subjects of parents, community leaders, formal leaders, and leaders of women's organizations. Data collection techniques used in the study were in depth interview technique on 20 informants and interviews using questionnaires on 200 respondents. This study shows that the practice of girl marriage is still supported by the respected informal leaders, mainly male leaders. Implementing gender mainstreaming strategy could reduce the practice of girl marriage in poor village since gender mainstreaming strategy is based on local wisdom. In addition, this gender mainstreaming strategy empowers women as agents of change, whose women are the 'victims' of the girl marriage.

Keywords:

girl marriage, gender mainstreaming strategy, feminist perspective

LAMPIRAN LUARAN PENELITIAN TAHUN PERTAMA DARI RENCANA DUA TAHUN

MODEL REKAYASA SOSIAL KEBIJAKAN PENCEGAHAN NIKAH DINI DI PROVINSI JAWA TIMUR



LAMPIRAN : INTERNATIONAL CONFERENCE SALATIGA

**The Committee of The 2nd International Conference
on Gender Equality and Ecological Justice (GE2J)
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

Jl. Diponegoro No. 52 - 60 Salatiga 50711 Jawa Tengah, Indonesia
☎ (+62)85712950836 or (+62)85641589193 ✉ psga-ge2j2017@adm.uksw.edu

No.	Issue	Date	Attachment
005/GE2J/V/2017	Letter of Acceptance	May 30, 2017	Review of Extended Abstract

Emy Susanti
Airlangga University
Surabaya

Dear Ms. Emy Susanti,

Herewith this letter, we would announce that your paper entitled:

"GIRL MARRIAGE AND THE TRAP OF POVERTY: A SOCIOLOGICAL STUDY ON SOCIAL REPRODUCTION OF UNEQUAL GENDER RELATIONS"

is selected to present on The 2nd International Conference on Gender Equality and Ecological Justice. The conference will be conducted on August 9, 2017 to August 12, 2017 at Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Central Java, Indonesia.

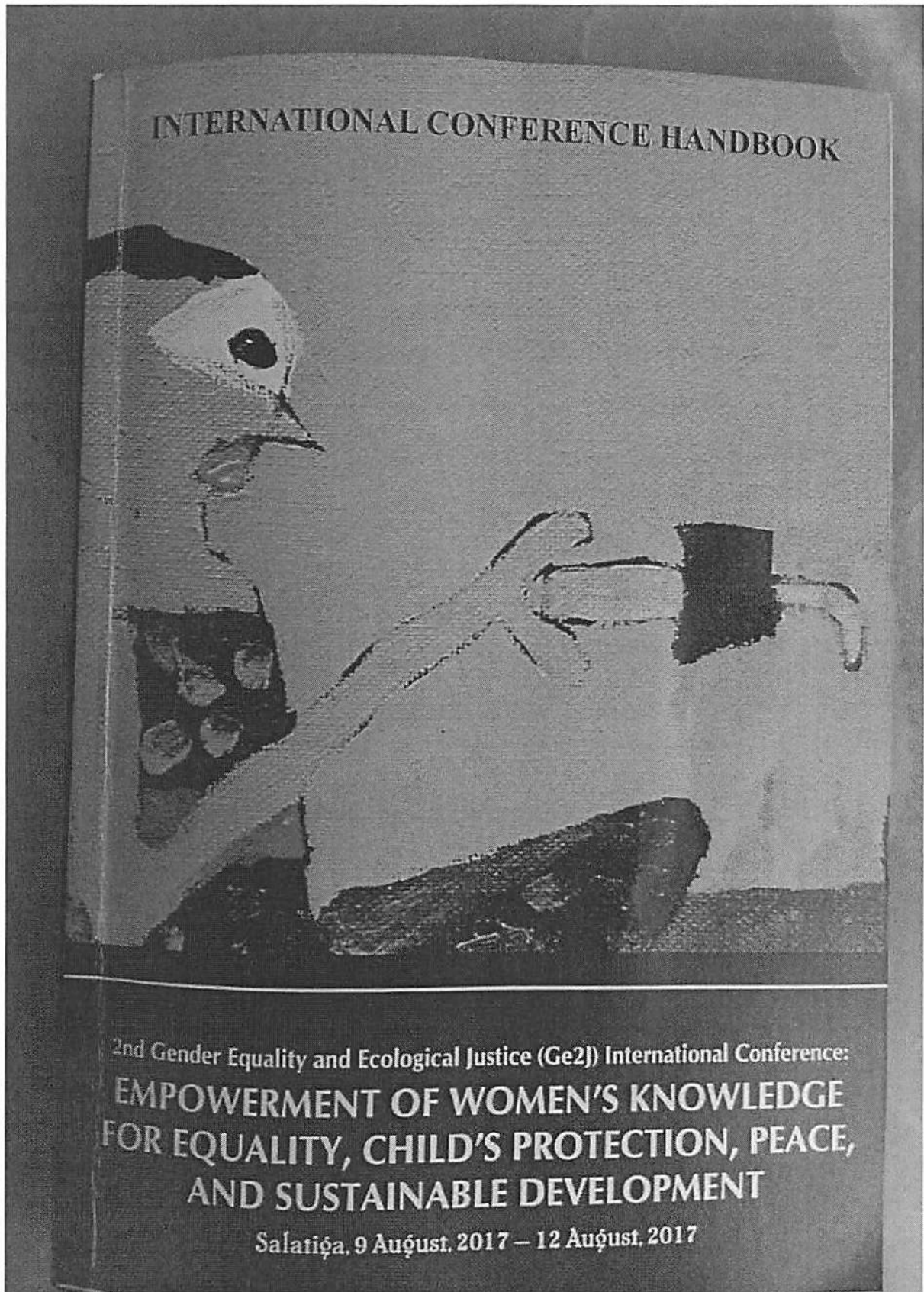
We would like to congratulate you for joining us in the conference. Please kindly send your full paper (consists of 6000 – 8000 words) to us before June 21, 2017. Regarding the payment, please send your payment in the amount of IDR 1,500,000 (for Indonesian) or USD 125 (for foreign presenter) to Bank Rakyat Indonesia (BRI) Salatiga. Please note the account number is 0081-01-022396-50-4, and Puslit Gender UKSW as the account holder. Transfer of payment is opened from June 20, 2017 to July 9, 2017.

Please note that in this conference, all communications and presentation should be done in English. Should you ask more information, please do not hesitate to contact the Secretariat team via the correspond email psga-ge2j2017@adm.uksw.edu and telephone numbers (Widhi Handayani: +62 857 1295 0836)

Kind regards,

The Committee of The 2nd GE2J

Dr. Ir. Arianti Ins Hunga, M.Si



**GIRL MARRIAGE AND THE TRAP OF POVERTY:
A SOCIOLOGICAL STUDY ON SOCIAL REPRODUCTION
OF UNEQUAL GENDER RELATIONS**

Emy Susanti

Universitas Airlangga, East Java, Indonesia
emy_susanti@yahoo.com

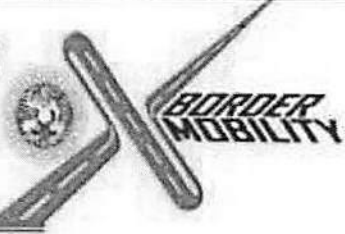
ABSTRACT

This article is based on a sociological study intended to reveal how the practice of girl marriage is not a way out but rather becomes the entrance to the trap of poverty. The study is also intended to examine how unequal gender-based power relationships in the practice of girl marriage are reproduced over time and harm the lives of girls. The study is more focused on the side of the girls as victims of early marriage, regardless of the age of the husbands. The study is a qualitative study based on a gender perspective and applies Feminist Methodology. The study was conducted in 4 (four) poor rural areas within the province of East Java with different cultural backgrounds, namely in Bangkalan and Sampang Regency with Madura culture, and Blitar and Ponorogo Regency with Javanese culture. The data collection used questionnaire techniques on 200 members of the Poor Community in the 4 areas of study. The in-depth interviews techniques of 40 informants were also used in this study, they were the women who were victims of early marriages, their husbands, biological mothers and fathers, and the community leaders. The result of the study shows that there have been practices of girl marriage for economic reasons but the impact is bad for the lives of girls who are married at a young age. For young married girls, they will actually suffer for the loss of rights as children. In summary, girl marriage is the path to poverty trap. This study also reveals that power relation between young wife with husband, parents and parent-in-laws is very unequal. The consequences of child marriage not only were felt at the individual level, but also have profound effected in the forms of lost earnings and intergenerational transmission of poverty. In this poor community, there have been reproductions of unequal gender-based power relations in the practices of girl marriage.

Lampiran : INTERNATIONAL CONFERENCE SURABAYA

THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN STUDIES

Faculty of Humanities, Universitas Airlangga
 Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, INDONESIA
 Email: urbanmobility@fib.unair.ac.id
 Website: fib.unair.ac.id/icus



October 17, 2017
 Subject: Letter of Acceptance

Dear Emy Susanti,

We are pleased to inform you that your abstract(s)

"GIRL MARRIAGE AND MARGINALIZATION OF WOMEN IN THE CITIES OF EAST JAVA"

Has been accepted in the 4th International Conference on urban Studies: Border and Mobility which will be held on December 8 – 9, 2017 in Surabaya.

As a presenter, You are required to submit the full paper no later than **November 8, 2017** and pay the conference fees no later than **November 30, 2017**.

The conference fees are as follows

INDONESIAN PARTICIPANTS	OVERSEAS PARTICIPANTS
Rp. 3.000.000 regular	USD 300 regular
Rp. 2.500.000 early bird	USD 250 early bird
Rp. 1.500.000 student regular	USD 250 student regular
Rp. 1.000.000 student early bird	USD 200 student early bird

**Early bird: October 27th 2017*

Please transfer your registration fee to the following account :

- Account Number : 142-00-1552438-1
- Swift Code : BMRIIDJAB51
- Bank Name : Bank Mandiri
- Account Holder: Border and Mobility Conference

Student participants are required to upload student ID along with proof of payment

Payment Confirmation and Full Paper Submission are required and available through official website <http://fib.unair.ac.id/icus/reg/>. Please refer to <http://fib.unair.ac.id/icus/index.php/paper/> for the general guidelines of full paper.

If you think you are seeing this by mistake, please contact us at helpdesk@fib.unair.ac.id

Best regards,

Program Committee

Lampiran : Artikel Ilmiah**GIRL MARRIAGE AND MARGINALIZATION OF WOMEN
IN THE CITIES OF EAST JAVA**

**Emy Susanti – Universitas Airlangga_Indonesia
(emy_susanti@yahoo.com)
Siti Masudah-Universitas Airlangga_Indonesia
(masudah@gmail.com)**

Abstract

This paper based on study focuses on how the practices of girl marriage encourage the process of marginalization of women. Using sociological analysis with a gender perspective, this study is also intended to examined how the practices of girl marriage harm the lives of young wives and their children. This study was conducted in 2 (two) cities of East Java Province, Indonesia with a different cultural back ground, namely Bangkalan District with Maduranese culture and Blitar District with Javanese culture. The subjects of the study were young wives, their husbands, parents, parents in law, neighbors and local community leaders. The data collection in the study were questionarre technique to 100 ts and indepth interview technique to 20 informants. Based on the study, this paper reveals the patriarchal hegemonic in the life of poor community who still practice early marriage. Women were marginalized for some reasons: a) women were in a subordinate positions in their family and community; b) women were in a poor condition life; c) women had no protection on their reproductive health. This paper argues taht girl marriage practices were not a religious issue but rather a gender issue.

(Keywords : Feminist Perspective, Gender, Girl Marriage, Poverty)

Introductory

Girl marriage practices are still happening in Indonesia although various policies and regulations severely limit these practices. Compared to other regions in Indonesia, the number of early marriages of girls in East Java Province is quite large. Indonesia Population Data Survey (IDHS, 2007) showed that marriage cases under age of 16 in East Java reached 39.4%. Meanwhile, one out of three women who were married in Java, married for the first time under 16, especially in West Java and East Java (about 40%).The research that has been done in Madura also shows that parents encourage girls to marry even though they are not yet 18 years of age and still go to school with the aim to ease the burden of the family economy (Susanti H., Emy: 2015).

This study is more focused on the side of the girls as a victims of early marriage, regardless of the age of the husbands. In early marriage, women bear more losses because they perceive and give birth. This study uses sociological analysis with a gender perspective to explain the mechanism of social reproduction of gender-based power relations that support the ongoing practices of girl marriages.

This paper based on a study focuses not only on the violations of Human Rights in women but is intended to reveal the vulnerability of women in the practices of early marriage. Using sociological analysis with a gender perspective, this study would like to examine how unequal gender-based power relationships in the practice of girl marriage are reproduced over time and harm the lives of girls. Particularly, the aim of the study was to reveal how girl marriage practices encourage the marginal position of women at any positions and status of women.

Research Methodology:

This study was a qualitative study complemented with quantitative data conducted on 2 (two) Cities in East Java Province, Indonesia. The two Cities have different cultural back ground, *Bangkalan* with *Madura* Culture and *Blitar* with *Javanese* culture. The subjects of the study were women who were victims of early marriages, their husbands, biological mothers and fathers, parents in law, neighbors and the community leaders. The data collection in the study used questionnaire techniques for 100 ts and in-depth interviews techniques for 20 informants.

Girl Marriage, Marginalization and Poverty: A Theoretical Framework

The theory of Poverty was apply in this study to explain how the reality of poverty continues in the community that initiates early marriage practices. The poverty is generally associated with deprivation of health, education, food, knowledge, influence over one's environment and the many other things that make the difference between truly living and merely surviving. There is another universal aspect of poverty, which makes it particularly painful and difficult to escape is: Vulnerability. The poor are more vulnerable than any other group to health hazards, economic downturns, natural catastrophes, and even man-made violence (Chambers, 2006).

Furthermore, since women are in a subordinate position, vulnerability among poor women is more pronounced. Meanwhile for poor people, social solidarity is one of the most important assets available to them. To maintain this solidarity and the emotional and physical security it provides, people are willing to make considerable sacrifices and will readily divest themselves of a wide range of material assets to ensure that these social bonds are preserved. Thus, after the most basic needs such as food and housing are met, the largest household expenditures tend to be on traditional ceremonies.

The discussion of cultural bonds and gender relations can not be separated from power relations analysis. The Liberal theories of power understand power as repressive and suggest that power is viewed as something that can be acquired, like a commodity, and can be exchanged from one person to another through a contractual act. Meanwhile, Foucault seeks a non-economist analysis of power and states that the analysis of power should not be concerned with power in its central location, but rather in its extremities where power overcomes the rules of right. Foucault questions how power is embodied in the institutions at a local and regional level. Foucault argues that power should no longer be viewed as a force exercised from above based on universal right but rather we should concern ourselves with where the exercise of power becomes less (Foucault, 2003).

In order to understand the mechanisms of power Foucault establishes two limits; the first relates to the rules of right that formally delimit power and the second relates to the effects of truth or knowledge produced and transmitted by power, and which in turn reproduce this power. Therefore, Foucault states there was a triangle of power, right and knowledge (Foucault, 2003). Using Foucault's theory, gender-based power relations must be understood by revealing how a triangle of power, right and knowledge takes place in the lives of poor communities.

Results and Discussion

The results of this study found the fact that marriage of girls under the age of 18 years old is common and even in the ethnic community of Madura, girl marriage is considered as a tradition. A

girl, when they have menstruated or graduated from elementary school, usually will soon be forced to marry by her parents. The results of this study indicate that majority of girls in the Regency of Bangkalan and Blitar are married at the age of 11-14 years old.

Table 1:
The Age of Wives for First Time Marriage

No.	Age	Bangkalan Regency		Blitar Regency	
		F	%	F	%
1.	11 years old	8	16)	20
2.	12 years old	2	24)	20
3.	13 years old	8	16	9	18
4.	14 years old	9	18	5	10
5.	15 years old	3	6	9	18
6.	16 years old	6	12	1	2
7.	17 years old	2	4	3	6
8.	18 years old	2	4	3	6
	Total	50	100	50	100

Most people in this Poor Communities saw the practice of girl marriages would reduce the economic burden of the family. Some of the mothers of girls who married before 14 years old revealed that her family did not have the cost to continue her school. For this poor community, marrying girls at a young age / under the age of 18 is considered to help the economic condition of their family.

The results of this study also show that the practice of girl marriage actually exacerbates poverty. Girls are shackled in domestic duties and parenting so it is not possible to engage in productive activities. A woman who engages in a young age marriage tells that before married, she helps her parents work in the fields and earn some income. After marriage, they can no longer work in the rice fields, while money from their husbands is very limited and not always enough to buy milk and supplementary food for their toddler children. This fact shows that girls who are married early become 'victims' and instead enter into the trap of endless poverty.

Within her marital household, a young wife has little bargaining power and ability to make decisions regarding various aspects of her life. Husbands and mother-in-laws largely determine her role in the family and control her access to and participation in the outside world. This often remains the case throughout her marriage and translates to weaker control over resources in her household, tighter constraints on her time, more restricted access to information and health services, and poorer health, including mental health, self-confidence, and self-esteem than women who marry later. A young Javanese wife described the condition as follows;

"There is a difference condition ... I think ... I am very busy now. I have to take care of all tasks. I take care of it alone. Take care of children, take care of husbands, also take care of rice fields with this grandmother (grandmother-in-law)" (Mrs Ta, 17 years old, Young Wife)

This lack of power and decision-making autonomy have a significant influence on economic decisions. Where women have decision-making power and their priorities are reflected in how household resources are allocated, household expenditures on key areas such as education and health tend to be higher.

Table 2:
Occupations of Husbands

No.	Occupations	Bangkalan Regency		Blitar Regency	
		F	%	f	%
1.	Peasant	12	24	16	32
2.	Small Trader	6	12	3	6
3.	Factory Worker	2	4	6	12
4.	Driver	3	6	8	16
5.	Migrant Worker	4	8	6	12
6.	Motorcycle Taxi Driver	7	14	7	14
7.	Construction Worker	11	22	4	8
8.	Not Working in the Last 3 Months	5	10	0	0
	Total	50	100	50	100

From the internal poverty approach, this study shows that the poor communities often meet various needs but lack adequate capacity to manage minimal resources (skills and level of education). While from the approach of extreme poverty, this study shows that the communities experience poverty since several generations before. The study also shows that there is no specific policy that provides opportunities for the poor (Chambers, Robert: 1987).

The girls in the practices of early marriage indicates a condition of marginalization in economic, social, cultural and political. Marginalization among poor women is more pronounced because women are in a subordinate position in the gender relations. Unequal gender relation is supported by cultural norms in the community. Therefore the number of poor women is getting bigger from time to time. These symptoms are referred to as symptoms of feminization of poverty among women who married at a young age. Married girls are getting worse in prolonged economic and social poverty conditions. Girls' marriages encourage girls to be trapped in poverty.

This study shows that in an early marriage household, a young wife lacks the bargaining position to make decisions about various aspects of her life. Power relations within the household were unequal where power is in the husband. In addition, power also exists in the in-laws in determining family life because in-laws controlling access to the outside world. Weak controls over household resources, more limited access to health information and services, and worse health, including mental health, self-confidence, and self-esteem. Compared to women who married in adulthood.

Early marriage is associated with early childbearing, short birth spacing, and higher number of children. Furthermore, the traditional gender norms that typically accompany child marriage, coupled with relatively low returns to participation in the formal workforce, lower the opportunity cost of not working for women and their households, further reducing the likelihood of participation. Marriage of these girls is usually in order to fulfill the gender values in the community where the status of the widow is considered much more honorable than the unmarried status which is often interpreted as 'not married' or 'spinster' for girls. Gender values treat differently between boys and girls. As told by a mother of young wife

"... 20 years old girl has been spelled out as an old maiden, but in contrast if the man has not been married is okay most people thought he want the work established first.

But if women have not been marriedthey have been always a victim of mocks " (Mrs. An, 45 years old, Mother of Young Wife)

When girls are married early, their educational trajectory is altered. Formal schooling and education often cease, which means they stop acquiring knowledge and skills that would carry them through life, including as productive members of their households and communities. They are also removed from the social network and support

Because of the low level of education, married girls are often not considered by their husbands and parents-in-law as being incapable of making money and / or managing finances or making financial decisions for households. Married girls who work less have control over their income. Isolation from schools, friends, and the workplace hampers their access to social support that is critical to their emotional well-being, and limits their access to social capital and networks that can increase their earning potential and productive income use and in many cases are unable to speak against The physical or emotional abuse they experience at the hands of their husbands or in-laws in their own homes.

A girl has voice and agency when she can make decisions about her life and act on those decisions without fear of retribution or violence. Related closely to lack of voice and agency, and rooted in gender inequality, is alienation from participation and decision-making about issues in one's own life, as well as those facing a household, family, or community. Child brides often experience overlapping vulnerabilities—they are young, often poor, and undereducated. This affects the resources and assets they can bring into their marital household, thus reducing their decision-making ability. Child marriage places a girl under the control of her husband and often in-laws, limiting her ability to voice her opinions and form and pursue her own plans and aspirations.

This study found unequal power relation between young wife with husband, parents and in-laws. These unequal gender values are continuously reproduced as if they do not consider the 'harm' to the girls' life. Using Foucault's theory, gender-based power relations must be understood by revealing how a triangle of power, right and knowledge takes place in the lives of poor communities. It is clear that the power relates to the rules of right that formally delimit power and the effects of truth or knowledge produced and transmitted by power, and which in turn reproduce this power.

Conclusion

The result of the study shows the impact of girl marriage practices is bad for the lives of girls and also their children. The consequences of child marriage were also have profound effected in the forms of lost earnings and intergenerational transmission of patriarchal and poverty system.

Based on the study, this paper argues that women were marginalized for some reasons: a) women were in subordinate positions in their family and community; b) women were in poor condition of life; c) women had no protection on their reproductive health. Girl marriage practices were not a religious matters / issues but more gender issues. The patriarchal as social norms and as a system was hemonized the gender relations in the family and community.

This study also reveals that power relation between young wife with husband, parents and in-laws is very unequal. The consequences of child marriage are felt most keenly at the individual level, child marriage is likely to also have profound and far-reaching effects at national and global levels in the

forms of lost earnings and intergenerational transmission of poverty. The economic impacts and cost of child marriage are likely to be very high for the girls who marry early, their children, their families, their communities, and society at large. However, the unequal gender-based power relations reproduced in the practices of girl marriage in the poor communities. Gender-based power is concerned with rights that limit the power and effects of knowledge generated and transmitted through power and which in turn reproduce this power.

REFERENCE

- Chambers, Robert. 2006. –Poverty Unperceived: Traps, Biases and Agende. Working Paper University of Sussex.
- Field, E., and A. Ambrus. 2008. –Early Marriage, Age of Menarche, and Female Schooling Attainment in Bangladesh. *Journal of Political Economy* 116 (5): 881–930. doi: 10.1086/593333
- Foucault, Michel. 2002. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan* (diterjemahkan dari *Power/Knowledge*. Sussex: The Harvester Press). Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Gemignani, R. and Q. Wodon 2015. –Child Marriage and Faith Affiliation in Sub-Saharan Africa: Stylized Facts and Heterogeneity. *The Review of Faith & International Affairs*, 13 (3): 14–47.
- Jain, S., and K. Kurz. 2007. *New Insights on Preventing Child Marriage: A Global Analysis of Factors and Programs*. Washington, DC: ICRW.
- Susanti H., Emy. 2007. *Ketimpangan Gender dan Ketidakberdayaan Perempuan Miskin Perkotaan (Gender Inequality and Vulnerability of Poor Women in the Cities)*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Susanti H., Emy. 2009. *Perempuan Miskin dan Makna Sosial Kemiskinan*. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. Tahun XXII, Nomor 4, Oktober-Desember 2009.
- Susanti H., Emy. 2013. *Kajian Keluarga Miskin dan Perangkap Kemiskinan di Perkotaan (A Poor Families and The Trap of Poverty in the Cities)*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Karam, A. 2015. –Faith-inspired Initiatives to Tackle the Social Determinants of Child Marriage. *The Review of Faith & International Affairs*, 13 (3): 59–68.
- Khanna, T., R. Verma, and E. Weiss. 2013. *Child Marriage in South Asia: Realities, Responses and the Way Forward*. Bangkok: UNFPA Asia Pacific Regional Office.
- Klugman, J., L. Hanmer, S. Twigg, T. Hasan, and J. McCleary-Sills. 2014. *Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity*. Washington, DC: The World Bank.
- Koblinsky, M., M. E. Chowdhury, A. Moran, and C. Ronsmans. 2012. –Maternal Morbidity and Disability and their Consequences: Neglected Agenda in Maternal Health. *Journal of Health, Population, and Nutrition* 30 (2): 124–0. doi: 10.3329/jhpn.v30i2.11294
- Nguyen, M. C., and Q. Wodon. 2015a (forthcoming). –Impact of Early Marriage on Literacy and Education Attainment in Africa. In *Child Marriage and Education in Sub-Saharan Africa*, edited by Q. Wodon. Washington, DC: World Bank.
- Nour, N. W. 2009. –Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue. *Review of Obstetric Gynecology* 2 (1): 51–56.
- Plan UK. 2011. *Breaking Vows: Early and Forced Marriage and Girls' Education*. London: Plan UK.

Lampiran : BUKTI SUBMIT JURNAL INTERNATIONAL



📧 📧 📧 ... 📶 90% 🕒 4:18 PM

< ^ v ⋮

Re: Girl Marriage_Emy Susanti_Airlangga Univ_Indonesia ☆

October 15, 2017 3:07 AM

From: Qualitative Sociology Review HIDE

To: Emy Susanti

SAVE AS GROUP

Thank you for submitting your article to QSR.

I'll get back to you as soon as I receive the initial comments on your paper.

Kind regards,
Magda Wojciechowska

2017-10-13 17:19 GMT+02:00 Emy Susanti <emy_susanti@yahoo.com>:

↩
Reply

📧
Reply all

→
Forward

🗑
Delete

🗨
Thread



*Lampiran : JURNAL UNTUK PUBLIKASI INTERNASIONAL***GIRL MARRIAGE AND THE TRAP OF POVERTY: A SOCIOLOGICAL STUDY ON SOCIAL REPRODUCTION OF UNEQUAL GENDER RELATIONS****Emy Susanti****Airlangga University - emy_susanti@yahoo.com****Abstract**

This paper is based on a sociological study intended to reveal how the practice of girl marriage is not a way out but rather becomes the entrance to the trap of poverty. The study is also examine how unequal gender-based power relationships in the practice of girl marriage are reproduced over time and harm the lives of girls. The study is more focused on the side of the girls as a victims of early marriage, regardless of the age of the husbands. The study is a qualitative study completed with quantitative data based on gender perspective and applies Feminist methodology. The study was conducted in 2 (two) poor rural areas within the province of East Java, Indonesia, namely Kebonsareh Village in Sampang Regency with Madura culture and Sidoharjo Village in Ponorogo Regency with Javanese culture. The subjects of the study were women who were victims of early marriages, their husbands, biological mothers and fathers, parents in law, neighbors and the community leaders. The data collection in the study used questionnaire techniques on 200 people in the Poor Villages and in-depth interviews techniques of 20 informants. The result of the study shows that there has been practices of girl marriage for economic reasons but the impact is bad for the lives of girls who are married at a young age. This study also reveals the consequences of child marriage not only were felt at the individual level, but also have profound effected in the forms of lost earnings and inter generational transmission of poverty. In this poor community, there have been a reproduction of unequal gender-based power relations in the practices of girl marriage. In summary, girl marriage is the path to poverty trap.

Keywords : *Girl Marriage, Poverty, Gender*

1. Introductory:

Girl marriage practices are a violation of Human Rights, primarily Human Rights for children and women (see also Raj A. 2010). The aims of this study is not only analyzes the violations of Human Rights in girls but is intended to reveal how the practice of girl marriage becomes the entrance to the trap of poverty and not as a way out of poverty. Using sociological analysis with a gender perspective, this study would like to examine how unequal gender-based power relationships in the practice of girl marriage are reproduced over time and harm the lives of girls. This study is based on the fact that there are still practices in girl marriages, although various policies and regulations severely limit these practices in Indonesia. In some areas of East Java province, even though the level of education is progressing and Government

policy has restricted the practice of girl marriage, the tendency of girls marry at an early age remains to this day.

Previous studies in Indonesia, Africa, America and South Asia Countries shows that parents encourage girls to marry even though they are not yet 18 years of age and still go to school with the aim to ease the burden of the family economy (Susanti H., E. 2012; Nguyen & Wodon in Wodon ed. 2015; Le Strat & Dubertret, 2011; Khanna et al, 2013). Furthermore, Indonesia Population Data Survey showed that marriage cases under age of 16 in East Java reached 39.4%. In rural areas, marriage is often done as soon as a girl gets her first period. Meanwhile, data from Indonesia Statistical Institution (BPS. 1997) states that one out of three women who were married in Java, married for the first time under 16 years' old, especially in West Java

and East Java (about 40%) and this condition is still happening.

In contrast to previous studies focusing on regulatory, policy, economic, cultural and health factors, this study aims for a deeper analysis of girl marriage to reveal how the practice of early marriages actually resulted in girls, women and children fall into the 'trap' of poverty. This study is more focused on the side of the girls as a victims of early marriage, regardless of the age of the husbands. In early marriage, women bear more losses because they perceive and give birth. This study uses sociological analysis with a gender perspective to explain the mechanism of social reproduction of gender-based power relations that support the ongoing practices of girl marriages.

This study is intended to reveal issues as follows; (1) How girl marriage practices encourage girls, women and their children into poverty traps? (2) How are the unequal gender-based power relations reproduced in the practices of girl marriage in the poor communities?

2. Research Methodology:

This study is a qualitative study based on a gender perspective and applies Feminist Methodology where gender issues become the mainstream of the study. This study was conducted in 2 (two) Districts within the province of East Java, Indonesia, with different cultural backgrounds, namely in Sampang Regency with Madura culture, and Ponorogo Regency with Javanese culture. The study focused on two poor villages in East Java Province, namely Sidoharjo Village in Ponorogo Regency and Kebunsareh Village in Sampang Regency, the Villages where in until now still encountered the practices of girl marriages.

The subjects and informants of this study were girls and women who were victims of early marriage (married before 18 years old), members of extended families, husbands and community leaders. The data collection used questionnaire techniques on 200 members of community in the 2 areas of study. The in-depth interviews techniques on 20 informants

also used in this study, there were the women who were victims of early marriages, their husbands, biological mothers and fathers, parent in law and the community leaders. Data analysis using qualitative analysis technique based on transcripts from the results of in-depth interviews and tables with the percentage of data from questionnaires.

3. Gender-Based Power Relations and Poverty: A Theoretical Framework

This study uses the framework of Poverty theory to explain how the reality of poverty continues in the community that initiates early marriage practices. In this study the Theory of Power Relations of Foucault is also used to understand and reveal gender-based power relations in the practice of girl marriage. Poverty is also characterized by a state of inadequacy or inability to meet the level of basic human needs. Poverty includes the non- fulfillment of basic needs that include both primary and secondary aspects. Primary aspects of poor knowledge and skill assets, while secondary aspects of poor social networks, financial resources and informal resources, such as malnutrition, water, housing, poor health care and relatively low education.

The poverty is generally associated with deprivation of health, education, food, knowledge, influence over one's environment and the many other things that make the difference between truly living and merely surviving. There is another universal aspect of poverty, which makes it particularly painful and difficult to escape is: Vulnerability. The poor are more vulnerable than any other group to health hazards, economic down-turns, natural catastrophes, and even man-made violence (Chambers, 2006).

Furthermore, since women are in a subordinate position, vulnerability among poor women is more pronounced. Meanwhile for poor people, social solidarity is one of the most important assets available to them. To maintain this solidarity and the emotional and physical security it provides, people are willing to make considerable sacrifices and will readily divest themselves of a wide range of material assets to ensure that these social bonds are preserved. Thus, after the most basic

needs such as food and housing are met, the largest household expenditures tend to be on traditional ceremonies.

The discussion of cultural bonds and gender relations can not be separated from power relations analysis. The Liberal theories of power understand power as repressive and suggest that power is viewed as something that can be acquired, like a commodity, and can be exchanged from one person to another through a contractual act. Meanwhile, Foucault (Foucault, M. 2002) seeks a non-economist analysis of power and states that the analysis of power should not be concerned with power in its central location, but rather in its extremities where power overcomes the rules of right. Foucault questions how power is embodied in the institutions at a local and regional level. Foucault argues that power should no longer be viewed as a force exercised from above based on universal right but rather we should concern ourselves with where the exercise of power becomes less. Foucault states there was a triangle of power, right and knowledge. Using Foucault theory, gender-based power relations must be understood by revealing how a triangle of power, right and knowledge takes place in the

lives of poor communities (Foucault, M. 2002).

4. Characteristics of Wives and Husbands in Early Marriage

Poverty is characterized by a state of inadequacy or inability to meet the level of basic human needs, including primary and secondary aspects. Primary aspects of poverty are indicated by knowledge and skill assets, while secondary aspects of poverty are indicated by social networks, financial resources and informal resources. The subject of this study were wives and husbands in the poor community age 21 year's old to 60 year's old. The study shows that some of them (wives 25% and husbands 19,5%) were only 20 year's old or less (source: primary data), meaning that they were just marriage.

Meanwhile, the following data describes the life of the poor community in which the early marriage took place. The result of the study (table 1) indicates clearly the characteristics of poverty as can be seen from the educational level and types of occupation of wives and husbands. Educational level in this study has been categorized into four categories described in table 1 below;

Table 1
Educational Levels of Wives and Husbands of Early Marriage

No.	Level of Education	Wives (f)	(%)	Husbands (f)	(%)
1.	Drop Out from Primary School	69	34.5	41	20.5
2.	Primary School	69	34.5	60	30.0
3.	Secondary School	34	17.0	66	33.0
4.	High School	28	14.0	33	16.5
	Total	200	100	200	100

Source: Primary Data 2017

Overall, the level of education in the poor community were low as indicated from the table above. Only 14.0% of wives and 16.5% of husbands have been finished their high school. Moreover, around one third of them (the wives and the husbands) never finished the primary school. Comparing the educational levels of wives and husbands of early

marriage, there was a different levels in which educational levels of the husbands were higher than the wives. Those who were not finished their Primary School was bigger among the wives compare to the husbands (34.5 % of wives compare to 20.5 % of husbands).

In the Poor Villages, all members of the families have to work in order to get money

for living. The study imply that almost all women of early marriage work outside the home to earn a living, only few women work

as housewives (20%) and did not earn any money. Besides, 7.5% of the husbands had no job or unemployed during the last six months.

Table 2
Occupational Types of Wives and Husbands of Early Marriage

No.	Types of Occupation	Wives (f)	(%)	Husbands (f)	(%)
1.	Peasant	60	30.0	52	26.5
2.	Self Employed	40	20.0	48	24.0
3.	Manufacturing Worker	12	6.0	13	6.5
4.	Small Shop Business	19	9.5	2	1.0
5.	Domestic Worker (including Part time Domestic Worker)	24	12	0	0
6.	International Migrant Worker	5	2.5	14	7.0
7.	Taxibike	0	0	28	14
8.	Driver	0	0	28	14
9.	House Wife	40	20.0	0	0
10.	Unemployed (during the last 6 months)	0	0	15	7.5
	Total	200	100	200	100

Source: Primary Data 2017

As shown from the table 2 above, the occupational types of the wives and the husbands were categorized as low level occupation with small salary. After marriage, the young wives continued working for a living. Even as seen from table 2, some of their husbands were unemployed so that the wives were the only one have to earn for living. This means that for the young wives, the economic condition after marriage was not increase, even worse. In summary, the level of education and the types of occupation were indicated that these early marriage couple were living in poverty level.

The results of this study found the fact that girls married under the age of 18 year's old is common and girl marriage is considered as a tradition. A girl, when they have menstruated or graduated from elementary school, usually will soon be forced to marry by her parents. The results of this study indicate that girls in the village are married when they

were very young, they were married at the age of 11-17 years' old. Moreover, almost half of them married before 14 year's old; 19.5% married at the age of 11-12 years' old and 28% married at the age of 13-14 year's old (source: primary data).

Furthermore, the result of the study shows that though they were poor, they tend to marry at an early age. There was no significant difference characteristics of wives and husbands of early marriage between those in Sampang Regency with 'Madura' cultural background in one side and those in Ponorogo Regency with 'Javanese' cultural background on the other side.

5. Girl Marriage becomes the Path to Poverty Trap

The practice of girl marriages among poor families is assumed to reduce the economic burden of the family. Some of the mothers of

girls who married before 18 years old revealed that her family did not have the cost to continue her school. For this poor rural community, marrying girls at a young age / under the age of 18 is considered to help the economic condition of their family.

People in the Poor community saw early marriage as a way out from the poverty

condition. This can be seen in the data of *mahar* (a gift of marriage) which have been given to the bride from the groom. Besides a set of prayer tools, it can be said that all the young brides got a valuable gift of marriage (*mahar*) such as money, jewelry, property or small house (see table no 3).

Table 3
Mahar (A Gift of Marriage) for Women

No.	Types of <i>Mahar</i>	f	(%)
1.	Money	144	72.0
2.	A Set of Prayer Tools	83	41.5
3.	Jewelry	22	11.0
4.	Property	18	9.0
5.	House	16	8.0
	Total	200	100

Source: Primary Data 2017

However, these *mahar* were only last for a short time because almost all the husbands could not meet the needs of families expenditure when they already have children. Even, in the poor community, having a job for man was not the precondition for marriage. A Head of Village in Sampang Regency explained that “Men do not need to have job.... there is no requirement of marriage to have job first ...cause marriage is not a sin....” (Mr. Amin, head of Village in Sampang Regency).

Early marriage in this poor community was considered as good for the family. The parents tend to accept marriage proposal for their young daughter in order to meet the cultural norms and to reduce family burden. However, the result of this study reveals that there was no improvement of their family's life. Even, new couples add to the burden of the young wife's family. One young wife said that she was not worried when their family's needs have not been met from their income because she could ask for help from her parents. This is a common thing in this poor

community and the parents will help them even though the economic condition of parents is also limited. As conveyed follows;

“... when I need money ... I ask my parents and my parents will definitely help us. I am still get some rice from my parent each harvest time So I'm not worried ”
(Mrs Rin, 25 year's old in Ponorogo Regency).

Although people saw early marriage as a way out from the poor condition, the condition of household is still the same as indicate from the data. After marriage, most of the young wives live in their parent's houses. This study showed that 59% of the wives lived in the parent's houses after marriage. This means that the early marriages increased the burden of the wife's family. This study revealed that early marriage in this poor community was fully supported by the parents and the community. A mother of young wife told as follows;

"I was worried even if my daughter lives far away from me but her husband can not fulfill her daily needs. For me, it is important to eat three times a day for my grandchildrens" (Mrs An, 54 year"s old in Ponorogo Regency)

Further looking at the results of this study indicate that the household's expenditures

managed by the young wife can be said relatively small. As shown from the table below, most of the household's expenditures managed by the wives was less than IDR 1,000,000. Per month (68%). Only 8% of the household's expenditures managed by the wives was more than IDR 1,500,000 till IDR 2,000,000per month (see table no. 4).

Table 4
Household's Expenditure managed by the Wives of Early Marriage (per month)

No.	Jumlah (in IDR)	F	%
1.	<IDR 500,000 (= US\$ 40)	52	26.5
2.	IDR 500,001- IDR1,000,000 (= US\$ 40 - US\$ 80)	83	41.5
3.	IDR 1,000,001- IDR 1,500,000 (-US\$ 80 - US\$ 120)	49	24.5
4.	IDR 1,500,000 – IDR 2,000,000 (=US\$ 120 - US\$ 160)	16	8.0
	Total	200	100

Source: Primary Data 2017

Compare to Standard of Living in East Java Province which was averages IDR 3,000,000 (equivalent to US\$ 160) or 3 times of their expenditures, this indicates that the early marriage women were still living in a Poor condition after marriage. There was no significant difference of the expenditure managed by the young wives in Sampang Regency and Ponorogo Regency. Basically, the expenditure managed by the young wives was not enough to cover their children needs.

The practice of girl marriage in the poor communities is regarded as an outlet for poverty. Nevertheless, the results of this study show that the practice of girl marriage actually exacerbates poverty. Girls are shackled in domestic duties and parenting so it is not possible to engage in productive activities. A woman who engages in a young age marriage tells that before married, she helps her parents work in the fields and earn some income. After marriage, they can no longer work in the rice fields, while money from their husbands is very limited and not always enough to buy milk and supplementary food for their toddler

children. This fact shows that girls who are married early become 'victims' and instead enter into the trap of endless poverty.

Within her marital household, a young wife has little bargaining power and ability to make decisions regarding various aspects of her life. Husbands and mother in-laws largely determine her role in the family and control her access to and participation in the outside world. This often remains the case throughout her marriage and translates to weaker control over resources in her household, tighter constraints on her time, more restricted access to information and health services, and poorer health, including mental health, self-confidence, and self-esteem than women who marry later.

This lack of power and decision-making autonomy have a significant influence on economic decisions. Where women have decision-making power and their priorities are reflected in how household resources are allocated, household expenditures on key areas such as education and health tend to be higher. The economic impacts of girls' reduced educational attainment can be measured in

terms of reduced earnings and productivity. Depriving a girl of the opportunity to learn limits her prospects for employment and her ability to gain useful skills. Because economic life in early marriage families is very limited, then after marriage they can never help their parents in the economic field. So the assumption that early marriage can help the family economy is right. The study imply assistance and loan given by majority of parents revolves around the fulfillment of primary needs, namely in the form of basic needs(70%). A small minority (30%) who received money from their parents to meet their children's schooling needs (source: primary data).

From the internal poverty approach, this study shows that the poor communities often meet various needs but lack adequate capacity to manage minimal resources (skills and level of education). While from the approach of extreme poverty (Chambers, R. 2006), this study shows that the communities experience poverty since several generations before. The study also shows that there is no specific policy that provides opportunities for the poor. For the poor community, early marriage for girls considered as a way out of their poverty conditions. In addition, because girls are considered not good if not married at the age of 20 years, then they follow the social-cultural norms to avoid social sanctions. Members of the community follow the social-cultural norms to marry off girls at a young age despite the fact that early marriage do not increase their welfare and are even helped by their parents to fulfill their daily lives. Poor communities always try to maintain social solidarity in their lives.

This poor community indicates a condition of vulnerability in economic, social, cultural, political and environmental. Furthermore, vulnerability among poor women is more pronounced because women are in a subordinate position in gender relations. Unequal gender relation is supported by cultural norms in the community. Therefore the number of poor women is getting bigger from time to time. These symptoms are referred to as symptoms of feminization of poverty among women who married at a young age. Married girls are getting worse in prolonged economic and social poverty conditions. Early marriages encourage girls to trap in poverty.

6. The Social Reproduction of Unequal Gender-Based Power Relations

The results of this study indicate that the social implications of girl marriages are complex. This study shows that in an early marriage household, a young wife lacks the bargaining position to make decisions about various aspects of her life. Power relations within the household were unequal where power is in the husband. In addition, power also exists in the in-laws in determining family life because in-laws controlling access to the outside world. Weak controls over household resources, more limited access to health information and services, and worse health, including mental health, self-confidence, and self-esteem. Compared to women who married in adulthood.

For example when a young girl refuse to be married by a man surely all of the people in this Village will say that the girl will never be married by anyone No one wants to marry her.... Later if the male family does not accept the rejection, they may send a black magic or witches and the girl become sick and stress And that will be ashamed of itself. So here if you are appealed to people should be accepted so there is no such event. (Mrs. Sumirah, 64 years old, Sampang Regency)

The results of this study indicate that girls in the village are married at the age of 11-17 years' old. Their mothers and their sisters also married when they were young girls, even majority of their mothers and sisters were married at age of 11-13 years' old. A mother of 16 years' old girl who just married states as follows:

"When your daughter have a husband it's good, he will take care of her ... Yeah When She wants to go, she wants to do anything, there's already her husband who accompany her it is her husband's responsibility there is someone as bread winner.... this happen because I'm not able to send her to school. Yeah if her father still alive ... he is the bread winner So when she's now

married she's not so dependent on my family anymore ...".(Mrs Rub, 40 years' old, mother of 16 year's old married girl)

Early marriage is associated with early childbearing, short birth spacing, and higher number of children. Furthermore, the traditional gender norms that typically accompany child marriage, coupled with relatively low returns to participation in the formal workforce, lower the opportunity cost of not working for women and their households, further reducing the likelihood of participation.

" certainly from the time of my great-grandmother, a girl married at a young age.... My mother, my grandmother, my great-grandfather.... My mother was married at age 13year's old,she was not even know herhusband before marriage if you refuse the marriage's proposal people here believe that refusing applications from men will be abstinence (Mrs Sum, 64year's old in Sampang Regency).

Marriage of these girls was usually in order to fulfill the gender values in the community where the status of the widow is considered much more honorable than the unmarried status which is often interpreted as 'not married' or 'spinster' for girls. Gender values treat differently between boys and girls.

The social meaning behind the practices of girl marriage was not a Religion issue. The result of the study shows that social meaning of early marriage for the majority of the young wives was due to cultural reasons (73%), only 16% girl marriages for Religion reasons (source: primary data). When girls are married early, their educational trajectory is altered. Formal schooling and education often cease, which means they stop acquiring knowledge and skills that would carry them through life, including as productive members of their households and communities. In this poor community, the girls had no choice and had to obey to their parents and the social norms. As stated by the informal leader as follows:

".... We believe that marriage is a sacred thing. If it had been proposed at least the male family was comfortable with the female family. If it is rejected it can be a quarrel until the next descendant to the end even though the offspring. And there will not be one of the family will marry her until its next generations" (Mr. Fud, 56 year's old in Sampang Regency)

According to some girls who were married at an early age, they were not asked her opinion about married couples, wedding time and various things related to the wedding ritual. Girls 'must' obey to biased gender values and girls are considered as 'objects' rather than marital subjects. Gender values that underpin unequal gender relationships between men and women are continuously reproduced from generation to generation.

"From the time of my great-grandmother, married at young age is common in our Villagemy mother, my grandmother, my great-grandmother. My mother married at age 13, and it wasmarriage through matchmaking People here believe that reject the application of the man was abstinence so here if you are appealed to people should be accepted to avoid any unexpected bad consequences"(Mrs Sum, 54 years Old, a mother of Young Wife, Ponorogo Regency).

Because of the low level of education, married girls are often not considered by their husbands and parents-in-law as being incapable of making money and / or managing finances or making financial decisions for households. Married girls who work less have control over their income. Isolation from schools, friends, and the workplace hampers their access to social support that is critical to their emotional well-being, and limits their access to social capital and networks that can increase their earning potential and productive income use and in many cases are unable to speak against the physical or emotional abuse they experience at the hands of their husbands or in-laws in their own homes.

The result of the study shows that no young wives of early marriage knew about the regulations that prohibit early marriage. Even, the result of this study revealed that people in this poor community saw the issue of age in the marriage was the issue of Government only. An informal leader told as follows;

"Actually marriage is not seen from the age of it As long as the man is ready to marry it is not a problem... the important thing again is the already „baligh“ (got menstruation) ... here the issue of age I think ... is the government's issue.... cause according to the religion rulesit is not a problem so ... the important thing is religious rules" (Mr Has, 62 year's old in Sampang Regency)

In this poor community, a girl has no voice and she can not make decisions about her life and act on those decisions without fear of violence. Related closely to lack of voice and agency, and rooted in gender inequality, is alienation from participation and decision-making about issues in one's own life, as well as those facing a household, family, or community. Young Wives often experience overlapping vulnerabilities—they are young, often poor, and undereducated. This affects the resources and assets they can bring into their marital household, thus reducing their decision-making ability.

This study shows that child marriage places a girl's life under the control of her husband and often of their parent in-laws, limiting her ability to voice her opinions and form and pursue her own plans and aspirations. Using Foucault theory (Foucault, 2002), this study proves that people will use greater power in their own lives through sufficient knowledge of sexuality. Power is shown as a power that is not only focused on who is in power and who is dominated in economic scope, but power in the wider field. In Foucault thought, power relations are not just power on the side of the organization or the binding structure alone, but also with respect to the mastery of the body and the mastery of behaviors capable of eliciting dominance in the household.

6. Conclusion

There has been practices of girl marriage for economic reasons but the impact is bad for the lives of girls who are married at a young age. For young married girls, they will actually suffer for the loss of rights as children. Married status with multi burden of domestic obligations, would be limited the opportunity to get a life in accordance with her ideals. A married girl is vulnerable to being violated as a child because legally in Indonesia a married girl is no longer categorized as a child. Thus, potential girls become worse off after marriage at a young age because they are bound in marriage and perform domestic duties and can not attend school.

This study also reveals that power relation between young wife with husband, parents and parent in-laws is unequal. Even, some of the married girl have to work for living as the bread winner. The economic impacts of child marriage are likely to be very high for the girls who marry early rather than men. In this poor community, there have been a reproduction of unequal gender-based power relations in the practices of girl marriage. The social values that marriage is not a sin and that a job is not compulsory for man before marriage were taught and socialize for generations.

What we learned from this study is that young married girls suffer for the loss of rights as children and these was the path to poverty trap. There have been a reproduction of unequal gender-based power relations in the practices of girl marriage in the poor community. Unequal gender-based power is concerned with rights that limit the power of young wives in early marriage and effects of knowledge generated and transmitted through power and which in turn reproduce this unequal power relations. The consequences of child marriage not only are felt at the individual level, but also have profound effected in the forms of lost earnings and intergenerational transmission of poverty. This paper argues that, using Foucault theory, a triangle of power, right and knowledge has been take place in the practices of girl marriage in poor community.

REFERENCE

- Biro Pusat Statistik (Indonesia Statistical Institution). Buku Survey Kependudukan Indonesia. 1997.
- Chambers, Robert. 2006. -Poverty Unperceived: Traps, Biases and Agende. *Working Paper Unniversity of Sussex*.
- Field, E., and A. Ambrus. 2008. -Early Marriage, Age of Menarche, and Female Schooling Attainment in Bangladesh. *Journal of Political Economy* 116 (5): 881-930. doi: 10.1086/593333
- Foucault, Michel. 2002. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan* (translation from *Power/Knowledge*. Sussex: The Harvester Press). Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Gemignani, R. and Q. Wodon. 2015. -Child Marriage and Faith Affiliation in Sub-Saharan Africa: Stylized Facts and Heterogeneity. *The Review of Faith & International Affairs*, 13 (3): 14-47.
- Jain, S., and K. Kurz. 2007. *New Insights on Preventing Child Marriage: A Global Analysis of Factors and Programs*. Washington, DC: ICRW.
- Karam, A.2015. -Faith-inspired Initiatives to Tackle the Social Determinants of Child Marriage. *The Review of Faith & International Affairs*, 13 (3): 59-68.
- Khanna, T., R. Verma, and E. Weiss. 2013. *Child Marriage in South Asia: Realities, Responses and the Way Forward*. Bangkok: UNFPA Asia Pacific Regional Office.
- Klugman, J., L. Hanmer, S. Twigg, T. Hasan, and J. McCleary-Sills. 2014. *Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity*. Washington, DC: The World Bank.
- Koblinsky, M., M. E. Chowdhury, A. Moran, and C. Ronsmans. 2012. -Maternal Morbidity and Disability and their Consequences: Neglected Agenda in Maternal Health. *Journal of Health, Population, and Nutrition* 30 (2): 124-0. doi: 10.3329/jhpn.v30i2.11294
- Lamb, S., and Z. D. Peterson. 2012. -Adolescent Girls' Sexual Empowerment: Two Feminists Explore the Concept. *Sex Roles* 66 (11-12): 703-712. doi: 10.1007/s11199-011-9995-3
- Le Strat, Y., C. Dubertret, and B. Le Foll. 2011. -Child Marriage in the United States and Its Association With Mental Health in Women. *Pediatrics* 128 (3): 524-530. doi: 10.1542/peds.2011-0961
- Malhotra, A., A. Warner, A. McGonagle, and S. Lee-Rife. 2011. *Solutions to End Child Marriage What the Evidence Shows*. Washington, DC: International Center for Research on Women.
- Mudrajat, Kuncoro. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nguyen, M. C., and Q. Wodon. 2015b (forthcoming). -Early Marriage, Pregnancies, and the Gender Gap in Education Attainment: An Analysis Based on the Reasons for Dropping out of School. *In Child Marriage and Education in Sub-Saharan Africa*, edited by Q. Wodon. Washington, DC: World Bank.
- Nour, N. W.2009. -Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue. *Review of Obstetric Gynecology* 2 (1): 51-56.
- Plan UK. 2011. *Breaking Vows: Early and Forced Marriage and Girls' Education*. London: Plan UK.
- Raj, A. 2010. -When the Mother is a Child: The Impact of Child Marriage on the Health and Human Rights of Girls. *Archives of Disease in Childhood* 95 (11): 931-935. doi: 10.1136/adc.2009.178707
- Susanti H., Emy. 2007. *Ketimpangan Gender dan Ketidakberdayaan Perempuan Miskin Perkotaan*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Susanti H., Emy. 2009. *Perempuan Miskin dan Makna Sosial Kemiskinan*. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik. Tahun XXII, Nomor 4, Oktober-Desember 2009.
- Susanti H., Emy. 2012. *Mekanisme Survival dan Pemberdayaan Perempuan Miskin (Kajian Isu-isu Gender di Daerah Eksplorasi Migas di Jawa Timur)*. Aditya Medika.

Susanti H., Emy. 2013. *Kajian Keluarga Miskin dan Perangkap Kemiskinan di Perkotaan*. Surabaya: Insan Cendekia.

Lampiran 8

KABUPATEN SAMPANG



Jalan Desa yang Sangat Berlubang dan Minim Pembangunan



Kondisi Masyarakat yang Miskin

KABUPATEN BLITAR



Kondisi Masyarakat yang Ada di Blitar



Proses Wawancara yang Dilakukan oleh Surveyor

KABUPATEN PONOROGO



**Kondisi Masyarakat yang Miskin
(mengalami kelumpuhan dan tuna rungu)**



Salah Satu yang Menikah di Usia 13 Tahun Akibat Dijodohkan oleh Orang Tuanya dan Tidak Melanjutkan Sekolah. Kesehariannya mencari Daun Jati di Hutan untuk Digunakan sebagai Pembungkus Nasi Pecel yang Dijualnya. Suaminya Sudah Tidak Bekerja dan Menjadi Korban Perselingkuhan JUA

**PRAKTIK PERNIKAHAN DINI ANAK PEREMPUAN DALAM
KOMUNITAS MISKIN DI PROVINSI JAWA TIMUR
(STUDI PERSPEKTIF GENDER UNTUK MODEL PERLINDUNGAN ANAK)**



Peneliti

PROF. DR. DRA. EMY SUSANTI, M.A.

Sosiologi/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga
Email: emy_susanti@yahoo.com

SATITI KUNTARI, DRG., MS

Kedokteran Gigi Anak/Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga
Email: satiti.kuntari@gmail.com

DRA. SARTIKA SOESILOWATI, M.A., PH.D

Sosiologi/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga
Email: sartika.soesilowati@gmail.com



HKI dan Publikasi

1. Girl Marriage and the Trap of Poverty: A Sociological Study on Social Reproduction of Unequal Gender Relations. Presentasi dan Proceeding Abstract. The 2nd International Conference on Gender Equality and Ecological Justice (GE2J), "Empowerment of Women's Knowledge for Equality, Child's Protection, Peace and Sustainable Development". August 09-12, 2017, Salatiga, Indonesia.
2. Girl Marriage and Marginalisation of Women in the Cities of East Java. Presentasi dan Proceeding Abstract. 4th International Conference on Urban Studies December 08-09, 2017, Surabaya, Indonesia.
3. Model Rekayasa Sosial Kebijakan Pencegahan Nikah Dini di Provinsi Jawa Timur. Policy Brief. Masukan Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur.
4. Girl Marriage and Marginalisation of Women in the Cities of East Java. Proceeding Terindex CRC Press (Taylor and Francis Publishing) 2018.
5. Gender Based Power Relations and the Practices of Girl Marriage in Poor Families in East Java. Jurnal: International Social Science Journal. (submit April 2018, Revision.)
6. Gender Mainstreaming Strategy to Eliminate The Practice of Girl Marriage. Makalah. Presentasi di 4th International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (ICoCSPA). August 13, 2018, Surabaya, Indonesia.
7. The Role of Informal Leaders in the Practices of Underage Girl Marriage in Poor Community in East Java. Artikel submit ke Jurnal:

 Latar Belakang

Praktek perkawinan anak perempuan di dalam masyarakat merupakan sebuah realitas sosial yang telah berlangsung turun temurun sejak dahulu. Khususnya dalam komunitas miskin, anak-anak perempuan banyak yang tidak melanjutkan sekolah dan kemudian dinikahkan dalam usia yang masih tergolong usia anak (belum berusia 16 tahun). Di beberapa wilayah Provinsi Jawa Timur, walaupun tingkat pendidikan makin maju dan kebijakan Pemerintah telah membatasi praktek perkawinan anak, tetapi kecenderungan untuk menikahkan anak perempuan dalam usia dini tetap terjadi hingga saat ini. Dibandingkan wilayah lain di Indonesia, angka pernikahan dini anak perempuan di Provinsi Jawa Timur adalah yang tergolong cukup besar, khususnya untuk wilayah pedesaan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Bangkalan Madura menunjukkan bahwa anak-anak perempuan yang terlibat dalam praktek perkawinan di bawah usia 18 tahun berasal dari keluarga miskin. Para orangtua mendorong anak-anak perempuan segera menikah walaupun usianya belum genap 18 tahun dan masih bersekolah dengan tujuan agar dapat meringankan beban ekonomi keluarga (Susanti, Emy: 2015). Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2007 memperlihatkan jumlah kasus pernikahan pasangan usia di bawah 16 tahun di Jawa Timur mencapai 39,4%. Di daerah Pedesaan, pernikahan bahkan sering dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid yang pertama. Sementara itu, data dari BPS (1997) menyatakan bahwa satu dari tiga wanita yang pernah menikah di Jawa, menikah untuk pertama kalinya pada usia di bawah 16 tahun, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur (sekitar 40%). Ditengarai bahwa semakin rendah tingkat pendidikan orang tua, semakin cenderung menikahkan anak perempuan di usia dini, yaitu di bawah usia 18 tahun.

Kecenderungan perkawinan anak perempuan, dari sisi jumlah terlihat menonjol di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah "Tapal Kuda" di Provinsi Jawa Timur. Dari

 Hasil dan Manfaat

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) praktik pernikahan dini di kalangan anak perempuan masih dilakukan karena alasan ekonomi dengan label sosial negatif yang dikenakan pada anak perempuan. Kondisi ekonomi para anak perempuan yang menjalani pernikahan dini diperburuk oleh masalah multidimensional. Anak perempuan ini bahkan memiliki kondisi yang lebih baik sebelum menikah. Setelah menikah, para anak perempuan putus sekolah, memiliki anak-anak yang kekurangan gizi, dan tidak bisa memperbaiki kondisi ekonomi orang tua mereka.
- 2) anak perempuan di bawah umur menjadi korban pernikahan dini di mana relasi kuasa dengan suami dan mertuanya tidak setara. Anak perempuan di bawah umur menderita karena mereka kehilangan hak mereka sebagai anak-anak. Mereka dibebani dengan banyak tanggung jawab dalam tugas-tugas domestik sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengejar impian mereka sendiri. Perempuan di bawah umur yang menikah rentan terhadap pelanggaran hak-hak mereka sebagai anak-anak karena mereka tidak dapat dianggap sebagai anak-anak lagi setelah menikah. Dengan demikian, kehidupan anak perempuan-anak perempuan itu berpotensi memburuk karena mereka terjebak dalam tugas-tugas domestik dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka.
- 3) relasi gender antara anak perempuan di bawah umur dan suami mereka serta para orang tua dan mertua berdasarkan relasi gender yang tidak setara direproduksi dan diteruskan dari generasi ke generasi.
- 4) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini membuat kemiskinan semakin buruk. Para anak perempuan terjebak dalam pekerjaan rumah tangga sehingga mereka tidak dapat melakukan kegiatan yang produktif.
- 5) Studi ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah dan hukum pernikahan tidak dapat

kacamata norma dan tradisi masyarakat, pernikahan anak perempuan pada usia di bawah 18 tahun bukan hal yang aneh, dan bahkan merupakan kelaziman, apalagi pada komunitas miskin. Seorang anak perempuan, ketika mereka sudah haid atau lulus SD, biasanya dengan segera akan dinikahkan oleh orang tuanya. Praktek perkawinan anak perempuan di kalangan keluarga miskin dianggap dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, ada rasa malu di kalangan orang tua di daerah pedesaan, jika anak perempuan mereka tidak segera menikah, maka dikhawatirkan akan ada cemoohan masyarakat yang menyebut sebagai perawan tua, perempuan tak laku kawin, dan sejenisnya. Hal-hal tersebut yang mendorong pada akhirnya banyak orang tua lebih senang segera menikahkan anak perempuannya secepat mungkin.

Banyak studi menunjukkan bahwa pernikahan dini dalam menyebabkan terjadinya kasus-kasus kematian ibu (AKI) akibat kurangnya informasi tentang reproduksi sehat sehingga ibu-ibu yang masih berusia belia menjadi sangat beresiko meninggal ketika melahirkan. Di samping itu, dalam usia yang masih belia, anak perempuan secara psikologis biasanya masih belum matang dan siap untuk menjadi ibu, sehingga tidak mustahil anak-anak mereka pun menjadi kurang atau salah perawatan akibat tidak dimilikinya pengetahuan yang cukup tentang hal itu (Irwanto, 1999).

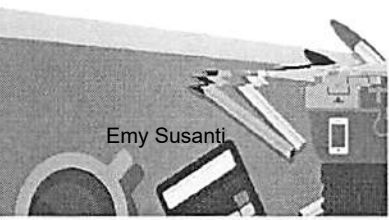
Walaupun Pemerintah telah membuat Kebijakan untuk mencegah perkawinan anak perempuan di Indonesia, khususnya dalam komunitas miskin tetapi hingga saat ini praktek perkawinan anak perempuan di Provinsi Jawa Timur tetap banyak ditemui. Selain itu, dalam banyak kasus telah terbukti bahwa praktek perkawinan anak perempuan lebih banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan, khususnya bagi anak perempuan.

Pencegahan praktek perkawinan anak perempuan harus dilakukan secara holistik yang langsung menyentuh perubahan nilai-nilai sosial budaya, khususnya dalam komunitas miskin. Melalui studi ini yang berupaya memahami realitas praktek perkawinan anak perempuan di Provinsi Jawa Timur diharapkan akan dapat dirumuskan masukan dalam berbagai program

dengan mudah mengurangi praktik pernikahan anak perempuan di bawah umur. Pencegahan pernikahan anak membutuhkan pendekatan yang komprehensif dengan mengatasi nilai-nilai sosial dan budaya, terutama mempromosikan relasi gender yang setara. Salah satu solusinya adalah pemberdayaan berdasarkan perspektif gender yang setara.

Manfaat Penelitian:

1. Tersedianya data dasar yang valid dan rinci tentang profil aktor yang berperan, mekanisme reproduksi sosial dan wacana sosial dalam praktek pernikahan dini anak perempuan, khususnya dalam komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur. Data tersebut sangat penting sebagai dasar masukan dalam perumusan kebijakan dan program serta peraturan yang membatasi praktek pernikahan dini anak perempuan di Indonesia.
2. Ditemukannya Analisis Baru tentang keterkaitan antara realitas praktek pernikahan dini anak perempuan (perkawinan dibawah usia 16 tahun) dengan ideologi gender dan Analisis terhadap nilai-nilai dan sistem patriarki dalam praktek pernikahan dini anak perempuan pada komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur..
3. Model Kebijakan dan Rekayasa Sosial perlindungan dan pencegahan praktek pernikahan dini anak perempuan berperspektif gender yang dapat diterima dan memberikan perubahan positif dalam kehidupan komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur.
4. Terumuskannya Pendekatan dan Analisis Baru Model Perlindungan dan Pencegahan Praktik Pernikahan dini Anak Perempuan dengan pendekatan perspektif gender yang bersifat holistik yang dapat diimplementasikan dalam Komunitas dimana terjadi praktek pernikahan dini anak perempuan, khususnya komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur.



yang aplikatif untuk mencegah dan mengurangi terjadinya praktek pernikahan anak perempuan di kalangan komunitas miskin.

Fokus Penelitian Tahun 1:

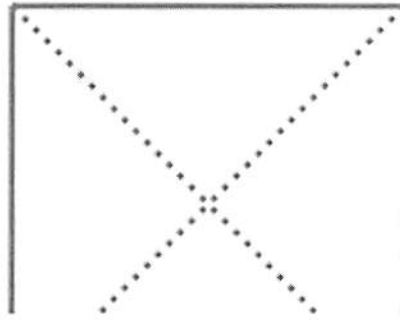
1. Bagaimana gambaran ketidaksetaraan gender dalam praktek perkawinan anak perempuan di kalangan keluarga miskin di Provinsi Jawa Timur
2. Bagaimana profil para aktor yang berperan dalam praktek perkawinan anak perempuan dari keluarga miskin di Provinsi Jawa Timur
3. Bagaimana gambaran rantai kemiskinan di kalangan komunitas yang melakukan praktek perkawinan anak perempuan di Provinsi Jawa Timur



Gambar 1: Kondisi Keluarga Pernikahan Dini Komunitas Miskin di Ponorogo

Fokus Penelitian Tahun 2:

- a) Mengidentifikasi keterkaitan antara realitas praktek pernikahan dini anak perempuan (perkawinan dibawah usia 18 tahun) dengan ideologi gender dalam komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur
- b) Menemukan nilai-nilai dan sistem patriarki dalam praktek pernikahan dini anak perempuan pada komunitas miskin
- c) Terumuskannya Pendekatan dan Analisis Baru Model Kebijakan dan Rekayasa Sosial untuk perlindungan dan pencegahan praktek pernikahan dini anak perempuan berperspektif gender yang dapat diterima dan memberikan perubahan positif dalam kehidupan komunitas miskin di Provinsi Jawa Timur



Tujuan Penelitian Tahun 1:

1. Mengidentifikasi ketidaksetaraan gender dalam praktek perkawinan anak perempuan di kalangan keluarga miskin di Provinsi Jawa Timur
2. Mendeskripsikan profil para aktor yang berperan dalam praktek perkawinan anak perempuan dari keluarga miskin di Provinsi Jawa Timur
3. Menemukan gambaran rantai kemiskinan di kalangan komunitas yang melakukan praktek perkawinan anak perempuan di Provinsi Jawa Timur

Tujuan Penelitian Tahun 2:

- a) Mengidentifikasi profil para aktor yang

- berperan dalam praktek perkawinan anak perempuan dan mengungkap gambaran ketidaksetaraan gender dalam praktek perkawinan anak perempuan di kalangan keluarga miskin di Provinsi Jawa Timur
- b) Menemukenali rantai kemiskinan di kalangan komunitas yang melakukan praktek perkawinan anak perempuan di Provinsi Jawa Timur
- c) Merumuskan Model perlindungan dan pencegahan praktek perkawinan anak perempuan dengan pendekatan perspektif gender



Metode

Studi ini dilakukan di 3 (tiga) Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Ponorogo dimana di daerah ini banyak terjadi praktik perkawinan anak perempuan di usia dini. Subyek penelitian ini adalah anak perempuan pelaku-korban pernikahan dini dan anggota keluarga besarnya serta tokoh masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang dilengkapi dengan data kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam kepada 30 informan (masing-masing 10 informan di setiap lokasi penelitian) didukung oleh wawancara menggunakan kuesioner kepada 300 responden (masing-masing 100 responden di setiap lokasi penelitian).

